

STRATEGI *MEDIA RELATIONS* KEMENTERIAN LUAR

NEGERI INDONESIA

(Studi Deskriptif Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di
Mata Media Asing pada Kasus Eksekusi Hukuman Mati Narapidana Narkoba)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nadya Ariesta Komala Dewi

NPM 210110120392



UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT

2016

LEMBAR PERSEMBAHAN

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ فَإِنَّ

يُسْرًا أَلْتَسِرَ مَعَ إِنَّ

“Then, surely with hardship comes ease:” “Surely, with hardship comes ease,”

(Surah al-Inshirah, 94: 5-6)

The holy Prophet (S) is reported to have said:

“Do know that surely with hardship come ease, and surely with patience comes victory, and surely with distress comes relief”

“Success is the result of struggle”

Alhamdulillahirrabil’alamin

Terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-NYA

Teruntuk Mama, Papa, dan Ryan tersayang, yang senantiasa berdoa, mendukung, memberikan semangat, kebahagiaan, kehangatan, kepercayaan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya

Nadya mengucapkan terima kasih banyak, Nadya sayang kalian.

Gelar sarjana ini Nadya persembahkan untuk kalian.

ABSTRAK

Nadya Ariesta Komala Dewi, 210110120392. 2016. Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Judul Skripsi “**Strategi Media relations Kementerian Luar Negeri**” dengan pembimbing utama Dr. Evi Novianti, M.Si dan pembimbing pendamping Fajar Syuderajat, S.Sos., M.Si (Psi).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan penyajian data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan *key informant* dengan cara *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan empat tahap yaitu reduksi, penyajian, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teknik validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Hasil penelitian menunjukkan Kementerian Luar Negeri menjalankan salah satu kegiatan *public relations* yaitu *media relations* kepada media asing. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan dengan media asing pada strategi *media relations* yang dijalankannya. Kementerian Luar Negeri juga memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam berhubungan dengan media massa, namun masih kurang memperhatikan satu prinsip yaitu memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa. Oleh karena itu, penulis menyarankan Kementerian Luar Negeri untuk menunjuk seseorang yang hanya bertugas sebagai juru bicara, sehingga jika ada wartawan yang membutuhkan konfirmasi atas suatu isu dari pihak Kementerian Luar Negeri seperti juru bicara Kementerian Luar Negeri, wartawan akan mendapatkan konfirmasi atau pernyataan dengan cepat.

Kata kunci : *media relations, public relations, strategi, citra, media asing*

ABSTRACT

Nadya Ariesta Komala Dewi, 210110120392, 2016. Public Relations Study Program, Faculty of Communication Sciences, Universitas Padjadjaran. Undergraduate thesis title: "Media Relations Strategy Of The Ministry Of Foreign Affairs Of Indonesia". Under supervision of Dr. Evi Novianti, M.Si and co-supervision of Fajar Syuderajat, S.Sos., M.Si (Psi).

The aim of this research is to describe the media relations strategy at the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia on the eye of the foreign media regarding the death sentence execution to the drug-using inmate. This research used descriptive methods with the presentation of the qualitative data. The methods that the writer used to generate the data are interview, observation, and analyzing document. The key informants were chosen by means of purposive sampling. The data were analyzed in three stages, namely reduction, presentation, verification, and conclusion drawing. Data sources were triangulated in order to test the validity of the data. The study was carried out at Ministry of Foreign Affairs office.

The data from the results of the research shows that the Ministry of Foreign Affairs is implementing one the public relations activity, which is media relations to the foreign media. The Ministry of Foreign Affairs is maintaining relations, evolving strategies and relations with the foreign media with the media relations strategies that they're executing. The Ministry of Foreign Affairs also observes some of the basic principal in associating with mass media, however they're still lacking in one of the principal, which is paying attention to mass media's deadline. Therefore, the writer suggests that The Ministry of Foreign Affairs to point someone who only served as a spoke person, so if there are journalists who needs confirmation about some issues from the Ministry of Foreign Affairs, those journalists could get the information or statement faster.

Keywords : media relations, public relations, strategy, image, foreign media

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena atas segala rahmat dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan kuliah jenjang Strata Satu (S1), Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Pembuatan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan pihak-pihak yang sangat berarti baik penulis, baik dalam bentuk bimbingan, materiil maupun moril berupa dorongan, semangat, dan doa bagi penulis agar mampu menghadapi serta mengatasi kesulitan dan hambatan yang ada selama pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala ketulusan penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Evi Novianti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh waktu yang diluangkan, arahan, ketelitian dalam membimbing, dukungan, masukan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Fajar Syuderajat, S.Sos., M.Si (Psi) selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih untuk seluruh waktu yang diluangkan, arahan, ketelitian dalam membimbing, dukungan, masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Dr. Dadang Rahmat Hidayat S.H., S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang telah membantu kelancaran dan

memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.

4. Dr. Susie Perbawasari., M.Si selaku Koordinator Program Studi Hubungan Masyarakat, terima kasih atas segala kemudahan dan atas izin serta kesempatan yang diberikan bagi penulis dalam memperoleh ilmu Humas dan menyelesaikan studi ini.
5. Centurion C. Priyatna, M.Si., Ph.D selaku Dosen Penguji dan Dosen Seminar, terima kasih untuk seluruh waktu yang diluangkan, arahan, ketelitian dalam membimbing, dukungan, masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Hj. Diah Fatma Sjoraida , M.Si selaku Dosen Penguji dan Dosen Wali, terima kasih untuk seluruh waktu yang diluangkan, arahan, ketelitian dalam membimbing, dukungan, masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Priyo Subekti, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji, terima kasih untuk seluruh waktu yang diluangkan, arahan, ketelitian dalam membimbing, dukungan, masukan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak Anton dan Bapak Mufti, terima kasih atas segala bantuan yang diberikan untuk memudahkan segala kebutuhan administrasi penulis selama rangkaian skripsi ini.
9. Bapak/Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, khususnya Program Studi Hubungan Masyarakat

yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

10. Seluruh naarasumber di Kementerian Luar Negeri yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
11. Aria Nurfikry selaku triangulator yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis untuk dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
12. Shella Rahmawati Putri, Dania Marsya Eka Putri, Mustika Rachmawati, Annissa Hafidzah, Mustika Tri Audini, dan Sisca Kurnia sebagai sahabat Lingga, terima kasih telah mengisi hari-hari selama kehidupan kuliah penulis dengan keseruan, canda, dan kenangan yang sangat berharga.
13. Nakita Pradnya Paramitha dan Inmas Ayu Ratnasari, sahabat-sahabat yang sudah mengajarkan penulis untuk selalu menjadi wanita cerdas, mandiri, baik hati, sholeha, dan kuat menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini.
14. Prita Ghina, Karlina dan Allegra Gabriella sebagai sahabat-sahabat yang telah memberikan banyak keceriaan dan kebahagiaan dalam hidup penulis dan menjadi orang-orang yang selalu mendukung penulis dalam kondisi sedih maupun bahagia.
15. Ikram Wiriaatmadja, Siti Bilkis, Dimas Desetya Dechan, Ahmad Fauzi, Ermiel Zulfikar, Reihan Iskandar, Luqman Anindityo, Filgi Nopriyadi, Thoriq, Soni Nugroho, Sowohi, Fadhlan, Sarah Silvia, Alyani Zulhijah, Esta Kania, teman-teman yang memberikan kebahagiaan dan *support* luar biasa dalam suka dan duka penulis selama ini.

16. Hubungan Masyarakat Angkatan 2012 khususnya Kelas Humas E yang telah memberikan banyak sekali kenangan indah, kebahagiaan, dan pembelajaran hidup sejak pertama bertemu hingga sekarang ini
17. Seluruh teman-teman Unit Renang Universitas Padjadjaran, Cinematography Club Fikom Unpad yang telah memberikan banyak sekali kenangan indah, kebahagiaan, dan pembelajaran hidup sejak pertama bertemu hingga sekarang ini.
18. Seluruh teman-teman KKN Cikancra, BEM Fikom Unpad dan LIMUN 2014 yang telah memberikan banyak sekali kenangan indah, kebahagiaan, dan pembelajaran hidup sejak pertama bertemu hingga sekarang ini.
19. Seluruh teman-teman Forsi 2013 (Divisi Olahraga), Forsi 2014 (Panitia Inti) dan Prabu 2014 (Divisi Acara) yang telah memberikan banyak sekali kenangan indah, kebahagiaan, dan pembelajaran hidup sejak pertama bertemu hingga sekarang ini.
20. Ratna Agustini, Galuh Septi Ratnasari, Inten Mulya Putri, Fitha Siregar, Gita Lestari, dan Muhammad Hafidz, yang sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis sejak di bangku SMA hingga sekarang ini.
21. Ayu Nadzira, Fauziah Yulidawati, Herlinda Fitria, Widiaty Oktaviana, Sthefanny Zhaza, yang sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik penulis sejak di bangku SMP hingga sekarang ini.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu sebagai ucapan terima kasih atas segala doa, cinta, kasih sayang, semangat, perhatian,

bantuan serta dukungan yang begitu besar kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik untuk terciptanya kesempurnaan dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat digunakan untuk memberikan ilmu terkait *public relations* dan dapat memberikan manfaat berupa informasi, wawasan, kontribusi bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya program studi Hubungan Masyarakat.

Jatinangor, 1 September 2016

Penulis

Nadya Ariesta Komala Dewi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Konteks Penelitian.....	1
1.2 Fokus Penelitian	11
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Kegunaan Penelitian.....	12
1.5.1 Kegunaan Teoretis	12
1.5.2 Kegunaan Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Review Penelitian Sejenis	14
2.2 Landasan Konsep	30
2.2.1 Tinjauan Mengenai <i>Public relations</i>	30
2.2.2 Tinjauan Mengenai <i>Media relations</i>	32
2.3 Kerangka Pemikiran	39
BAB III SUBJEK, OBJEK, DAN METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Subjek Penelitian.....	43
3.2 Objek Penelitian	46

3.2.1 Kementerian Luar Negeri	46
3.2.1.1 Sejarah Kementerian Luar Negeri	46
3.2.1.2 Visi Misi Kementerian Luar Negeri	49
3.2.1.3 Profil Kementerian Luar Negeri	50
3.2.1.4 Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri	52
3.3 Metodologi Penelitian	53
3.3.1 Paradigma Penelitian	53
3.3.2 Metode Penelitian	55
3.3.3 Teknik Penentuan Key Informant.....	57
3.3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.3.5 Teknik Analisis Data	62
3.3.6 Validitas dan Keabsahan Data Penelitian	65
3.3.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
4.1 Mengelola Relasi pada Strategi <i>Media Relations</i> Kementerian Luar Negeri Indonesia	71
4.1.1 Hasil Penelitian	71
4.1.2 Pembahasan	98
4.2 Mengembangkan Strategi pada Strategi <i>Media Relations</i> Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	111
4.2.1 Hasil Penelitian	111
4.2.2 Pembahasan	138
4.3 Mengembangkan Jaringan pada Strategi <i>Media Relations</i> Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	147
4.3.1 Hasil Penelitian	147
4.3.2 Pembahasan	154
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	159
5.1 Simpulan.....	159
5.2 Saran	162

DAFTAR PUSTAKA 164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sejenis.....	21
Tabel 3.1 Profil Singkat Kementerian Luar Negeri	51
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	67
Tabel 4.1 Daftar Media Asing Kementerian Luar Negeri.....	91
Tabel 4.2 Matriks SWOT Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri.....	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Kementerian Luar Negeri	50
Gambar 4.1 Pernyataan Pers Tahunan Menlu.....	88
Gambar 4.2 <i>Press Release</i> Kementerian Luar Negeri	120
Gambar 4.3 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri saat memberikan keterangan terkait kasus eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba	123
Gambar 4.4 <i>Doorstop</i> dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri setelah press briefing	124
Gambar 4.5 Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers terkait dengan rencana eksekusi mati narapidana narkoba	125
Gambar 4.6 Masyarakat Australia menggelar aksi protes di depan KBRI Canberra, Australia, memohon agar eksekusi mati dibatalkan	129
Gambar 4.7 Masyarakat Filipina menggelar aksi protes di depan KBRI Manila, Filipina, memohon agar eksekusi mati dibatalkan	129
Gambar 4.8 Marty Natalegawa menjadi panelis pada JFCC "Panel Discussion on Foreign Policy under Jokowi"	151

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Bagan 4.1 Mengelola Relasi pada Strategi Media Relations Kementerian Luar Negeri Indonesia	97
Bagan 4.2 Mengembangkan Strategi pada Strategi Media Relations Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	137
Bagan 4.3 Mengembangkan Jaringan pada Strategi Media Relations Kementerian Luar Negeri Indonesia.....	153

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	164
Profil Informan 1	169
Profil Informan 2	177
Profil Informan 3	183
Profil Informan 4	189
Profil Informan 5	195
Profil Informan 6	201
Profil Informan 7	207
Lampiran Dokumentasi	216

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pada tataran dunia internasional masa kini, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Pandangan tersebut menuntut Indonesia untuk selalu menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Tumbuh dan berkembangnya citra positif terhadap Indonesia oleh publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional menjadi salah satu faktor pendukung suksesnya diplomasi Indonesia guna pencapaian kepentingan nasional. Oleh karena itu, upaya membangun citra positif Indonesia menjadi hal yang penting, mengingat citra bangsa yang positif akan turut mendukung peningkatan kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. (Kementerian Luar Negeri, 2015: 22)

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, bertugas membantu presiden RI dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sarasannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Berdasarkan Perpres (peraturan presiden) No. 56 tahun 2015 yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri, dijelaskan bahwa:

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Luar Negeri juga menyelenggarakan fungsi diantaranya, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. (Kementerian Luar Negeri, 2015: 1-2)

Dengan tugas dan fungsi yang lebih rinci, Kementerian Luar Negeri memiliki posisi yang strategis dalam hubungan luar negeri. Kementerian Luar Negeri diberi kebebasan dalam penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang politik luar negeri, mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik luar negeri, dan dengan tetap akan berkoordinasi dengan Menteri Negara Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Kementerian Luar Negeri sebagai pilar terdepan dalam politik luar negeri dan hubungan luar negeri berperan penting dalam memberikan informasi kepada publik internasional tentang posisi, arah dan kebijakan Indonesia. Kementerian Luar Negeri pun berperan penting dalam membangun dan menguatkan citra positif terhadap Indonesia kepada publik, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Upaya membangun citra positif Indonesia kepada publik di dalam negeri dan Internasional dapat dilakukan diantaranya melalui pemberitaan dari media massa asing. Menurut Kepala subdit Data dan Media, Direktorat Informasi dan Media Andi Syamsurijal Usman tentang upaya membangun citra Indonesia,

“Untuk membentuk atau membangun citra positif Indonesia melalui pemberitaan (di berbagai media) diperlukan upaya yang gencar dan berkesinambungan. Pemberitaan media asing secara tidak langsung dapat membentuk opini publik dunia tentang Indonesia.”¹

Dengan demikian, agar tercapai citra positif Indonesia yang telah dikehendaki, diperlukan upaya-upaya seperti strategi *media relations* yang gencar dan berkesinambungan. Kebijakan media asing yang sangat potensial memperkenalkan Indonesia di dunia internasional bisa menjadi persoalan serius, jika menganut konsep *bad news is good news*. Tentunya akan muncul gambaran tak berimbang, yaitu persepsi buruk tentang citra Indonesia di mata internasional.²

Tidak jarang pemberitaan bersentimen negatif menerpa Indonesia dari para media asing. Media asing yang dimaksud adalah *Sydney Morning Herald*, ABC, *The Guardian*, BBC, CNN, *New York Times*, *Channel News Asia*, *The Daily News*, *Radionz*, dan *Al Jazeera*. Pemberitaan bersentimen negatif yang diberitakan oleh media asing tersebut, salah satu diantaranya adalah pemberitaan negatif tentang eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. *Blow up* dari media asing yang tinggi terhadap kasus tersebut telah memberikan gambaran kepada publik domestik dan internasional bahwa Indonesia bukanlah negara yang peduli terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini tentunya menunjukkan citra negatif Indonesia di mata dunia sebagai negara yang kerap melakukan pelanggaran HAM. Hal tersebut pun senada dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Tedjo Edhi Purdijanto, menurutnya, sudah banyak media asing

¹ Wawancara dengan Andi Syamsurijal Usman, Kepala subdit Data dan Media, Direktorat Informasi dan Media pada tanggal 3 April 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

² Agas, Stevie. (2009, 1-15 Mei). *Kasus David Pengaruhi Citra Indonesia*. Tabloid Reformata, p.19, diakses pada tanggal 4 April 2016

yang membentuk opini Indonesia sebagai negara pelanggar hukum internasional dan HAM.³ Bahkan, organisasi HAM Internasional, yaitu Amnesty International, dalam pernyataan resminya pun menyebut Indonesia tidak peduli terhadap proses hukum dan standar perlindungan HAM.⁴

Dalam menanggulangi suatu kasus, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan beberapa upaya. Menurut Kepala subdit Data dan Media, Direktorat Informasi dan Media Andi Syamsurijal Usman, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan dari sisi substansi dan dari sisi komunikasi.⁵ Dari sisi substansi, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Konsuler, bekerjasama dengan Kejaksaan Agung melakukan briefing teknis kepada perwakilan asing di Indonesia yang warga negaranya segera dieksekusi mati karena kasus narkoba.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) hari Senin (16/2) siang, memanggil perwakilan asing di Indonesia yang warga negaranya segera dieksekusi mati karena kasus narkoba. Pemanggilan itu bertujuan untuk memberikan taklimat (*briefing*) terkait pelaksanaan eksekusi mati. Ada *briefing* teknis perwakilan terkait mekanisme sejak ada penolakan grasi, visitasi atau bagaimana pengaturannya jika keluarga mau bertemu terpidana, serta peliputan media asing dalam eksekusi.⁶

Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Kedutaan terdakwa eksekusi hukuman mati yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).

³ Maharani, Esthi. (2015). *Tedjo: Media Asing Bentuk Opini Indonesia Pelanggar HAM*. Diakses pada tanggal 6 April 2016 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/09/nkxqp7-tedjo-media-asing-bentuk-opini-indonesia-pelanggar-ham>

⁴ Mandey, Adrianus. (2015). *Eksekusi Mati di Tengah Tekanan Dunia*. Diakses pada tanggal 6 April 2016 dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/620072-eksekusi-mati-di-tengah-tekanan-dunia>

⁵ Wawancara dengan Andi Syamsurijal Usman, Kepala subdit Data dan Media Direktorat Informasi dan Media pada tanggal 3 April 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶ Wahyuni, Natasia Christy (2015). *Hukuman Mati, Perwakilan dari 5 Negara Bungkam Usai Pertemuan dengan Kemlu*. Diakses pada tanggal 6 April 2016 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/249677-hukuman-mati-perwakilan-dari-5-negara-bungkam-usai-pertemuan-dengan-kemlu.html>

Kementerian Luar Negeri berusaha menjadi fasilitator bagi Kedutaan terdakwa yang ingin mengetahui tentang informasi terkait eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Kementerian Luar Negeri juga telah menjelaskan kepada para pejabat tinggi negara dari terdakwa eksekusi hukuman mati yang berkewarganegaraan asing maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait proses hukum di Indonesia dan kebijakan eksekusi hukuman mati yang dijalankan oleh Indonesia.

“Jadi yang pertama kita kasih tau itu, justru si terdakwa. Misalnya si A, kita kasih tau, ‘nih ya, ini tanggalnya udah dapat’. Karena kalau pelaksanaan, dari sejak *verdict* sampai pelaksanaan itu panjang, enggak cuma kaya *verdict*-nya hari senin terus hari senin minggu depannya kamu dihukum mati, itu engga. Itu prosesnya bertahun-tahun. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Jadi akhirnya diputuskan nih. Diputuskan ‘ok, kita akan melaksanakan hukuman mati, April tanggal segini’. Yang pertama dikasih tau itu adalah si terdakwa. Terdakwa dikasih tau terus terdakwa yang memilih, apakah dia akan memberitahukan *embassy*-nya atau tidak. Semuanya mengatakan mereka ingin memberitahukan *embassy*. *Embassy* datang, keluarga diberitahu. Setelah keluarga diberitahu, baru beritanya menyebar.”⁷

Dari sisi komunikasi, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Informasi dan Media melakukan penyampaian informasi melalui kegiatan *press briefing* yang mengundang media nasional dan media asing. Dalam *press briefing* tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kepala Biro Administrasi Menteri) akan memaparkan informasi yang diduplikatnya dari Kementerian atau Lembaga terkait (Kejaksaan Agung), tentang pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Ketiga, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Informasi dan Media pun akan memperbanyak penerbitan *press release* dan mendistribusikannya secara cepat kepada seluruh media massa nasional dan media asing. *Press release* akan

⁷ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

didistribusikan melalui pengiriman via *e-mail* kepada wartawan, serta dengan mengunggahkannya ke situs portal Kemlu.

Meskipun telah melakukan berbagai hal untuk mencoba ‘meredam’ pemberitaan negatif dari media asing yang menyudutkan Indonesia, pada kenyataannya, citra negatif Indonesia sebagai negara yang kerap melakukan pelanggaran HAM masih timbul di mata media asing. Pemberitaan yang ditulis oleh media asing terhadap kasus HAM seperti eksekusi hukuman mati masih negatif. Upaya Kementerian Luar Negeri yang melakukan koordinasi dengan kedutaan terdakwa tidak banyak diliput oleh media asing. Padahal kegiatan ini merupakan bentuk hubungan baik Kemlu kepada masing-masing terdakwa maupun negaranya. Dengan demikian, hal tersebut dapat menunjukkan ideologi media asing melihat Indonesia pada isu HAM seperti pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba masih negatif. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi (Kasi) Akreditasi Media Asing, Titania Arimbi dalam pernyataannya mengenai tanggapan negatif tersebut:

“Balik lagi, kita tidak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan. Karena yang kita sasar adalah efek jera dari pengedar narkoba. Apakah kemudian semuanya baik-baik saja? Tentu tidak. Karena, yang perlu dipahami disini adalah bahwa setiap media memiliki agenda, bisa tertebak kalau misalnya media Australia pasti lebih pro kepada orang Australia. Tidak mungkin mereka pro terhadap pemerintah Indonesia, *which is* enggak mungkin. Jadi yang mereka gaungkan dari Australia adalah masalah HAM, masalah betapa Indonesia adalah negara barbar karena masih mengadakan atau melaksanakan hukuman mati.”⁸

Pada eksekusi hukuman mati, Kementerian Luar Negeri telah berusaha untuk dapat melayani media dengan baik. Ketika pemberitaan tentang hukuman

⁸ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

mati kepada narapidana narkoba ini tersebar kepada media massa dan publik, banyak sekali jurnalis asing yang ingin meliput ke Indonesia, seperti jurnalis dari Brazil, Perancis, Filipina, Nigeria, dan Australia yang ingin meliput ke Indonesia. Namun kebanyakan dari media tersebut adalah dari Australia.

Berdasarkan Permenlu (peraturan menteri luar negeri) No 07 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri, Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. (Kementerian Luar Negeri, 2011: 3)

Kementerian Luar Negeri, melalui Direktorat Informasi dan Media memiliki tugas untuk melayani media-media yang akan meliput Indonesia. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah penerbitan visa jurnalis. Kementerian Luar Negeri berupaya untuk memudahkan pelaksanaan jurnalistik kepada media-media asing untuk melakukan kegiatan peliputan.

“Saat *the words is out*. Kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah media asal Australia, karena ada dua warga negara yang dihukum mati. Jadi kalau ada jurnalis asing mau datang ke Indonesia, mereka itu diharuskan menggunakan visa kunjungan jurnalistik. Itu nama visanya. Jadi ketika *the words is out*. Banyak sekali warga negara, media asal Australia yang mendaftar untuk meliput saat-saat eksekusi hukuman mati tersebut. Gitu. Itu kita fasilitasi. Maksudnya kita fasilitasi adalah kita permudah dalam mengurus visanya. Mereka memberikan aplikasi, dalam hitungan hari, langsung kita setujui. Bahkan kita sudah wanti-wanti kepada kedutaan dan konsul jenderal kita di Australia bahwa kalau misalnya ada jurnalis-jurnalis yang mendaftar khusus untuk peliputan hukuman mati itu langsung dikasih visa.”⁹

Pada eksekusi hukuman mati, Kementerian Luar Negeri melakukan *press briefing* dengan narasumbernya yaitu juru bicara Kementerian Luar Negeri

⁹ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

bernama Arrmanatha Nasir, yang juga kerap disapa Tata. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Kementerian Luar Negeri bahwa segala *statement* yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Menurut Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi, terkait kebijakan *statement* Kementerian Luar Negeri.

“Perlu diketahui, Kemlu memiliki satu kebijakan yaitu bahwa seluruh *statement* yang mengatasnamakan kementerian luar negeri akan dikeluarkan oleh Pak Arramanatha Natsir (Pak Tata). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir salah informasi.”¹⁰

Oleh karena kebijakan tersebut, media asing yang ingin mendapatkan *statement* atau pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, maka akan mendapatkan informasinya dari juru bicara Kementerian Luar Negeri. Namun pada pelayanan media seperti tersebut, dari sisi media asing, ada yang masih kurang terpenuhi pelayanannya.

Wartawan dari BBC, Heyder Affan memberikan keterangan terkait layanan media yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri.

“Informasi yang diberikan oleh juru bicara cukup. Tapi kita kan butuh informasi yang lebih lengkap, yang saat itu kita juga butuhkan. Harusnya mereka bisa menyediakan. Biasanya mereka bilang ‘oh tunggu dulu yaa, kita konfirmasi dulu, kita cek dulu, beri saya waktu beberapa jam’. Ingin kita sih cepet yaa, sebab kita di *online* juga kan. Kecepatan itu penting. Sehingga kadang-kadang, kita beri saja tulisan, sampai pukul ini, kita belum memperoleh tanggapan.”¹¹

Wartawan ABC, Archicco Guilianno pun memberikan keterangan seputar layanan media yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri.

¹⁰ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

¹¹ Wawancara dengan Heyder Affan, wartawan media asing BBC, 8 Agustus 2016 di Kantor BBC

“Sebenarnya dari *press release* yang diberikan oleh mereka sudah cukup, namun seperti media aku, ABC itu radio dan TV juga, nah ini yang kadang suka susah, karena memang kita kan enggak bisa setiap hari ada disana. Bagi kawan-kawan media yang ngepos disana, butuh *quote*, langsung aja cari Pak Tata di kantor. Kalau kita, kita, kita harus telepon dulu, jadi *sometimes, almost of the time, it needs* dua sisi ini untuk bekerja bersama, kadang dari kitanya butuh pengertian juga ke mereka, gitu, oh iya pasti akan sibuk banget menjawab telepon-telepon yang masuk, tapi disisi mereka, mereka harus tahu bahwa teman-teman media asing nih orangnya sedikit. Jadi walaupun sudah dikasih *press release*. Jika ada hal yang mau ditanyain, tapi dia mungkin enggak bisa datang, jadi cuma bisa telepon”¹²

Dengan jumlah wartawan media asing atau koresponden media asing yang sedikit, kinerja dari wartawan media asing pun menjadi terbatas via telepon atau whatsapp. Keadaan wartawan media asing yang tidak dapat melakukan pos atau ditempatkan khusus untuk meliput berita bidang internasional di Kementerian Luar Negeri, mengakibatkan wartawan media asing tidak dapat langsung dekat dengan narasumber. Ketika harus mengkonfirmasi suatu isu, layanan media yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dalam membantu media asing sangat dibutuhkan bagi media asing.

Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa para wartawan media asing yang meliput berita di Kementerian Luar Negeri bukanlah wartawan yang memiliki pos sendiri di Kementerian Luar Negeri. Wartawan media asing atau disebut juga koresponden, akan menulis berita sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Dengan tidak adanya wartawan media asing yang memiliki pos sendiri seperti media nasional, komunikasi yang terjalin antar individu dan atau hubungan media secara individual menjadi kurang dekat. Menurut Wartawan media asing ABC, Archicco Guilianno terkait pos media asing,

¹² Wawancara dengan Archicco Guilianno, wartawan media asing ABC, 10 Agustus 2016 di Grand Indonesia

“Media asing itu isinya dikit-dikit. Jadi semacam perwakilan. Jadi satu media isinya antara 2-5 orang. Jadi karena isinya sedikit, jadi kita enggak bisa ngepos. Jadi kita harus beredar disemuanya, harus eksis di Kemlu, Istana, di Kementerian-kementerian lainnya. Jadi akibatnya kadang kita juga, biasanya yang ngepos-ngepos gitu kan mereka mendalami sekali gitu, Sementara kita kan enggak bisa sampai bergaul setiap hari, kita harus kaya dekat banget sama sumber itu enggak bisa.”¹³

Selain itu pula, upaya Kementerian Luar Negeri untuk menjalin hubungan baik dengan media melalui pelayanan media seperti pemberian ID pers kepada saat meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati narapidana narkoba di Indonesia kurang ditanggapi dengan cukup baik oleh media, pemberitaan negatif dari media-media asing masih muncul. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan dari Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi,

“Saat kasus eksekusi hukuman mati kemarin (2015), kebanyakan yang meliput adalah wartawan media asing dari Australia. Kami dari Kementerian Luar Negeri tetap memberikan pelayanan kepada media seperti pemberian ID Pers untuk dapat meliput. Kami tidak berusaha untuk menghalang-halangi pekerjaan mereka.”¹⁴

Hal tersebut menunjukkan upaya-upaya hubungan media yang telah dibangun oleh Kementerian Luar Negeri selama ini tidak cukup mampu meminimalisir pemberitaan negatif terkait eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Media asing tampak belum tertarik pada upaya Kementerian Luar Negeri yang ingin memperbaiki citra Indonesia terkait HAM. Menurut wartawan dari BBC, Heyder Affan, Kemenlu sudah cukup berupaya untuk melakukan itu, meski bisa lebih baik jika proaktif dan tidak reaktif dalam menanggapi persoalan di dalam negeri yang menjadi otoritasnya. Kementerian Luar Negeri juga perlu

¹³ Wawancara dengan Archicco Guilianno, wartawan media asing ABC, 10 Agustus 2016 di Grand Indonesia

¹⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain seperti TNI, polisi atau komnas HAM.¹⁵

Berdasarkan fakta dan data tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri kepada media asing dalam upaya ‘meredam’ atau menanggulangi kasus yang disoroti dunia, masih belum optimal. Media asing masih cukup ‘dingin’ melihat upaya strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti strategi *media relations* yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian ini adalah: Bagaimana strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia mengelola relasi pada strategi *media relations* di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

¹⁵ Wawancara dengan Heyder Affan, wartawan media asing BBC, 8 Agustus 2016 di Kantor BBC

2. Bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia mengembangkan strategi pada strategi *media relations* di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?
3. Bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia mengembangkan jaringan pada strategi *media relations* di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan relasi pada strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba
2. Untuk mengetahui pengembangan strategi pada strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba
3. Untuk mengetahui pengembangan jaringan pada strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan pembaharuan dalam bidang kajian ilmu komunikasi, khususnya dalam

konteks komunikasi yaitu strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmiah bagi ilmu komunikasi, serta pengembangan ilmiah bagi sosiologi terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan informasi. Konsep strategi *media relations* yang dituliskan oleh Yosali Iriantara dalam bukunya “*Media relations: Konsep, Pendekatan dan Praktek*” diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bentuk-bentuk dari strategi *media relations* yang perlu dijalankan oleh lembaga/ organisasi agar dapat memberikan hasil *media relations* yang maksimal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan pemikiran baru bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman mengenai strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Penelitian ini juga bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran mahasiswa dan memberikan sumbangan terhadap ilmu komunikasi, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Sejenis

Untuk kepentingan dalam penelitian ini salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data pendukung yang akan dilakukan untuk memperkuat penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dapat berupa mencari teori pendukung, pengertian dan penelitian – penelitian sejenis dari berbagai sumber dan buku yang berkaitan dengan penelitian. Berikut ini adalah lima penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan:

A. Pemanfaatan Social Media Twitter sebagai Strategi Komunikasi dalam Perusahaan Komunikasi PT. XL Axiata, Tbk. Central Region

Penelitian pertama adalah penelitian Aina Maryama Isnaini, Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran tahun 2012. Penelitian ini berjudul "Pemanfaatan Social Media Twitter sebagai Strategi Komunikasi dalam Perusahaan Komunikasi PT. XL Axiata, Tbk. Central Region". Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang alasannya, proses dan dampak dengan memanfaatkan Sosial Media Twitter sebagai Strategi Komunikasi Komunikasi Korporat PT. XL Axiata, Tbk Central Region. Metode yang digunaka

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data kualitatif oleh perspektif positivistik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Corporate Communication PT. XL Axiata, Tbk. Central Region memanfaatkan Twitter sebagai salah satu strategi komunikasi kegiatan dengan publik mereka, karena saat ini menunjukkan realitas komunikasi teknologi dan informasi tumbuh. Pemanfaatan proses Twitter sebagai strategi komunikasi melalui tahapan *fact finding*, implementasi, dan evaluasi. Dampak pemanfaatan Twitter sebagai strategi komunikasi adalah respon masyarakat positif, *brand-awareness*, dan citra perusahaan yang positif dari publik. Kesimpulan penelitian ini penggunaan media sosial Twitter oleh Corporate Communications Central Region yang telah dilaksanakan, melalui tahapan, seperti: *fact-finding*, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan sudah benar dan secara rutin. Pemilihan Twitter sebagai strategi komunikasi media sosial Corporate Communications Central Region juga tepat, sesuai dengan Fokus dari XL ini adalah "Jadilah Nomor Satu di data", sehingga pemilihan media sosial Twitter adalah tepat untuk membuat XL sebagai perusahaan jasa telekomunikasi berfokus pada melayani data. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah subjek dan objek penelitian.

B. Perencanaan Strategi Humas Pemprov Banten Pasca Ditetapkannya Kek Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten

Penelitian kedua adalah penelitian Iman Mukhroman, Rangga Galura Gumelar, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) tahun 2013. Penelitian ini berjudul “Perencanaan Strategi Humas Pemprov Banten Pasca Ditetapkannya Kek Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sesungguhnya perencanaan strategi Humas Pemprov Banten pasca ditetapkannya PP tersebut dengan fokus pada model perencanaan strategi *Public relations* dari Ronald D. Smith yang terdiri atas empat fase yang dimulai dengan fase Formative Research, Strategy, Tactics dan Evaluative Research. Pada setiap fase tersebut terdapat tahapan-tahapan perencanaan PR yang mana pada setiap tahapan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam sebagai tehnik pengambilan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif. Hasil pengolahan data memberikan jawaban bagaimana sesungguhnya peran dari Humas Pemprov Banten sangat kecil dan tidak banyak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan KEK ini. Hal ini terjadi karena definisi dan perspektif Humas itu sendiri tidak sama dengan fungsi Humas yang telah kita kenal dalam dunia kerja. Peran Humas Pemprov Banten hanya sebagai pencatat seremonial dan penghubung media tanpa ada suatu kewenangan yang besar dalam menyusun dan mengembangkan pesan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemprov Banten dalam menyelenggarakan dan mengaplikasikan PP tersebut kurang maksimal. Oleh karenanya harus ada terobosan dan perubahan paradigma tentang

fungsi dan peran Humas itu sendiri di lingkungan Pemprov Banten. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah subjek dan objek penelitian.

C. Penggunaan Media Sosial Dalam Program Garuda Indonesia and Liverpool FC Experience

Penelitian ketiga adalah penelitian Fadhlya Chandra Kirana, Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran tahun 2014. Penelitian ini berjudul “Penggunaan Media Sosial Dalam Program Garuda Indonesia and Liverpool FC Experience”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan penggunaan media sosial dalam program ‘Garuda Indonesia and Liverpool FC Experience’ PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penggunaan media sosial dalam program ini cukup berhasil untuk menyebarkan kegiatan kerjasama antara Garuda Indonesia – Liverpool FC. Penggunaan media sosial ini juga membawa perubahan di masyarakat dimana brand Garuda Indonesia semakin dekat asosiasinya dengan brand Liverpool FC sebagai mitra kerjasamanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu konsep citra. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian, subjek dan objek penelitian.

D. Pelaksanaan *Media relations* di Lingkungan Kepolisian

Penelitian keempat adalah penelitian Arief Wibisono, Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran tahun 2015. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan *Media relations* di Lingkungan Kepolisian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *media relations* Humas Polda Jawa Barat melalui pembuatan *press release*. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembuatan *press release* tentang miras oplosan yang dilakukan personel Humas Polda Jabar dibangun sebagai grand design dan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembuatan *press release*. Implementasi pembuatan *press release* tentang miras oplosan yang dilakukan personel Humas Polda Jabar dilakukan dibawah tanggung jawab Kaur Penun Humas Polda Jabar. *Press relase* diproduksi dengan berdasarkan pada indormasi dari database Polda Jabar yaitu liputan langsung di lapangan informasi pers. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan *press release* dinilai telah berjalan sesuai dengan target perencanaan yang ditujukan dengan terpenuhinya target produksi *press relase*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah menggunakan metode penelitian

yang sama yaitu metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah subjek dan objek penelitian.

E. Program Coffe Morning Sebagai *Media relations* PT. Dirgantara Indonesia.

Penelitian kelima adalah penelitian Mochammad Rizki Suryadiputra, Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran tahun 2014. Penelitian ini berjudul “Program *Coffe Morning* Sebagai *Media relations* PT. Dirgantara Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program *coffe morning* sebagai *media relations* PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dalam wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *coffe morning* ini telah berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan media, yaitu menjadi saling kenal, membangun kepercayaan diri mereka, menciptakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah bagian strategis dari media informasi. Kunci utama dari kegiatan *coffe morning* ini adalah menjalin *good relations* dengan para wartawan. Keberhasilan kegiatan *coffe morning* ini dapat diukur dengan banyaknya media yang memberitakan informasi yang diberitakan saat *coffe morning* berlangsung. Apabila semua media yang hadir memberitakan apa yang perusahaan sampaikan, maka perusahaan dapat dikatakan berhasil 100 persen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah

menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah subjek dan objek penelitian.

MATRIKS PENELITIAN SEJENIS

Judul	Pemanfaatan <i>Social Media</i> Twitter sebagai Strategi Komunikasi dalam Perusahaan Komunikasi PT. XL Axiata, Tbk. Central Region	Perencanaan Strategi Humas Pemprov Banten Pasca Ditetapkannya Kek Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten	Penggunaan Media Sosial Dalam Program Garuda Indonesia and Liverpool FC Experience	Pelaksanaan Media Relations di Lingkungan Kepolisian	Program Coffe Morning Sebagai <i>Media</i> <i>Relations</i> PT. Dirgantara Indonesia	Strategi <i>media</i> <i>relations</i> Kementerian Luar Negeri Indonesia
Nama	Aina Maryama Isnaini	Iman Mukhroman, Rangga Galura Gumelar	Fadhlya Chandra Kirana	Arief Wibisono	Mochammad Rizki Suryadiputra	Nadya Ariesta Komala Dewi

Lembaga/ Kota/ Tahun	Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran/ 2012	Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)/ 2013	Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran/ 2014	Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran/ 2015	Jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran/ 2014	Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran/ 2016
Fokus	Bagaimana <i>Social Media</i> Twitter sebagai Strategi Komunikasi dalam Perusahaan Komunikasi PT.	Bagaimana sesungguhnya perencanaan strategi Humas Pemprov Banten pasca	Bagaimana kegiatan pengunaan media sosial dalam program 'Garuda	Bagaimana pelaksanaan <i>media relations</i> Humas Polda Jawa Barat melalui	Bagaimana program <i>coffe morning</i> sebagai <i>media relations</i> PT. Dirgantara	Bagaimana strategi <i>media relations</i> Kementerian Luar Negeri Indonesia di

	XL Axiata, Tbk. Central Region	ditetapkannya PP.No.26/2012 yang menetapkan wilayah Tanjung Lesung Pandeglang Banten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang harus menjadi prioritas bersama	Indonesia <i>and</i> <i>Liverpool FC</i> <i>Experience</i> ' PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk meningkatkan <i>brand</i> <i>awareness</i> perusahaan	pembuatan <i>press</i> <i>release</i>	Indonesia (Persero)	mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba
--	-----------------------------------	---	--	--	------------------------	---

Metode	Deskriptif	Deskriptif	Studi Kasus	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Hasil	Corporate Communication PT. XL Axiata, Tbk. Central Region memanfaatkan Twitter sebagai salah satu strategi komunikasi kegiatan dengan publik mereka, karena saat ini menunjukkan	Humas Pemprov Banten dalam menyelenggarakan dan mengaplikasikan PP.No.26/2012 yang menetapkan wilayah Tanjung Lesung Pandeglang Banten sebagai Kawasan Ekonomi Khusus	Kegiatan penggunaan media sosial dalam program ini cukup berhasil untuk menyebarkan kegiatan kerjasama antara Garuda Indonesia – Liverpool FC. Penggunaan	Perencanaan pembuatan <i>press release</i> tentang miras oplosan yang dilakukan personel Humas Polda Jabar dibangun sebagai grand design dan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembuatan <i>press</i>	Kegiatan coffe morning ini telah berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan media, yaitu menjadi saling kenal, membangun kepercayaan diri mereka, menciptakan	Kementerian Luar Negeri menjalankan salah satu kegiatan <i>public relations</i> yaitu <i>media relations</i> kepada media massa nasional asing. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi,

<p>realitas komunikasi teknologi dan informasi tumbuh. Pemanfaatan proses Twitter sebagai strategi komunikasi melalui tahapan fact finding, implementasi, dan evaluasi. Dampak pemanfaatan Twitter sebagai strategi</p>	<p>(KEK) Pariwisata yang harus menjadi prioritas bersama, kurang berperan maksimal. Hal ini terjadi karena definisi dan perspektif Humas itu sendiri tidak sama dengan fungsi Humas yang telah kita kenal dalam dunia</p>	<p>media sosial ini juga membawa perubahan di masyarakat dimana brand Garuda Indonesia semakin dekat asosiasinya dengan brand Liverpool FC sebagai mitra kerjasamanya.</p>	<p><i>release.</i> perencanaan pembuatan <i>press release</i> tentang miras oplosan yang dilakukan personel Humas Polda Jabar dibangun sebagai grand design dan menjadi panduan dalam pelaksanaan pembuatan <i>press</i></p>	<p>bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah bagian strategis dari media informasi. Kunci utama dari kegiatan coffe morning ini adalah menjalin good relations dengan para</p>	<p>mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan dengan media asing pada strategi <i>media relations</i> yang dijalankannya. Kementerian Luar Negeri juga memperhatikan beberapa prinsip dasar dalam</p>
---	---	--	--	--	--

	<p>komunikasi adalah respon masyarakat positif, brand-awareness, dan citra perusahaan yang positif dari publik.</p>	<p>kerja. Peran Humas Pemprov Banten hanya sebagai pencatat seremonial dan penghubung media tanpa ada suatu kewenangan yang besar dalam menyusun dan mengembangkan pesan.</p>		<p><i>release.</i></p> <p>Implementasi pembuatan <i>press release</i> tentang miras oplosan yang dilakukan personel Humas Polda Jabar dilakukan dibawah tanggung jawab Kaur Penum Humas Polda Jabar. Press</p>	<p>wartawan.</p> <p>Keberhasilan kegiatan <i>coffe morning</i> ini dapat diukur dengan banyaknya media yang memberitakan informasi yang diberitakan saat <i>coffe morning</i> berlangsung. Apabila semua</p>	<p>berhubungan dengan media massa, namun masih kurang memperhatikan satu prinsip yaitu memperhatikan tenggat waktu (<i>deadline</i>) media massa.</p>
--	---	---	--	--	--	---

				relase diproduksi dengan berdasarkan pada indormasi dari database Polda Jabar yaitu liputan langsung di lapangan informasi pers. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, pelaksanaan <i>press release</i>	media yang hadir memberitakan apa yang perusahaan sampaikan, maka perusahaan dapat dikatakan berhasil 100 persen.	
--	--	--	--	---	---	--

				dinilai telah berjalan sesuai dengan target perencanaan yang ditujukan dengan terpenuhinya target produksi <i>press release</i> .		
Persamaan	Menggunakan metode deskriptif	Menggunakan metode deskriptif dan konsep humas pemerintah	Menggunakan konsep <i>public relations</i>	Menggunakan metode deskriptif dan konsep media relations	Menggunakan metode deskriptif dan	

					konsep media relations	
Perbedaan	Subjek dan objek penelitian	Subjek dan objek penelitian	Metode, subjek dan objek penelitian	Subjek dan objek penelitian	Subjek dan objek penelitian	

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sejenis

2.2 Landasan Konsep

2.2.1 Tinjauan Mengenai *Public relations*

Definisi menurut Frank Jefkins (2015: 10), *Public relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa *public relations* merupakan bentuk komunikasi yang direncanakan oleh suatu organisasi/ perusahaan, yang ditunjukkan kepada publik internal maupun eksternalnya. Komunikasi yang dilakukan tersebut demi mencapai tujuan-tujuan spesifik yang diharapkan oleh organisasi/ perusahaan. Meskipun bentuk komunikasi yang dilakukan oleh organisasi/ perusahaan memiliki tujuan spesifik, bentuk komunikasinya tetap berlandaskan pada saling pengertian. Hal ini berarti organisasi/ perusahaan tetap memperhatikan publiknya dalam melakukan semua bentuk komunikasinya.

Terdapat empat Fungsi *Public Relations* (Ruslan, 2005: 26-27) yaitu:

(1) sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi/ perusahaan yang diwakili dengan publiknya, (2) membina relationship, (3) peranan back up management, (4) good image maker.

Fungsi sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi/ perusahaan yang diwakili dengan publiknya, artinya disatu pihak melakukan fungsi komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi, dilain

pihak komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik (*public opinion*).

Fungsi membina *relationship* dapat diartikan yaitu membangun dan membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan publik eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (*mutual understanding*) dan saling memperoleh manfaat bersama (*mutually symbiosis*) antara organisasi/ perusahaan dan publiknya

Fungsi peranan *back up management* berarti yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi/ perusahaan. *Public Relations* membantu organisasi/ perusahaan dalam memberikan pertimbangan pada pengambilan keputusan organisasi/ perusahaan.

Fungsi membentuk *good imager maker*, artinya peranan *Public Relations* berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau perusahaannya. *Public Relations* melakukan berbagai bentuk komunikasi dalam upaya menciptakan citra baik bagi organisasi/ perusahaannya dihadapan publiknya.

Kegiatan *Public relations*

Public relations membagi publik organisasi menjadi publik internal dan publik eksternal. Berdasarkan pembagian publik seperti itu, maka kegiatan yang dijalankan oleh organisasi pun dapat dikategorikan menjadi

internal relations atau internal *public relations* dan external relations atau external *public relations*.

Publik internal adalah publik yang berada di dalam lingkungan organisasi sedangkan publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi. Menurut Iriantara (2011: 26) berdasarkan pengelompokan publik tersebut, maka dibangun dan dikembangkan relasi dengan publik dalam kegiatan-kegiatan *employee relations*, *stockholder relations*, *customer relations*, *community relations*, *government relations* dan *press/media relations*. Jenis-jenis publik yang dilayani dalam kegiatan *public relations* tersebut juga menunjukkan ruang lingkup tugas *public relations* dalam mengembangkan, membina dan meningkatkan relasi dengan kelompok-kelompok publik tersebut.

2.2.2 Tinjauan Mengenai *Media relations*

Pendekatan yang biasanya digunakan organisasi dalam menjaga citra positifnya adalah dengan menetapkan kegiatan *media relations*. Lesley (dalam Iriantara, 2011: 29) menjelaskan *media relations* sebagai suatu hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Sementara itu, menurut Frank Jefkins (2015: 113) "*press relations* adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya."

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa *media relations* memiliki peran untuk menyiarkan atau mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR untuk menciptakan pengetahuan kepada publiknya. Melalui *media relations*, PR mempublikasikan informasi yang dimilikinya kepada para publiknya. *Media relations* menjadi sarana komunikasi antara organisasi/ perusahaan dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi. *Media relations* juga berperan untuk memberi pengertian bagi para publiknya tentang organisasi atau program kerja organisasi tersebut. *Media relations* ini dapat digunakan sebagai salah satu cara PR agar publik dapat mengenal lebih dalam tentang organisasi/ perusahaan dengan pemberian informasi melalui media massa.

Pentingnya *media relations* bagi sebuah organisasi tidak terlepas dari “kekuatan” media massa yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan kepada banyak khalayak, namun lebih dari itu, media sebagaimana konsep dasar yang diusungnya memiliki fungsi mendidik, memengaruhi, mengawasi, menginformasikan, dan menghibur. Dari sinilah media memiliki potensi strategis untuk memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar organisasi. Oleh karena itu, organisasi/ perusahaan perlu untuk melakukan hubungan baik dengan media massa, selain juga karena media merupakan salah satu stakeholder organisasi/ perusahaan.

Instansi yang menggunakan *media relations* umumnya merupakan instansi yang sangat membutuhkan bantuan media massa untuk publisitas instansinya.

Menurut Rachmadi tujuan *media relations* bagi perusahaan/ organisasi antara lain sebagai berikut: (1) Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah perusahaan/organisasi yang baik untuk diketahui umum, (2) Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan perusahaan/ organisasi), (3) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan perusahaan/organisasi, (4) Untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan perusahaan/organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian (*assessment*) secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan organisasi/ perusahaan, (5) Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati. (Wardhani, 2013: 12-13)

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa tujuan *media relations* bagi organisasi/ perusahaan adalah untuk mendapatkan publisitas seluas mungkin tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan maupun pencapaian baik yang diterima oleh organisasi/ perusahaan dalam berbagai tempat dalam pemberitaan media. Selain itu, melalui *media relations*, organisasi mengharapkan adanya *feedback* dari masyarakat mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat setelah diketahui melalui media seperti adanya komentar baik terhadap organisasi/ perusahaan melalui kolom surat pembaca. Dengan berbagai hal yang dilakukan melalui media tersebut, tentunya juga dapat membantu melengkapi data/ informasi bagi pimpinan perusahaan/ organisasi dalam membuat penilaian secara tepat mengenai situasi atau permasalahan yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan organisasi/ perusahaan karena media memiliki potensi strategis untuk

memberi pengertian, membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat, dan perilaku sebagaimana tujuan yang hendak disasar organisasi. Dengan demikian, *media relations* sebagai salah satu hubungan yang penting bagi organisasi/ perusahaan, perlu untuk diwujudkan dalam hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan menghormati.

Aktivitas untuk menjalin hubungan baik dengan pers dapat dilakukan dengan mengirimkan siaran pers perusahaan ke media, menyelenggarakan konferensi pers, memformulasikan isu penting di organisasi yang menarik untuk media, menyelenggarakan ramah tamah dengan media, menyelenggarakan kunjungan lapangan untuk pers, menyelenggarakan acara-acara khusus, wawancara khusus, menyediakan/menjadi narasumber media, dan monitoring pemberitaan media.

Strategi *Media relations*

Menurut Yosol Iriantara dalam bukunya *media relations* konsep, pendekatan, dan praktik (2011: 77-97) memaparkan bahwa strategi *media relations* terdiri dari mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan.

1. Mengelola relasi

Mengelola relasi yang baik dengan media menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan humas, hal ini tentunya dimaksudkan agar

organisasi bisa berkomunikasi dengan publiknya. Dalam mengelola relasi media, humas bukan hanya menjalin hubungan baik dengan institusi media massa saja, melainkan juga dengan para wartawan. Mengelola relasi dengan media massa bisa dibangun melalui dua bentuk relasi, yakni relasi tugas dan relasi pribadi.

Pihak organisasi yang membangun relasi tersebut, membentuk tim media yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalin relasi yang harmonis, baik secara institusional dengan media maupun secara individual dengan wartawan, melalui komunikasi yang cukup intens di antara kedua belah pihak (humas dan media/wartawan) yang berkenaan dengan tugas pokok masing-masing. Tim media ini merupakan bagian dari divisi atau bagian humas, yang pada umumnya memiliki prosedur standar operasi atau prosedur tetap dalam menyampaikan informasi dari organisasi pada publiknya.

Dengan mengingat *media relations* itu dilakukan untuk membangun komunikasi dan relasi dengan publik organisasi, maka prioritas membangun relasi itu dilakukan dengan media yang secara potensial terpaannya dapat mengenai publik-publik organisasi. Karena itulah diperlukan daftar media cetak dan elektronik yang segmentasi khalayaknya sama atau sebagian besar merupakan publik-publik organisasi tersebut.

Pada kegiatan *media relations* pun, organisasi perlu membuat daftar kontak yang diberikan kepada media massa dan wartawan, yang akan memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan organisasi.

2. Mengembangkan strategi

Setelah relasi dengan media terjalin dan terpelihara dengan baik, maka prasyarat untuk melaksanakan strategi *media relations* organisasi sudah tersedia. Strategi *media relations* merupakan sekumpulan kebijakan dan taktik yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan *media relations* khususnya dan PR umumnya, yang diacukan pada tujuan organisasi.

Mengembangkan strategi dilakukan untuk lebih memaksimalkan strategi-strategi yang sudah ada. Beberapa upaya pengembangan strategi dengan cara mengembangkan materi-materi PR untuk media massa, menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan kepada publik, membangun dan memelihara kontak dengan relasi baru, memosisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media massa, memosisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara di berbagai kegiatan, serta selalu berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam organisasi sehingga selalu mendapatkan informasi mutakhir.

Dalam mengembangkan strategi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama-tama, memperhatikan kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki sumber daya organisasi. Lalu, memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi. Setelah itu, mulai memperhatikan prinsip yang berkenaan dengan *media relations*.

Dalam dunia *media relations* dikenal ada prinsip-prinsip yang kemudian sering menjadi acuan dalam menyusun taktik *media relations*. Prinsip tersebut dinamakan Lima Prinsip Dasar yang menjadi pedoman dalam berhubungan dengan media massa, yakni:

- a. Memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa
- b. Jangan pernah berbohong – bicara benar atau diam
- c. Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (*rapport*) dengan media
- d. Menjadi narasumber yang berharga
- e. Jangan membuka pertengkaran yang tak perlu

3. Mengembangkan jaringan

Mengembangkan jaringan merupakan aspek pokok dalam *media relations* organisasi. Membuka dan memperluas jaringan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa. Salah satu kunci untuk membuka pintu jaringan relasi tersebut adalah dengan menjalin relasi melalui organisasi profesi. Tidak terbatas pada profesi kehumasan namun juga organisasi profesi media massa atau organisasi profesi lain.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu pemetaan dari pola pikir peneliti terhadap topik yang akan dibahas dalam penelitiannya. Dalam hal ini peneliti memiliki kerangka pemikiran yang diawali oleh permasalahan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan terkait dengan strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Kemudian, permasalahan tersebut yang membuat peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri. Penelitian ini akan memaparkan terkait dengan bentuk-bentuk dari strategi *media relations* yang perlu dijalankan oleh lembaga/ organisasi agar dapat memberikan hasil *media relations* yang maksimal.

Hal-hal yang memaparkan strategi *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini diwujudkan dalam pertanyaan penelitian yang terdiri dari: (1) Bagaimana Kementerian Luar Negeri mengelola relasi pada strategi *media relations* di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.? (2) Bagaimana Kementerian Luar Negeri mengembangkan strategi pada strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.? (3) Bagaimana Kementerian Luar Negeri mengembangkan jaringan pada strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dan dibahas dengan

berpedoman kepada konsep yang melekat yakni strategi *media relations* menurut DR. Yosol Iriantara.

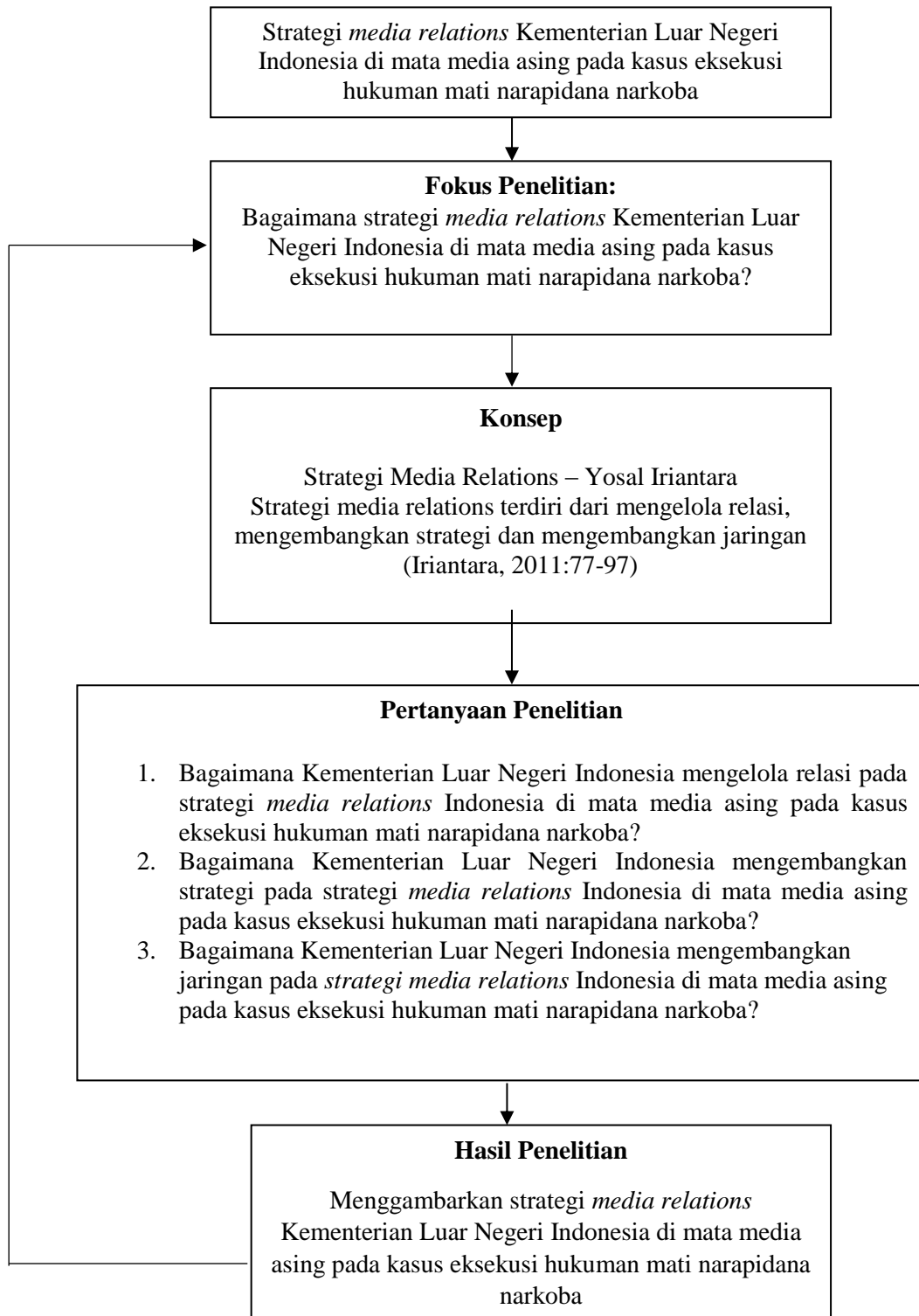
Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik. Paradigma positivistik sendiri merupakan paradigma yang identik dengan pola pikir deduktif. Menurut Bungin, sebenarnya model umum teorisasi deduktif masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif hingga sekarang dan teorisasi tersebut masih banyak digunakan hingga kini. Pola pikir deduktif sendiri identik dengan pola pikir umum-khusus, dimana teori atau konsep menjadi acuan sebuah penelitian dalam melakukan analisis. Penelitian yang dilakukan peneliti akan mengacu pada konsep strategi *media relations*.

Masih menurut Bungin, bahwa pada penelitian teori atau konsep digunakan sebagai awal untuk menjawab pertanyaan penelitian, bahwa sesungguhnya pola pikir deduktif menuntut peneliti dengan terlebih dahulu menggunakan teori atau konsep sebagai alat, ukuran, atau instrumen untuk membangun pertanyaan penelitian sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori atau konsep tersebut sebagai “kacamata kuda” dalam melihat masalah penelitian (Bungin, 2010: 26).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penyajian data kualitatif. Peneliti menggunakan metode deskriptif karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan akan menggambarkan berdasarkan fakta-fakta mengenai bagaimana strategi *media relations* yang dilakukan oleh

Kementerian Luar Negeri kepada media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.

Peneliti membuat sebuah model kerangka pemikiran untuk mempermudah menggambarkan penelitian dengan judul “Strategi *Media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia”. Penulis berharap dengan adanya model kerangka pemikiran ini dapat mempermudah pembaca mengerti dan memahami penelitian ini.



Sumber : Modifikasi Penulis

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

SUBJEK, OBJEK, DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Direktorat Informasi dan Media serta Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri.

Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Direktorat Informasi dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual, dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Biro Administrasi Menteri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri. Kepala BAM merangkap sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Biro Administrasi Menteri terdiri dari beberapa bagian, salah satunya bagian informasi dan media massa yang menangani media massa nasional dan media massa asing.

Bagian Informasi dan Media Massa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa. Bagian Informasi dan Media Massa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis dalam hal penerjemahan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberian informasi kepada media massa;
- c. pemberian dukungan substantif dan administratif kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri; dan
- d. penyiapan penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pemantauan berita cetak dan elektronik.

Direktorat Informasi dan Media serta Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri Kementerian Luar Negeri berperan sangat penting bagi media relations Kementerian Luar Negeri karena merupakan pihak yang terlibat langsung pada strategi media relations Kementerian Luar Negeri. Adapun beberapa narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- a. Nama : Titania Arimbi

Jabatan: Kasi (Kepala Seksi) Akreditasi Media Asing, Direktorat
Informasi dan Media

- b. Nama : Raksa Ibrahim

Jabatan: Kasi (Kepala Seksi) Liputan Media, Direktorat Informasi dan
Media

- c. Nama : Andi Syamsurijal Usman
Jabatan: Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media
- d. Nama : Listiana Operananta
Jabatan: Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri
- e. Nama : Arrmanatha Nasir
Jabatan: Kepala Biro Administrasi Menteri/ Juru Bicara Kementerian Luar Negeri
- f. Nama : Rissa Ambarizky
Jabatan: Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media
- g. Nama : Achmad Ramadhan
Jabatan: Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media

3.2 Objek Penelitian

3.2.1 Kementerian Luar Negeri

3.2.1.1 Sejarah Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri atau kerap disingkat Kemlu (bahasa Inggris: *Ministry of Foreign Affairs*) adalah kementerian Indonesia berkedudukan di Ibu kota negara Indonesia, merupakan salah satu dari tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara nomenklatur dalam UUD 1945. Kementerian ini tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden dan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan

luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2010)

Pada tanggal 19 Agustus 1945 setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 kemudian dibentuk Kementrian Luar Negeri (kementerian dahulu dieja dan disebut "kementrian") dalam Kabinet Presidensial merupakan kabinet yang pertama setelah proklamasi negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dalam perkembangan pernah disebut sebagai "departemen", kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 penamaannya kembali menjadi "Kementerian Luar Negeri".

Pada tahun 1945 sampai tahun 1950, Kementerian Luar Negeri merupakan tahun awal kemerdekaan Indonesia merupakan masa yang menentukan dalam perjuangan dalam penegakan kemerdekaan yang merupakan bagian sejarah yang menentukan karakter atau watak politik luar negeri Indonesia.

Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas negara-negara di segala bidang dan dengan berbagai macam upaya memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia

Melakukan perundingan dan membuat persetujuan :

- Persetujuan Linggarjati yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Madura

- Perjanjian Renville pada tahun 1948 yang menghasilkan pengakuan atas Republik Indonesia meliputi Jawa dan Sumatera
- Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang menghasilkan Indonesia dalam bentuk negara federal berbentuk RIS kemudian dengan Semangat Diplomasi Perjuangan yang memungkinkan Indonesia pada akhirnya meraih dukungan luas masyarakat internasional terutama dalam organisasi PBB dengan demikian Indonesia berhasil melakukan diplomasi untuk mengembalikan keutuhan wilayah Indonesia dengan membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1950

Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 hingga tahun 1988 berhasil melakukan intergrasi Irian Barat ke dalam pangkuan ibu pertiwi, Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara kepulauan dalam memperjuangkan hukum laut dalam United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS), meningkatkan Kerjasama ASEAN, mencari Pengakuan internasional thd Timtim akan tetapi berakhir dengan referendum, Ketua Gerakan Non Blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, Ketua APEC dan Group of 15,keanggotaan Indonesia dalam Peace Building Commission (PBC) dan meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi dengan negara The Group of Twenty (G-20).

3.2.1.2 Visi Misi Kementerian Luar Negeri

Visi Kementerian Luar Negeri

Guna mewujudkan Visi Pembangunan Tahun 2015—2019 “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, dan guna mewujudkan Misi ke-3 “Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim”, Agenda Pembangunan Nasional, maka ditetapkanlah pernyataan Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

“Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diri Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat”

Misi Kementerian Luar Negeri

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 3 (tiga) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi dan Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019, sebagai berikut:

1. Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional
2. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional

3. Mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang mumpuni

3.2.1.3 Profil Kementerian Luar Negeri



Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2014

Gambar 3.1 Logo Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri, disingkat Kemlu, (dahulu Departemen Luar Negeri) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri. Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Luar Negeri (Menlu) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Retno Marsudi dan Wakil Menteri yang dijabat oleh Abdurrahman Mohammad Fachir yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sejak 27 Oktober 2014 bersamaan dengan pelantikan menteri Kabinet Kerja. Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Luar Negeri

tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Luar Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Tabel 3.1 Profil Singkat Kementerian Luar Negeri

Alamat	Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia
Telepon	(+62 21) 344 1508
Email	kontak-kami@kemlu.go.id
Website	www.kemlu.go.id
Media Sosial	Twitter : @Portal_Kemlu_RI Facebook : Kemlu.RI

Sumber : Modifikasi Penulis

3.2.1.4 Struktur Organisasi Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam memimpin Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri dibantu oleh Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan intern di Kementerian Luar Negeri, tanggung jawab berada pada Inspektorat Jenderal yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Di Kementerian Luar Negeri, terdapat tujuh satuan kerja, yaitu:

1. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika
2. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa
3. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
4. Direktorat Jenderal Multilateral
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik
6. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Juga terdapat empat staf ahli, yaitu:

1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
4. Staf Ahli Bidang Manajemen

Di Kementerian Luar Negeri juga terdapat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri. Lalu, juga hadir Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. Tidak ketinggalan, Pusat Komunikasi hadir dengan tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

3.3 Metodologi Penelitian

3.3.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan strategi *media relations* kementerian luar negeri di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. dimana strategi *media relations* tersebut diturunkan dari konsep strategi *media relations* menurut Yosol Iriantara yang terdiri dari mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan.

Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik karena penelitian ini menggunakan konsep strategi

media relations menurut Yosol Iriantara sebagai pertanyaan penelitian untuk menjawab masalah dari penelitian.

Paradigma positivistik merupakan paradigma yang identik dengan pola pikir deduktif. Teorisasi deduktif masih seringkali diidentikan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin (2010: 26), sebenarnya model umum teorisasi deduktif masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif hingga sekarang dan teorisasi tersebut masih banyak digunakan hingga kini. Pola pikir deduktif sendiri identik dengan pola pikir umum-khusus, dimana teori atau konsep menjadi acuan sebuah penelitian dalam melakukan analisis.

Masih menurut Bungin, bahwa pada penelitian teori atau konsep digunakan sebagai awal untuk menjawab pertanyaan penelitian, bahwa sesungguhnya pola pikir deduktif menuntut peneliti dengan terlebih dahulu menggunakan teori atau konsep sebagai alat, ukuran, atau instrument untuk membangun pertanyaan penelitian sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori atau konsep tersebut sebagai “kacamata kuda” dalam melihat masalah penelitian (Bungin, 2010: 26).

Penelitian ini menggambarkan strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing secara fakta dan sistematis. Peneliti mengamati secara objektif untuk mengetahui bagaimana Kementerian Luar Negeri merumuskan strategi dalam mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan pada kegiatan

media relations sehingga *media relations* yang dilakukan akan memperbaiki citra Indonesia.

Asumsi dualis dan objektivis yang terdapat pada Positivistik memungkinkan peneliti untuk menentukan “bagaimana keadaan sesuatu itu yang sesungguhnya” dan “bagaimana cara kerja segala segala sesuatu itu sesungguhnya”. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan positivistik umumnya lebih melihat proses daripada produk obyek penelitiannya (Muhadjir, 2000: 43)

3.3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penyajian data kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

Peneliti menggunakan metode deksriptif karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan akan menggambarkan berdasarkan fakta secara sistematis mengenai bagaimana Kementerian Luar Negeri melakukan strategi *media relations* Indonesia di mata media asing sehingga citra negatif Indonesia sebagai salah satu negara yang melanggar HAM di mata media asing menjadi lebih positif.

Menurut Nazir (2011: 54) pengertian dari metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia, suatu objek, suatu

set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Metode ini mencari fakta dengan interpretasi yang tepat termasuk kegiatan-kegiatan, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dari suatu fenomena.

Perspektif yang digunakan atau waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan informan. Dalam mengumpulkan data, peneliti kerap menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) (Nazir, 2011: 55).

Sementara itu, Menurut Jalaluddin Rakhmat (2009: 24-25) penelitian deskriptif adalah memaparkan situasi atau peristiwa. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan bertindak sebagai pengamat.

Adapun penelitian deskriptif dilakukan untuk berbagai macam tujuan, diantaranya (Rakhmat, 2009: 25):

- (1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada,
- (2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
- (3) Membuat perbandingan atau evaluasi terhadap suatu program atau fenomena tertentu,
- (4) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka

untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Jadi, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat lukisan atau deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, serta meluas namun tidak mendalam seperti studi kasus.

3.3.3 Teknik Penentuan Key Informant

Penelitian deskriptif-kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian deskriptif-kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi dan sampel. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian berperan penting untuk mendapatkan jawaban pengalaman dan pendapat tentang sesuatu yang ditayangkan.

Menurut Sugiyono (2014: 216), pada penelitian kualitatif memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Menurut Sugiyono (2014: 221) menyatakan bahwa pemilihan informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

(1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu ide bukan sekedar diketahui, tetapi

juga dihayati, (2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti, (3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi, (4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri, (5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih tertantang untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Maka yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif adalah “tuntasnya” peroleh informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyaknya sampel sumber data. Kriteria informan yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut:

1. Telah bekerja di Kementerian Luar Negeri selama lebih dari 1 tahun lamanya
2. Memahami secara keseluruhan mengenai strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri
3. Memahami pelaksanaan kegiatan *media relations* Kementerian Luar Negeri
4. Terlibat langsung pada kegiatan *media relations* Kementerian Luar Negeri
5. Mengelola kegiatan *media relations* Kementerian Luar Negeri

Peneliti memilih tujuh orang yang mempunyai andil dalam *media relations* yang akan dijadikan sebagai *key informant* dari penelitian ini, yaitu:

- a) Nama : Titania Arimbi
Jabatan: Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media
- b) Nama : Raksa Ibrahim
Jabatan: Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media
- c) Nama : Andi Syamsurijal Usman
Jabatan: Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media
- d) Nama : Listiana Operananta
Jabatan: Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri
- e) Nama : Arrmanatha Nasir
Jabatan: Kepala Biro Administrasi Menteri/ Juru Bicara Kementerian Luar
Negeri
- f) Nama : Rissa Ambarizky
Jabatan: Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan
Media
- g) Nama : Achmad Ramadhan
Jabatan: Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media

3.3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pengumpulan data ini dibutuhkan dan digunakan untuk membantu mencapai tujuan penelitian.

Adapun teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014: 232) mengemukakan bahwa dengan melakukan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi.

Peneliti akan melakukan wawancara terstruktur pada penelitian ini. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

2. Observasi Partisipatif

Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014:227) menyatakan “dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka”.

Susan Stainback membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu *passive participation*, *moderate participation*, *active participation*, dan *complete participation*.

Pada penelitian ini, peneliti menjalankan observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif berarti peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan melakukan observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan memperoleh pandangan yang menyeluruh.

3. Analisis Dokumen

Pada dokumen, Bogdan (dalam Sugiyono, 2014:240) menyatakan bahwa studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Kegiatan analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti mengambil studi kepustakaan dari referensi buku, media cetak dan media online sebagai rujukan dan asumsi yang berkaitan dengan penelitian dan menunjang penelitian ini.

Analisis dokumen berarti menggali referensi yang berhubungan dengan penelitian. Referensi dapat berupa kliping, artikel, berita di media massa dan sebagainya. Penggunaan dokumen adalah untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lainnya.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen seperti peraturan dan kebijakan Kementerian Luar Negeri, khususnya yang berkorelasi dengan Direktorat Informasi dan Media dan Biro Administrasi Menteri. Peneliti juga akan menganalisis dokumen-dokumen maupun literature terkait strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.

3.3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2006: 103). Tujuan analisis data pada dasarnya antara lain untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikan dalam suatu susunan yang sistematis kemudian mengolah dan menafsirkan. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Peneliti berpatokan pada pendapat Miles & Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014:246-253), yang membagi langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Memilah-milah data yang tidak beraturan menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan mengelompokkan hal-hal yang penting dalam bentuk laporan rinci. Kemudian laporan itu direduksi, dirangkum, dan dirinci pola dan susunannya. Peneliti merangkum data dari hasil observasi dan wawancara dengan staff Kementerian Luar Negeri. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi peneliti akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan. Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapainya.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Peneliti melakukan penyajian data dengan membuat uraian singkat mengenai Strategi *Media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing dan membuat bagan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan men-*display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Data Verification* (Verifikasi Data)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas yang telah berkumpul. Teknik ini dilakukan apabila masih ada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan kepada *key informant* yang masih belum jelas atau belum terjawab dengan cara peninjauan ulang ke pihak terkait. Verifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara menemui *key informant* dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Langkah yang terakhir dari teknik analisis ini adalah *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Peneliti merangkum data yang telah didapat mengenai Strategi *Media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (verifikasi). Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan.

3.3.6 Validitas dan Keabsahan Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data, sebagai berikut:

Triangulasi

Salah satu cara paling penting dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Dengan mengacu kepada Denzin (dalam Bungin, 2010: 256) maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, dan teori.

Triangulasi dengan Sumber Data / Informan

Menurut Moleong dan Bardiansyah (dalam Bungin, 2010: 256-257) teknik Triangulasi dengan sumber data ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam melakukan kualitatif yang dilakukan dengan:

(1) Membandingkan data hasil pengamatan wawancara (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. (4) Membandingkan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadi perbedaan.

Peneliti dapat melakukan *crosscheck* (menanyakan kembali pertanyaan yang sama kepada orang yang berbeda) atau juga melakukan *recheck* (menanyakan kembali kepada informasi yang sama dengan

pertanyaan yang sama namun dengan waktu yang berbeda, sehingga nantinya data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dianalisis dengan baik. Peneliti melakukan *crosscheck* kepada pihak lain dengan membandingkan data hasil pengamatan wawancara serta membandingkan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, peneliti melakukan *crosscheck* kepada Aria Nurfikry sebagai Communication & PR Specialist dari Mediatrac yang sebelumnya telah lama menjadi PR Consultant dan praktisi.

3.3.7 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipasi pasif dan analisis dokumen ini berlokasi di Kementerian Luar Negeri yang beralamat di Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat. Tempat tersebut adalah dimana *key informant* bekerja. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Maret – Agustus 2016.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (2016)					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal	V					
2	Diskusi Proposal	V	V				
3	Sidang Usulan Masalah			V			
4	Revisi Bab I-III			V			
5	Melakukan Penelitian di lapangan				V	V	
6	Uji Keabsahan Data					V	V
7	Membuat <i>Draft</i> Laporan Penelitian				V	V	V
8	Diskusi <i>Draft</i> Laporan Penelitian				V	V	V
9	Penyempurnaan Laporan					V	V
10	Sidang						V

Sumber : Modifikasi Penulis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian beserta pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan temuan di lapangan dengan para informan yang terdiri dari pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, yang keseluruhannya telah memenuhi kriteria yang dibuat oleh peneliti selama penelitian di lapangan, termasuk tahap wawancara, tahap observasi, dan analisis terhadap dokumen yang ditemukan.

Peneliti mendapatkan data mengenai strategi *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dari tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informan yang sudah ditentukan sebelumnya dan dianggap paling menguasai tentang strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Oleh karena itu peneliti mendapatkan informan yang dipilih untuk mengungkapkan proses yang terjadi seputar kegiatan yang dilakukan mulai mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengembangkan jaringan. Para informan tersebut dipilih untuk menjawab pertanyaan peneliti seputar strategi *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri

Indonesia. Informan tersebut adalah Titania Arimbi sebagai Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media; Raksa Ibrahim sebagai Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media; Andi Syamsurijal Usman sebagai Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media; Listiana Operananta sebagai Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri; Arrmanatha Nasir sebagai Kepala Biro Administrasi Menteri/ Juru Bicara Kementerian Luar Negeri; Rissa Ambarizky sebagai Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media; serta Achmad Ramadhan sebagai Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Luar Negeri yang beralamat di Jl. Pejambon No.6, Jakarta Pusat. Tempat tersebut adalah dimana *key informant* biasa berkumpul dan bekerja. Peneliti berupaya untuk mengolektifkan berbagai data seperti dokumen yang didapatkan di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban berupa simpulan dan saran-saran dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya.

Peneliti berhasil menghimpun data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti mendapatkan akses menuju narasumber karena sebelumnya peneliti merupakan seorang *intern* dari Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, sehingga peneliti mengetahui dan mengamati hal yang terjadi di lapangan yang selanjutnya disebut data observasi. Dimulai dengan merumuskan permasalahan yang ditemukan di lapangan, selanjutnya peneliti mengajukan proposal peneliti sehingga memilih informan tersebut untuk menunjang penelitian ini, untuk kemudian peneliti melakukan wawancara. Setelah

hasil wawancara diperoleh, peneliti menganalisis datanya dan mengumpulkan studi dokumen yang peneliti jadikan penunjang untuk melengkapi penelitian ini.

Strategi Media Relations yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media, sebagai divisi yang menjalankan tugas dan fungsi *public relations* dalam organisasi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab lebih mengenai strategi media relations. Walaupun pada pelaksanaannya, Direktorat Informasi dan Media dibantu dan berkoordinasi langsung dengan Biro Administrasi Menteri. Direktorat Informasi dan Media memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media.

Penelitian ini secara garis besar mengungkapkan strategi media relations Kementerian Luar Negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, disesuaikan dengan strategi media relations yang dikemukakan oleh Yosol Iriantara (2011). Yang perlu diperhatikan pada strategi media relations ada tiga, yaitu mengelola relasi, mengembangkan strategi dan mengelola jaringan.

4.1 Mengelola Relasi pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

4.1.1 Hasil Penelitian

Ketika menjalankan strategi *media relations*, hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengelola relasi dengan media massa. Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu bagian dari pemerintah Indonesia memahami pentingnya mengelola relasi dengan media massa, baik dengan media massa nasional maupun media massa asing.

“...Kita juga menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya melalui media massa. Berhubungan atau berelasi dengan media merupakan salah satu hal penting.”¹⁶

Dengan melihat pentingnya mengelola relasi dengan media massa serta penyampaian informasi kepada publik, *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh dua satuan kerja atau unit kerja, yaitu Direktorat Informasi dan Media serta Biro Administrasi Menteri. Dua satuan kerja ini saling bekerja secara berkesinambungan dan saling berkaitan dalam menjalankan hubungan media, namun tetap memiliki porsi kerja masing-masing.

Direktorat Informasi dan Media berfungsi untuk maintenance *media relations*. Direktorat Informasi dan Media bertugas untuk menghubungi media, berkomunikasi dengan media, memfasilitasi media. Lalu BAM berfungsi untuk mengolah isi informasi yang akan disampaikan kepada media. BAM bertugas untuk

¹⁶ Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

menyusun isi siaran pers yang akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri menunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara. Kepala BAM merupakan juru bicara Kementerian Luar Negeri, yaitu Arrmanatha Natsir. Hal ini dilakukan agar penyampaian informasi berupa lisan dapat disampaikan secara lebih baik. Kementerian Luar Negeri berusaha untuk menghindari adanya kesalahan penyampaian informasi yang akan diterima oleh media massa dan publik. Segala pernyataan yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Natsir.

“BAM dan Infomed bekerja secara berkesinambungan. *On the daily basis*, Infomed dalam hal ini fasmed (fasilitas media) yang mengurus tentang kebutuhan media atau jurnalis. Teman-teman jurnalis kalau ada apa-apa, akan menghubungi infomed. Tetapi kalau mereka mencari berita, mereka akan ke Pak Tata sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri daripada ke Ibu Sofie sebagai Direktur Infomed. Pak Tata ini juga merupakan Kepala Biro Administrasi Menteri.”¹⁷

Biro Administrasi Menteri sendiri memiliki beberapa sub bagian, diantaranya bagian informasi dan media massa. Bagian informasi dan media massa ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Biro Administrasi Menteri di bidang penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa. Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim menjelaskan bahwa pada BAM terdapat sub bagian bernama informasi dan media massa, yang mengurus komunikasi menteri, yang pekerjaannya bersinggungan dengan Direktorat Informasi dan Media.¹⁸ Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan

¹⁷ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

¹⁸ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Media Raksa Ibrahim menegaskan bahwa Direktorat Informasi dan Media berkaitan dengan kebutuhan Kementerian Luar Negeri, tidak hanya kebutuhan Menteri Luar Negeri.

“Sub bagian Infomed yang ada di BAM secara perinci mengurus konten dan kebutuhan menlu. Jadi sebenarnya khusus untuk menlu. Sementara Direktorat Informasi dan Media ini memiliki renstra sendiri dan kita berkaitan dengan kebutuhan Kemlu.”¹⁹

Hal ini juga semakin diperjelas oleh pernyataan dari Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri (BAM), Listiana Operananta, menurutnya,

“Di infomed itu lebih untuk Kemlu. Jadi yang menjadi *stakeholder*-nya adalah seluruh bagian dari kementerian ini. Di Kemlu ini akan ada banyak direktorat. Itu semua menjadi tanggung jawabnya Direktorat Infomed untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang perlu disampaikan kepada publik, apapun bentuk informasinya, baik itu dalam bentuk berita, dalam bentuk *press release*, twitter, facebook, itu semua tugasnya Infomed. Kalau di BAM, kami menyampaikan apa yang ibu menteri, bapak wakil menteri luar negeri, pak juru bicara. Jadi fokus saya hanya kepada ketiga orang yang menjadi atasan saya sementara ini. Memang karena bagaimanapun ketiga orang ini merupakan narasumber utama Kemlu, akhirnya apa yang kami lakukan itu mencakup juga Kementerian Luar Negeri secara umum.”²⁰

BAM mengurus berbagai kebutuhan menlu baik secara substansial maupun non-substansial, termasuk bahan informasi untuk pernyataan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri serta Juru Bicara Kementerian Luar Negeri.

“Kita memiliki dokumen yang namanya dokumen antisipasi media. Itu yang dibawa-bawa Pak Tata sebagai juru bicara seperti saat *press briefing* tadi. Sebelum beliau mulai *press briefing* kita siapkan. Biasanya antisipasi media itu datang dari perhatian berbagai media yang ada selama sebelum hari Kamis (*briefing* mingguan), kita lihat, kita cek, apa yang lagi menjadi perhatian media. Ada juga wartawan yang telepon ke kita, menanyakan A,B,C,D. ‘Ok, datang saja saat *press briefing*’ Pertanyaannya kita masukan

¹⁹ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

²⁰ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

juga ke dalam dokumen. Kita siapakan informasi terkait hal-hal tersebut. Kita berusaha siapakan sebaik mungkin. Tapi namanya juga dokumenantisipasi media, jadi yaa enggak pasti juga, ada yang *miss*, ada yang kita enggak tahu juga, ada yang kita tahu dan *detail* tahunya, ada yang kita tahu tapi enggak *detail*, belum banyak. Yaa macam-macam. Tidak pasti rangkumannya dapat semua.”²¹

Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri merupakan narasumber utama Kementerian Luar Negeri. Kepala BAM mendapat tugas tambahan sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri karena memiliki beberapa pertimbangan.

“Kepala Biro Administrasi Menteri (Kabam) ditunjuk atas perintah Menteri Luar Negeri sebagai juru bicara karena dianggap seorang Kabam tahu kegiatan menlu dari awal sampai akhir. Jadi saat pertemuan menlu dengan siapapun, seorang Kabam ikut biasanya. Sehingga dengan demikian, Kabam itu memiliki informasi *detail* sehubungan dengan diantaranya, terutama adalah agenda menteri luar negeri. Jadi semua yang dilakukan, semua yang disampaikan oleh menteri luar negeri, Kabam ini tahu, dengan demikian akan memudahkan apabila yang bersangkutan juga, dari segi koordinasi untuk menjadi juru bicara.”²²

Kepala Biro Administrasi Menteri sekaligus menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir memberikan penjelasan lebih lanjut.

“BAM mengurus segala hal yang berkaitan dengan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri dalam berbagai aspek, termasuk pidato. Semua bahan substansi ibu menteri luar negeri, itu kita yang olah, meskipun *draft* awal yang berisi substansi-substansi datang dari berbagai unit. Dengan demikian, dilihat dari kebutuhannya tersebut, agar menteri itu ada satu unit yang bisa mengurus beliau, sehingga beliau tidak harus ke tempat unit masing-masing. Dari situ, dirasakan untuk Kementerian Luar Negeri, perlunya ada seseorang yang menyampaikan kebijakan, pandang posisi menteri luar negeri dan kementerian luar negeri. Untuk bisa seperti itu, kan orang tersebut harus tahu apa yang dipikirkan oleh ibu menlu, apa keyakinannya seorang menteri, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan.

²¹ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

²² Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Oleh karena itu lah secara otomatis, Kepala Biro Administrasi Menteri yang mengurus masalah seperti itu, mengurus segala urusannya menteri, termasuk urusan-urusan diluar substansi dipandang yang paling cocok untuk menjadi juru bicara. Karena itu lah dibuat dalam biro administrasi sendiri unit kantor juru bicara, yang dipimpin oleh bu listy. Jadi kita yang menyampaikan semua ke media. Tapi kan sarana medianya yang mengatur adalah Direktorat Informasi dan Media. Hanya bahan substansinya, khususnya yang berhubungan dengan menlu berasal dari kita. Tetapi tetap saja untuk berbagai isu, yang menyampaikan kepada publik adalah jubir.”²³

Lebih lanjut Arrmanatha Nasir menjelaskan terkait tugas dan fungsinya sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

“Untuk berbagai isu, yang menyampaikan ke luar atau kepada publik adalah jubir. Tujuannya adalah agar suara dari kementerian luar negeri itu satu, enggak direktur A ngomong A, direktur B ngomong B. Nah, walaupun direktur lainnya bisa ngomong juga, tetapi biasanya mereka konsultasi kepada saya. Salah satu tugas saya sebagai juru bicara adalah untuk mengetahui apa yang ada di media, setiap hari, terkait dengan Kemlu dan politik luar negeri. Oleh karena itu, setiap hari, setiap pagi, orang pertama yang ketemu dengan menteri adalah saya. Biasanya saya sampaikan ‘Ibu menteri, hari ini di media ini, ini yang lagi banyak dibahas, kemungkinan saat ini, hal ini lah yang akan banyak muncul, yang akan banyak ditanyakan oleh media kepada ibu menteri maupun kepada saya. Disitu kita akan menyusun yang kita namakan *script*, apa yang akan kita sampaikan kepada media bila ditanya, untuk isu apapun juga. Kadang-kadang juga strategi kita adalah ibu menyampaikan A, saya menyampaikan B. Agar terlihat bahwa kalau saya menyampaikan B kan tingkat politisnya kan lebih rendah, itu juga kan beda-beda. Jadi kadang-kadang saya lebih *detail*, ibu lebih *policy*, atau kadang-kadang, saat kita lagi mencoba mengetes *policy*, saya menyampaikan, ibu enggak bicara. Kalau nanti diserang sama media, kan yang diserang itu saya bukan ibu. Jadi masih ada yang mengkoreksi. Jadi selalu gitu. Karena kalau sudah ibu yang bicara kan akan susah dikoreksi, yang bisa mengoreksi adalah presiden. Jadi kalau saya yang menyampaikan, lalu saya ada yang salah atau ada yang disampaikan tetapi kurang tepat, masih ada yang bisa mengkoreksi. Sebelum melakukan *press briefing* mingguan, saya selalu bertemu dengan ibu. Saya akan memberitahukan ‘ini bu yang saya akan sampaikan kepada media, kira-kira ini yang menjadi perhatian media, ada pesan?’ terus ibu kadang titip pesan, ‘tolong jangan sampai begini-begini-begini’. Setelah *press briefing*, saya laporkan ke beliau. ‘tadi *press briefing* ini yang menjadi perhatian media, ini yang saya

²³ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

jawab' Jadi kalau nanti ibu menlu ditanya oleh media hal yang sama, ibu tahu apa yang telah saya omongin."²⁴

Dengan demikian, sebagai Juru Bicara Kementerian Luar Negeri/ Kepala BAM serta bagian informasi dan media BAM ikut serta dalam mengelola relasi dengan media. Kedua pihak tersebut memiliki juga kontak dengan media meskipun tidak seintens yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media.

Selain hal tersebut, Kementerian Luar Negeri juga memiliki standar operasi lainnya dalam menyampaikan informasi dari organisasi kepada publiknya. Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan informasi harus berdasarkan sumber yang benar dan terpercaya. Menteri luar negeri atau juru bicara atau pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri juga harus mampu menjelaskan secara baik mengenai prinsip dan kebijakan Indonesia atas suatu isu, serta berusaha mengajak publik untuk mendukung pemerintah Indonesia. Kasi Akreditasi Media Asing, Titania Arimbi mengatakan bahwa untuk memastikan adanya ketepatan dalam pengutipan, SOP yang berlaku adalah hanya jibir atau menlu atau pejabat tinggi kemlu yang memiliki kewenangan untuk menangani isu tertentu.²⁵

Sebelum menyampaikan informasi kepada publik, Kementerian Luar Negeri selalu melakukan penyaringan atas informasi-informasi yang diterima melalui berbagai sumber. Kementerian Luar Negeri melalui Biro Administrasi Menteri dan Direktorat Informasi dan Media akan melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menentukan apa yang perlu disampaikan kepada publik, apa yang

²⁴ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

²⁵ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

tidak perlu disampaikan kepada publik. Isu yang berkembang menjadi suatu pertimbangan bagi Kementerian Luar Negeri dalam menentukan bentuk penyampaian informasi.

“Dalam penyampaian informasi ke publik ada jejak penyaringannya, apa yang perlu disampaikan kepada publik, apa yang tidak perlu disampaikan akan dibahas sebelum benar-benar di-*publish*. Kita akan melakukan penyaringan hingga tiga kali untuk memastikan informasi yang akan di-*publish* merupakan informasi yang benar. Jika ada isu, unit terkait berkoordinasi dengan BAM nanti BAM menyampaikan kepada Infomed, kita bantu untuk *finishing* dan mem-*publish*-nya. Strategi relasi dengan media itu infomed. Tapi kita kan bekerja beriringan. Jadi kita sama-sama merumuskan apakah isu ini kita ingin redam atau kita ingin *blow up*.”²⁶

Penyampaian informasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri tidak sama pada semua isu. Menurut kepala bagian informasi dan media BAM, Listiana Operananta, Kementerian Luar Negeri akan melihat dari substansi isu dalam menyampaikan informasi.²⁷ Misalkan isu terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia (PWNI), maka yang menjadi narasumber adalah direktur PWNI dan jubar Kementerian Luar Negeri. Untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia, sikap pemerintah Indonesia, dan pandangan Indonesia atau Kementerian Luar Negeri, akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, untuk hal teknis atau *detail*-nya akan disampaikan oleh Direktur PWNI.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan informasi memiliki standar operasi sebagai pedomannya. Pertama, menyampaikan *key*

²⁶ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

²⁷ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

message. *Key message* adalah *point* penting dalam pesan yang diberikan seperti posisi, kebijakan, pandangan Kementerian Luar Negeri. Lalu, menyampaikan fakta-fakta yang ada sesuai dengan data yang dimiliki. Juru bicara kementerian luar negeri menegaskan bahwa kita harus terlebih dahulu menyampaikan posisi kita, posisi kemlu, baru menjawab pertanyaan wartawan.²⁸ Lebih lanjut Arrmanatha Nasir menambahkan terkait tugas dan fungsi juru bicara.

“Karena tujuan saya disini bukan menjawab pertanyaan media, tetapi tugas saya adalah menyampaikan posisi dan pandangan Kementerian Luar Negeri. Seorang juru bicara itu bukan saja melayani wartawan dengan menjawab pertanyaannya tetapi juga menyampaikan posisi dan pandangan kementerian. Itu lah tujuannya. Kita harus menyampaikan posisi dan pandangan kita, dan tidak ikut konteks menjawab pertanyaannya saja.”²⁹

Arrmanatha Nasir menambahkan mengenai perannya sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

“Saya menerapkan contohnya, saya sebagai jubir, saya harus menghindari dari kesalahan tangkap orang bahwa itu adalah pandangan saya. Jadi saya sengaja hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan, posisi menlu, atau kementerian luar negeri. Oleh karena itu, langkah yang saya ambil adalah saya tidak akan pernah melakukan atau hadir di *talkshow*. Karena kalau kita di *talkshow*, segmennya panjang, itu ada satu kecenderungan dimana saya menyampaikan posisi yang di luar posisi kemlu atau posisi kemlu lebih *expended*. Itu kan bisa membahayakan posisi kemlu sehingga untuk hadir di *talkshow* seperti itu yang hadir adalah dirjen atau direkturnya langsung. Dengan demikian jika ada dirjen atau direktur yang menyampaikan posisi kemlu melebihi yang seharusnya, bisa saya koreksi. Saya hadir di *interview*, *press briefing*”³⁰

Kementerian Luar Negeri akan melakukan *treatment* yang berbeda pada pembuatan *press release* jika isu-isu yang beredar merupakan isu sensitif. Untuk informasi

²⁸ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

²⁹ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

³⁰ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

yang bersifat sensitif, unit terkait akan langsung berkoordinasi dengan Biro Administrasi Menteri untuk membuat *press release*. Setelah *press release* selesai dibuat, akan ditunjukkan kepada Menteri Luar Negeri langsung atau paling tidak kepada Wakil Menteri Luar Negeri untuk dicek. Setelah disetujui *press release* tersebut untuk terbit, lalu akan disampaikan kepada Direktur Informasi dan Media untuk dilihat atau dicek kembali, tujuannya adalah agar tidak ada kesalahan dalam penulisan kata-kata, angka, nama, gelar dan kata-kata atau kalimat Bahasa Inggris. Jika tidak ditemukan kesalahan akan langsung disebar kepada media melalui *e-mail* serta *di-posting* di portal Kementerian Luar Negeri. Namun jika ditemukan kesalahan atau keragu-raguan, *draft press release* tersebut akan dikembalikan kepada Biro Administrasi Menteri untuk dibenarkan atau diperbaiki. Jika sudah diperbaiki oleh Biro Administrasi Menteri, akan kembali di cek oleh Direktur Informasi dan Media. Apabila *draft* sudah benar, maka akan di sebar kepada media melalui *e-mail* serta *di-posting* di portal Kementerian Luar Negeri. Seluruh *press release* akan selalu *di-posting* di portal Kementerian Luar Negeri. Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Lisitiana Operananta menyatakan bahwa *press release* dikirim via *e-mail*, *mailing list* yang berisi *e-mail* seluruh wartawan yang ada di kontak kita, kita blasting di portalnya Kemlu dan dikutip, diambil bagian-bagian untuk dijadikan konten di twitter dan facebook. Itu dikerjakan oleh Direktorat Informasi dan Media.³¹

³¹ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Apabila informasi bersifat biasa, seperti perayaan HUT RI Ke-71 di KBRI Tokyo, maka *press release* akan dibuat oleh unit terkait. Lalu jika terdapat permintaan dari unit terkait untuk disebar, maka berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Informasi dan Media akan menyebarkan kepada media melalui *e-mail* serta *di-posting* di portal Kementerian Luar Negeri. Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Rissa Ambarizky menegaskan bahwa segala isu sensitif harus melalui persetujuan BAM sebelum *di-posting* di portal Kementerian Luar Negeri atau pun media sosial Kementerian Luar Negeri.

“Untuk berita-berita urgent dan penting, meskipun weekend, akan langsung kita upload beritanya di portal ataupun medsos. Jadi publik akan bisa langsung akses beritanya. Cuma untuk isu-isu sensitif dan khusus akan tetap tunggu acc dari BAM dulu. Kalau acc dengan BAM itu tentu it takes time. Tapi kan enggak seluruh isu sensitif yaa. Jadi yang kadang-kadang aja kaya gitu. Pokoknya isu-isu sensitif harus lewat BAM, sisanya yang bukan isu sensitif, semua menjadi kewenangan infomed semua. Intinya sih biasanya yang harus minta *acc* ke BAM, karena via jubar juga kan, itu isu-isu yang sensitif. *As long as* isu nya umum terus tidak menimbulkan pemahaman ganda di masyarakat, kita langsung.”³²

Pada penulisan *press release*, ada beberapa standar yang perlu diperhatikan. Kementerian Luar Negeri memiliki style sendiri untuk penulisan *press release*-nya. *Press release* umumnya berkisar antara 3 sampai 5 alinea. Pada alinea 1 berisi kutipan terkait isu yang menjadi judul *press release*, alinea 2 berisi informasi 5W + 1H (*What, When, Who, Why, Where* dan *How*), lalu alinea 3 sampai 5 berisi informasi tambahan yang merupakan fakta dan data terkait isu. Standar ini berlaku untuk seluruh *press release*, baik yang dibuat oleh unit maupun BAM. *Press*

³² Wawancara dengan Rissa Ambarizky, Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

release, umumnya akan diperiksa lagi oleh BAM untuk dilihat dan dikaji kembali perihal substansinya. Menurut Kepala BAM atau juru bicara Kementerian Luar Negeri, *draft* awal datang dari unit-unit terkait, tapi pada akhirnya kita yang mengolah, kadang-kadang kita bongkar total, kadang-kadang kita menyesuaikan, tergantung apa yang kita pandang, kita lihat apa yang diinginkan oleh ibu menlu.³³

Adapula *treatment* yang berbeda dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan informasi kepada publiknya terkait isu sensitif atau isu yang dianggap penting, seperti halnya kegiatan *press briefing*. Kegiatan *press briefing* Kementerian Luar Negeri selalu dilakukan dengan menjadikan juru bicara Kementerian Luar Negeri dan pejabat-pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri sebagai narasumber. Tetapi jika informasi yang akan disampaikan dianggap sangat penting, sangat besar dampaknya, Menteri Luar Negeri akan langsung sebagai narasumbernya. Kegiatan pemberian informasi kepada media dengan menjadikan Menteri Luar Negeri sebagai narasumber disebut *press statement*.

“Jika ada *press briefing*, maka akan disampaikan oleh Pak Tata. Tetapi jika hal tersebut dirasa penting sekali maka Ibu Menlu yang akan langsung berbicara. Kalau ibu menlu yang berbicara, maka namanya akan menjadi *press statement*. *Press statement* yaitu ibu menlu datang, memberikan *statement*, tanpa tanya jawab, ibu langsung keluar. Sedangkan, *press briefing* yaitu jubiir datang, memberikan *statement*, ada tanya jawab sekitar 2-3 pertanyaan, jubiir keluar. Perlu diketahui, Kemlu memiliki satu kebijakan yaitu bahwa seluruh *statement* yang mengatasnamakan kementerian luar negeri akan dikeluarkan oleh Pak Arrmanatha Natsir (Pak Tata). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir salah informasi.”³⁴

³³ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

³⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Dalam pelaksanaan *press statement*, bahan informasi yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, dibuat dan disusun oleh BAM. Bahan informasi ini disebut *script*. *Script* berbentuk kertas A5, sekitar 1 halaman atau 2 halaman berisi *point-point* penting informasi yang dibutuhkan Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada media. *Script* ini tidak dibagikan kepada media baik di *upload* di portal atau dibagikan dalam bentuk *hardcopy*, hanya dibacakan saat *press statement* oleh Menteri Luar Negeri.

“Beliau juga menyampaikannya juga enggak urut, terserah. Misalnya kita kasih taunya dari awal hingga akhir kan, tapi ada yang enggak dibacakan, yaa enggak masalah. Isi yang disampaikan juga enggak dibaca sampai titik koma itu juga enggak, pasti berubah bahasanya atau kalimatnya. Tapi informasinya ada disitu. Jadi sesuai Ibu mau menyampaikannya gimana.”³⁵

Kementerian Luar Negeri, nyatanya, tidak melakukan upaya perbedaan *treatment* atau perlakuan kepada media massa asing. Menurut Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi, mengatakan bahwa tidak ada perbedaan *treatment* antara media nasional dan media asing.³⁶ Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada media asing sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan media. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan, komunikasi yang dijalin dengan media asing sama dengan media nasional.

“Intinya sama. Kita menyampaikan posisi kita. Namun kalau dengan media asing, itu kan *angle* media-nya beda-beda. Kalau dengan media asing kita harus juga memperhatikan posisi Indonesia di kawasan atau di tingkat global. Ketertarikan mereka (media asing) juga beda-beda, yang bikin media

³⁵ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

³⁶ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

asing tertarik adalah isunya bukan cara penyampaiannya. Mereka tertarik dengan isu-isu seperti peran Indonesia di kawasan, demokrasi, HAM. Kalau dalam penyampaiannya, tetap saya harus menyampaikan posisi Indonesia, pandangan kita, baru menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau sebaliknya, malah menjadi tidak terlihat posisi kita. Karena pertanyaan tersebut sudah di-*guide*. Jadi kita harus terlebih dahulu selalu menyampaikan posisi kita, sehingga bisa merubah persepsi mereka.”³⁷

Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Informasi dan Media mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi maupun juga mengelola hubungan dengan para wartawan media asing. Mengelola relasi dengan media massa sebagai suatu institusi, diantaranya adalah pelayanan kunjungan jurnalistik wartawan asing di Indonesia, pembuatan kartu pers tetap, pelayanan penempatan koresponden tetap asing di Indonesia, pembuatan rekomendasi pembuatan/perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

“Jadi wartawan asing yang datang ke Indonesia, perlu perijinan untuk kerja di Indonesia, kita coba dukung, kita bantu dengan memberikan surat rekomendasi untuk ijin kerja dan tinggal di Indonesia. Jika mereka perlu dan membutuhkan, kita juga buat kartu press sebagai bagian dari pelayanan kita, semua syarat tersebut kita berikan secara cuma-cuma. Dengan kartu pers tersebut, menandakan bahwa mereka sudah diverifikasi oleh Kemlu dan menunjukkan bahwa mereka benar adalah wartawan asing serta meliput kegiatan-kegiatan di Kemlu. Kita juga memberikan pelayanan terpadu di gedung Kemlu dekat gedung konsuler, agar pelayanan makin terintegrasi dengan baik.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

³⁸ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim menambahkan bahwa kita terus berupaya untuk bisa menjawab kebutuhan media, beranjak dari kita yang membutuhkan mereka dan mereka pun juga membutuhkan kita.³⁹

Selain melayani hal prosedural tersebut, Kementerian Luar Negeri juga melayani kebutuhan lainnya, seperti memberikan pelayanan kebutuhan peliputan media. Media asing dapat menghubungi Kementerian Luar negeri melalui Subdit Fasilitas Media untuk menanyakan atau pun meminta bantuan terkait pelayanan kebutuhan peliputan. Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim mengatakan bahwa dalam menyampaikan pelayanan kepada media asing, ada yang bentuknya prosedural, ada juga pelayanan peliputan mereka misalnya *audio recording*, siaran pers, transkripsi. Itu kami berikan, jika mereka memerlukan.⁴⁰

Kementerian Luar Negeri juga secara aktif melakukan aktivitas *media relations* kepada media massa asing seperti *press briefing*, *media gathering*, *foreign policy breakfast*, Journalist Visit Program (JVP) dan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PTPM).

“Tujuan *press briefing* Kemlu adalah Untuk menginformasikan kegiatan yang akan dan atau yang telah dilaksanakan oleh Kemlu. *Press briefing* juga dimaksudkan untuk menginformasikan isu-isu terkini ataupun hal-hal penting yang berhubungan dengan politik luar negeri yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. *Press briefing* dilaksanakan mingguan yang dipimpin langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Arrmanatha Nasir. Ketika akan melaksanakan *press briefing*, akan diidentifikasi isu-isu penting ataupun kegiatan yang akan dilaksankana

³⁹ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁴⁰ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

dalam minggu tersebut untuk kemudian dibuat *summary* bagi media. BAM/Unit terkait akan menyiapkan bahan substansi yang akan disampaikan kepada media. Sementara itu, Infomed akan menyiapkan logistik, undangan dan pengaturan jurnalis/jadwal wawancara.”

Press release untuk *press briefing* akan di berikan kepada media dalam bentuk kertas juga akan di-*blast* melalui *e-mail*. Berdasarkan permintaan, Direktorat Informasi dan Media juga menyediakan rekaman suara *press briefing* untuk jurnalis yang tidak bisa datang saat briefing. Menurut Kasi Akreditasi Media Asing, Nia mengatakan bahwa, kendala dari *press briefing so far* tidak terlalu banyak, kendala ada pada waktu karena kesibukan Jubir Kemlu.⁴¹

Pada pelaksanaan *foreign policy breakfast*, kepala biro dari media asing diundang untuk sarapan pagi bersama dengan Menteri Luar Negeri. Pada pelaksanaan tersebut, akan disampaikan isu-isu penting kepada kepala biro media asing, sehingga kepala biro tersebut dapat memberitahukan isu yang disampaikan kepada wartawannya untuk menuliskan di medianya masing-masing. Pelaksanaan *foreign policy breakfast* yang dilaksanakan kepada kepala biro media asing tidak akan disamakan waktu pelaksanaannya dengan yang dilakukan kepada pemimpin redaksi media nasional. Waktu pelaksanaan *foreign policy breakfast* ini pun tidak tentu, hanya dilaksanakan pada isu-isu yang dianggap penting dan perlu dibicarakan langsung dengan para kepala biro media asing. Menurut Kasi Akreditasi media Asing, Titania Arimbi, kita tidak pernah melakukannya disatukan sih, pasti dibedain. Karena isunya beda kan. Tapi treatment yang kita lakukan sama.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁴² Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Sementara itu, waktu pelaksanaan *media gathering* Kementerian Luar Negeri tidak dapat ditentukan.

“*Media gathering* dilaksanakan untuk isu-isu khusus ataupun pelaksanaan *event* internasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari media. *Media gathering* biasanya dilaksanakan menjelang acara atau *event* dengan mengundang narasumber khusus (diluar jubar kemlu) yang menangani langsung acara. Contohnya Mantan Menlu RI, Hassan Wirajuda untuk Bali Democracy Forum”⁴³

Waktu pelaksanaan *media gathering* kepada media asing akan dibedakan dengan *media gathering* kepada media nasional, namun tetap dengan *treatment* yang sama.

“Ibu menlu mengajak koresponden media asing untuk makan bareng terus disitu mereka ngobrol dengan nyaman tentang berbagai isu yang berkembang, sifatnya *off the record*, mereka menjadi tau pandangan pejabat kemlu dan kemlu pun menjadi tau arah tulisan dari para media asing.”⁴⁴

Tidak hanya Menteri Luar Negeri yang melaksanakan *media gathering*, juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kepala BAM pun juga mengadakan *media gathering* kepada wartawan. Beberapa *media gathering* akan mengundang seluruh media nasional dan media asing, namun beberapa *media gathering* hanya mengundang media nasional. Hal tersebut terjadi karena isu yang sedang ada berbeda-beda. Jika isu-isu besar atau sensitif, juru bicara akan mengundang media nasional dan media asing. Pada *media gathering* ini, bentuknya *off the record*. Juru bicara akan memberikan *backgrounders* terkait isu yang ada, tujuannya agar media memahami situasi yang benar-benar terjadi dan semakin memahami posisi Kementerian Luar Negeri maupun pemerintah Indonesia terhadap suatu isu.

⁴³ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁴⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Lalu ada pula pelaksanaan Journalist Visit Program (JVP), penyelenggaraan kegiatan JVP ditunjukkan untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Internasional melalui media. Peserta dari JVP adalah jurnalis dari media asing dengan reputasi baik. Menurut Kasi Akreditasi Media Asing, Titania Arimbi, mengatakan bahwa kegiatan selama JVP adalah mengunjungi UKM, mengunjungi Pemda untuk melihat potensi daerah, mengunjungi pegiat pariwisata dan masyarakat lokal serta mengunjungi tempat wisata.⁴⁵

Selain itu Kementerian Luar Negeri juga mengadakan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) dengan mengundang media asing. PPTM ini dilaksanakan pada awal bulan Januari setiap tahunnya. Tujuan diadakan PPTM adalah mendesiminasikan pencapaian Kementerian Luar Negeri di tahun sebelumnya dan mendesiminasikan rencana Kementerian Luar Negeri setahun ke depan.

⁴⁵ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri



Gambar 4.1 Pernyataan Pers Tahunan Menlu

Sumber : Portal Kemlu <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/pidato-menlu-pptm-2016-.aspx>

Menurut Kepala Subdit Berita, Achmad Ramadhan, untuk substansi atau isi yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dikerjakan oleh BAM, sementara untuk teknis penyelenggaraan dikerjakan oleh Infomed.⁴⁶ Kepala Subdit Berita, Achmad Ramadhan pun menambahkan,

“Pada PPTM, kita mengundang perwakilan-perwakilan duta besar negara sahabat yang aada di Jakarta, mantan-mantan menteri luar negeri, pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Luar Negeri, Komisi 1 DPR, Ketua DPR serta tentunya media nasional juga media asing. Media yang diundang tidak hanya wartawan tetapi juga pemimpin redaksi media nasional atau kepala biro koresponden media asing. Misalkan pada PPTM tahun 2016, kita mengundang 48 pemred (pemimpin redaksi) media nasional serta 35 kepala biro media asing. Lalu untuk para wartawannya sendiri, kita undang lewat grup whatsapp media.”⁴⁷

Tidak hanya mengelola relasi kepada media massa asing sebagai institusi, Kementerian Luar Negeri juga mengelola hubungan dengan para wartawan media

⁴⁶ Wawancara dengan Achmad Ramadhan, Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁴⁷ Wawancara dengan Achmad Ramadhan, Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

asing sebagai pekerja media. Direktorat Informasi dan Media maupun Biro Administrasi Menteri, berusaha untuk memiliki hubungan yang baik secara individual dengan para wartawan media asing.

“Kita biasanya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada wartawan, menunjukkan keramahan, Jika ada yang memiliki hobi atau ketertarikan yang sama, akan saling bertukar pendapat dan informasi, membantu mereka saat mengerjakan tugas dengan menyediakan snack ataupun makanan, misal saat *press briefing*.”⁴⁸

Di Kementerian Luar Negeri pun, tidak hanya dua satuan kerja tersebut saja yang mengelola relasi dengan para wartawan, bahkan para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri pun ikut serta mengelola relasi dengan wartawan. Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Eselon 1 dan 2 di Kementerian Luar Negeri senantiasa untuk melakukan hubungan media yang baik dengan para wartawan.

“Pejabat Kemlu seluruhnya melakukan hubungan dengan media. Tidak harus selalu bagian humas yang *me-maintenance* untuk hubungan pribadi dengan media. Seluruh pejabat Kemlu diberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan media manapun dan kepada wartawan siapapun.”⁴⁹

Kementerian Luar Negeri berupaya untuk dapat menjangkau publiknya melalui media massa. Dengan demikian hubungan media yang dilakukan berusaha untuk dipotensialkan semaksimal mungkin.

“Pejabat Kemlu itu mengerti bahwa mereka harus mempunyai hubungan baik dengan media. Semua dari kita ini mengerti bahwa hubungan dengan media *is a must*. Karena bagaimana Kemlu bisa memberitahukan kepada masyarakat apa yang Kemlu lakukan, yaa salah satu caranya lewat media. Dan karena itu ada hubungan saling menguntungkan, mereka butuh berita,

⁴⁸ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁴⁹ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

kita butuh mereka. Jadi secara tidak langsung, semua berusaha untuk *maintenance* hubungan.”⁵⁰

Juru bicara Kementerian Luar Negeri pun memberikan pernyataan terkait hubungan dengan media secara individual atau hubungan dengan wartawan media asing (koresponden media asing).

“Saya berusaha untuk mengenal wartawan-wartawan, kita bikin kadang-kadang, mengopi bersama, atau misalkan setelah *press briefing*, setelah bertemu dengan ibu menlu, saya kembali ke bawah untuk ngobrol dengan mereka, bercanda-bercanda, agar mengenal mereka. Agar mereka mengerti saya, mereka bisa tahu kapan saya bercanda kalau bicara, kapan saya serius. Saya juga mengerti mereka, *angle* mereka, apa yang mereka cari. Mereka orangnya seperti apa. Jadi saya selalu berusaha untuk ada *personal touch* dengan mereka.”⁵¹

Publik Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional, mendorong Kemlu untuk menyusun daftar media yang sesuai dengan publiknya agar dapat membangun komunikasi serta menyampaikan informasi dengan baik kepada publik. Terkait hal tersebut, tim media Kementerian Luar Negeri menyusun daftar media. Daftar media ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media nasional dan asing. Daftar media berisi nama, nomor kontak, email dan foto. Daftar media nasional akan selalu di-*update* setiap tiga bulan sekali untuk mengecek apakah wartawan tersebut masih menduduki *post* di Kemlu atau sudah pindah *post*. Sementara daftar media asing selalu di-*update* setiap satu bulan sekali. Namun untuk keseluruhan data, Kementerian Luar Negeri akan selalu *update* tiap enam bulan sekali.

⁵⁰ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁵¹ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Pada *database* Kementerian Luar Negeri, yang ter-*update* Januari 2016 jumlah pemimpin redaksi media nasional atau media nasional yang terdaftar berjumlah 49, sedangkan koresponden asing atau media asing yang terdaftar berjumlah 52 media. Berikut ini daftar media asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri.

Tabel 4.1 Daftar Media Asing Kementerian Luar Negeri

Australian Associated Press (AAP)	NRC Handelsblad
Australian Broadcasting Company (ABC)	People's Daily (China)
Agence France Presse (AFP)	Polaris Images
Al-Jazeera International (English)	Thompson Reuters
Asahi Shimbun	Russian Information
Associated Press (AP)	Agency (RIA NOVOSTI)
Australia network TV	Radio France International
BBC	Sydney Morning Herald
BERNAMA	Seven Network Australia
Bloomberg News	The Australian
Channel News Asia	The Strait Times
China Central Television (CCTV)	The Asia Pacific Times
Cihan News Agency (Turki)	The Christian Science Monitor
CNN	The Hankook ILBO
Dowjones Newswire	The Jakarta Shimbun

Economic Daily China	THE MCCLOSKEY COAL S REPORT
EFE (Kantor Berita Spanyol)	The New Straits Times
ELSEVIER	The New York Times
Financial Times	The Wall Street Journal
Frankfurter Allgemeine Zeitung	TIME Magazine
Jiji Press	CTN International
Kyodo News	Utusan Melayu
Mainichi Shimbun	Vietnam News Agency
NHK	Voice of America (VoA)
Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI)	Xinhua News Agency
NOS Radio & TV The Netherland	Yomiuri Shimbun

Sumber : Database Kemlu Januari 2016

Pada daftar media asing sendiri, Kementerian Luar Negeri tidak memberikan klasifikasi, tidak ada klasifikasi khusus seperti wilayah atau *platform* (cetak, elektronik atau *online*).

“Kita tidak mengklasifikasikan berdasarkan wilayah karena jumlah media massa asing yang besar tidak begitu banyak. Tetapi mayoritas yang berada di *database* Kemlu, berasal dari Asia dan Australia. Media juga sulit untuk diklasifikasikan oleh kita, karena media massa asing besar biasanya punya berbagai *platform* jadi sulit untuk diklasifikasikan sesuai *platform*-nya. *Platform* media massa sekarang juga kebanyakan bentuknya *multi-platform*.”⁵²

⁵² Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Selain menyusun daftar kontak media sebagai *database* Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri juga memberikan daftar kontak pihak-pihak yang bisa dihubungi oleh media massa dan wartawan untuk memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Secara resmi, Kementerian Luar Negeri memberikan nomor juru bicara dan Menteri Luar Negeri untuk mencari berita atau pun untuk mengkonfirmasi berita serta memberikan nomor Direktorat Informasi dan Media untuk mengurus peliputan media.

“Media yang ingin menghubungi Kemlu untuk mencari berita atau mengkonfirmasi berita bisa langsung menghubungi nomor Jubir dan Menlu. Tetapi disaat mereka ingin mengurus untuk peliputan bisa langsung menghubungi Infomed. Kita tidak membagi secara langsung nomor kontak pejabat tetapi kita menciptakan suatu *moment* yang bisa mempertemukan antara orang-orang penting di kemlu seperti pejabat eselon 1 dan 2 dengan wartawan, misalkan melalui *press briefing*, *media gathering* atau PPTM. Di *moment* tersebut, wartawan bisa langsung berinteraksi dengan pejabat-pejabat Kemlu sehingga bisa langsung saling bertukar kontak yang dibutuhkan seperti nomor *handphone* atau *e-mail*”⁵³

Kementerian Luar Negeri berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada wartawan agar dapat memenuhi kebutuhan wartawan seperti mendapatkan berita atau informasi yang sebenar-benarnya dan dari pihak pertama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir pun menjelaskan terkait informasi yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri.

“Di Kemlu ini, jika ingin mencari *statement* resmi atau posisi dan pandangan Kemlu bisa menghubungi saya atau ibu menlu. Tapi kalau mau mendalami suatu isu, mengenai suatu topik bisa langsung ke direktur atau dirjen terkait. Kalau saya hanya menjelaskan ini posisi Kemlu, ini posisi Indonesia. Kalau ditanya kenapa posisi-nya begini, saya akan jelaskan. Tapi *statement* saya lebih kepada posisi dan pandangan Kemlu atau Indonesia.

⁵³ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Kalau *detail*-nya yang lebih mengetahui Dirjen atau Direktur yang mengetahui atau menangani isu tersebut”⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian pada mengelola relasi dalam strategi *media relations* Kementerian Luar Negeri ini dapat diketahui bahwa:

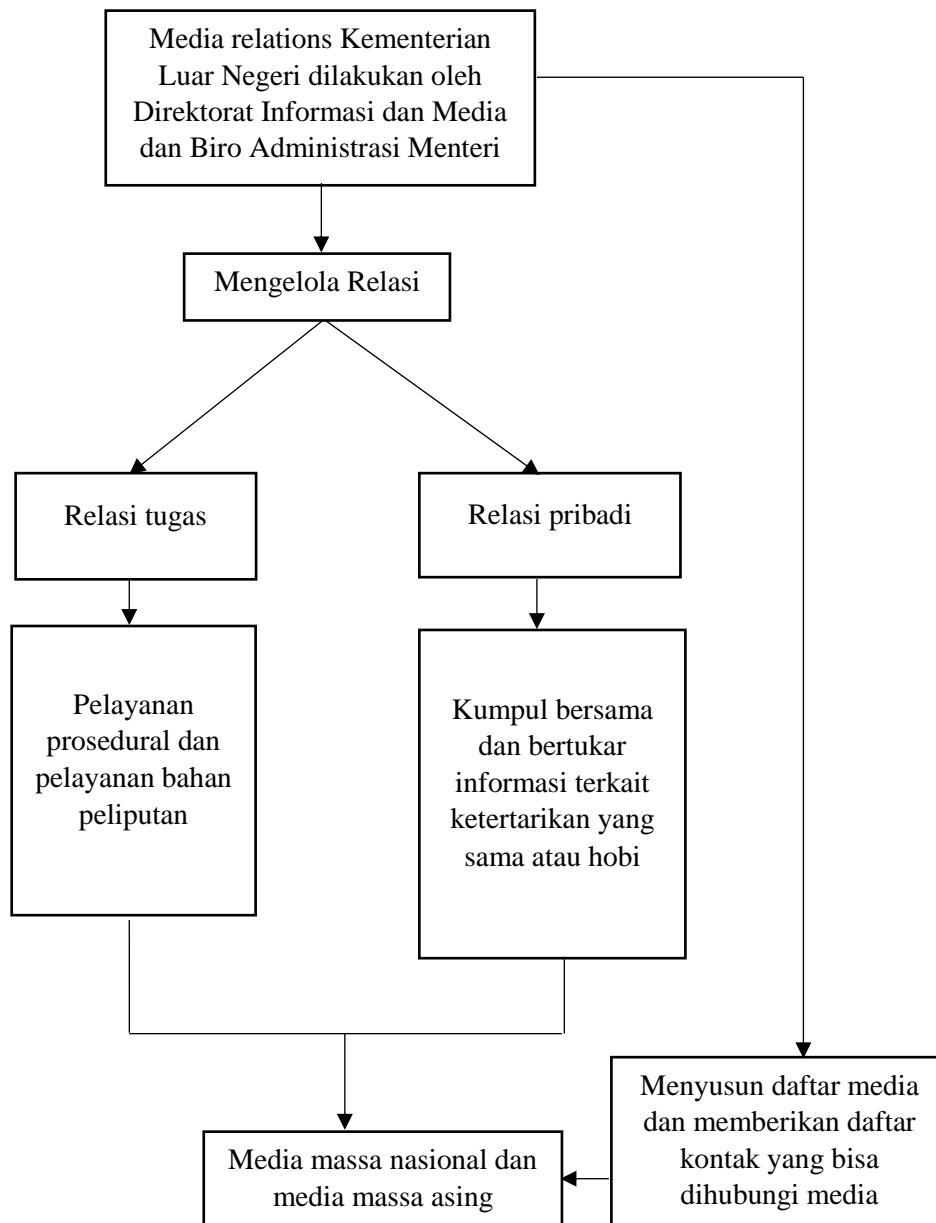
- a. Kementerian Luar Negeri menyadari berhubungan atau berelasi dengan media merupakan hal penting. *Media relations* Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh dua unit satuan kerja, yaitu Direktorat Informasi dan Media serta Biro Administrasi Menteri. Direktorat Informasi dan Media mengurus *maintenance media relations*, sedangkan Biro Administrasi Menteri mengurus isi informasi pada *press release* dan isi informasi yang akan disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Kepala Biro Administrasi Menteri menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri
- b. Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan informasi, memiliki standar operasi yang dijadikan pedoman diantaranya informasi yang disampaikan harus berdasarkan sumber yang benar dan terpercaya, juru bicara atau Menteri Luar Negeri atau pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjadi narasumber harus mampu menjelaskan secara baik mengenai prinsip dan kebijakan Kementerian Luar Negeri atau Pemerintah Indonesia. Selain itu juga, Kementerian Luar Negeri melakukan penyaringan informasi hingga tiga kali untuk memastikan informasi benar. Jika sudah yakin benar, baru akan di-*publish* kepada publik melalui berbagai media seperti media massa dan media digital Kementerian Luar Negeri. Penyampaian informasi

⁵⁴ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

yang dilakukan Kementerian Luar Negeri melalui penulisan *press release* dan *press briefing* tidak sama pada semua isu, tergantung isu tersebut apakah termasuk informasi yang bersifat sensitif atau bersifat biasa.

- c. Kementerian Luar Negeri tidak melakukan perbedaan *treatment* kepada media nasional maupun media asing. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi diantaranya melakukan pelayanan prosedural seperti pelayanan kunjungan jurnalistik wartawan asing di Indonesia, pembuatan kartu pers tetap, pelayanan penempatan koresponden tetap asing di Indonesia, pembuatan rekomendasi pembuatan/perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dan pelayan bahan peliputann seperti audio recording, press-release (siaran pers), dan transkripsi. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi dengan wartawan sebagai pekerja media diantaranya memiliki hubungan yang baik secara individual. Pajabat-pejabat Kementerian Luar Negeri menjalin hubungan yang baik dengan saling mengobrol dan berkumpul, bertukar pendapat atau informasi tentang suatu ketertarikan yang sama atau hobi.
- d. Kementerian Luar Negeri harus melakukan penyusunan daftar media, namun tidak ada klasifikasi khusus pada daftar media seperti wilayah atau platform (cetak, elektronik atau online). Tidak adanya klasifikasi khusus seperti wilayah atau platform media (cetak, elektronik dan online). Selain menyusun daftar kontak media sebagai database Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri juga memberikan daftar kontak pihak-pihak yang

bisa dihubungi oleh media massa dan wartawan untuk memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Secara resmi, Kementerian Luar Negeri memberikan nomor juru bicara untuk mencari berita atau pun untuk mengkonfirmasi berita serta memberikan nomor Direktorat Informasi dan Media untuk mengurus peliputan media.



Bagan 4.1 Mengelola Relasi pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

Sumber : Modifikasi Penulis

4.1.2 Pembahasan

Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu bagian dari pemerintah Indonesia memahami pentingnya mengelola relasi dengan media massa, baik dengan media massa nasional maupun media massa asing. Berdasarkan Permenlu No 07 tahun 2011, Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Menurut Frank Jefkins (2015: 10), *Public relations* adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Merujuk pada pernyataan dari Frank Jefkins, Direktorat Informasi dan Media merupakan *publik relations* atau humas bagi Kementerian Luar Negeri. Direktorat Informasi dan Media menjalankan tugasnya pada bidang informasi dan media untuk mengkomunikasikan segala informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri serta pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia maupun dunia, dalam rangka mencapai tujuan spesifiknya yaitu memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya menjalankan tugas, Direktorat Informasi dan Media pun menyelenggarakan beberapa fungsi, dan untuk memenuhinya, Direktorat Informasi dan Media melaksanakan beberapa kegiatan seperti *press briefing* mingguan, penerbitan *press release*, *media gathering*, *digital diplomacy*, dan sebagainya. Menurut Iriantara (2011: 26) berdasarkan pengelompokan publik *public relations*, maka dibangun dan dikembangkan relasi dengan publik dalam kegiatan-kegiatan *employee relations*, *stockholder relations*, *customer relations*, *community relations*, *government relations* dan *press/media relations*. Pada hal ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media termasuk kepada *media relations* karena kegiatan-kegiatan tersebut ditunjukkan kepada salah satu publik *public relations* yaitu media.

Lesley (dalam Iriantara, 2011: 29) menjelaskan *media relations* sebagai suatu hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Sementara itu, Frank Jefkins (2015: 113) menjelaskan “*press relations* adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas informasi PR guna menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya.” Merujuk kepada pernyataan Lesley dan Frank Jefkins, Kementerian Luar Negeri melakukan *media relations* untuk menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya terkait kebijakan politik luar negeri.

“...Kita juga menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya melalui media massa. Berhubungan atau berelasi dengan media merupakan salah satu hal penting.”⁵⁵

Mengelola relasi yang baik dengan media menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan humas, hal ini tentunya dimaksudkan agar organisasi bisa berkomunikasi dengan publiknya, sekaligus mendengar suara dari publik-publiknya. (Iriantara, 2011: 80) Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terlihat bahwa Kementerian Luar Negeri telah memahami pentingnya mengelola relasi dengan media massa, termasuk media asing agar informasi yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri serta Pemerintah Indonesia dapat lebih menjangkau publik internasional. Dengan adanya pemberitaan melalui media massa asing maka informasi bisa disebarluaskan pada publik di berbagai penjuru dunia, khususnya kepada publik yang ingin mengetahui tentang kondisi Indonesia atau kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal ini pun berkaitan dengan tujuan *media relations* yang dituliskan oleh Rachmadi (dalam Wardhani, 2013: 12-13). Menurut Rachmadi tujuan *media relations* bagi perusahaan/organisasi antara lain adalah untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta langkah perusahaan/organisasi yang baik untuk diketahui umum.

Selain itu pula, dalam praktiknya Humas membutuhkan media massa untuk menginformasikan pesan yang berhubungan dengan organisasi ke khalayak. Pesan tersebut berpengaruh terhadap pandangan masyarakat ke organisasi (Iriantara, 2011: 155) Kementerian Luar Negeri mengkomunikasikan informasi terkait

⁵⁵ Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Luar Negeri serta pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia maupun dunia, dalam rangka memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Terkait dengan bidang pekerjaan *media relations*, maka pada internal organisasi dibentuk tim media. Tim ini setidaknya mengandung 3 tugas yang dijalankan yakni koordinator media, juru bicara dan penulis. Koordinator media merupakan orang yang bekerja di belakang layar yang akan memberikan pasokan informasi yang diperlukan juru bicara dan penulis. Orang yang bertugas menjadi koordinator ini biasanya jarang muncul dalam pemberitaan media, namun memainkan peran penting untuk membuat informasi dari satu organisasi diketahui oleh publiknya. Sedangkan juru bicara adalah orang yang menjalankan tugas untuk memberikan informasi atau keterangan pada pers. Ada pun penulis, adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi secara tertulis, seperti siaran pers, *backgrounders* atau biografi singkat pembesar organisasi yang dipandang diperlukan media massa.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh dua satuan kerja atau unit kerja, yaitu Direktorat Informasi dan Media serta Biro Administrasi Menteri. Direktorat Informasi dan Media mengurus *maintenance media relations*, sedangkan Biro Administrasi Menteri mengurus isi informasi pada *press release* dan isi informasi yang akan disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar

Negeri. Kepala Biro Administrasi Menteri menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Namun, tugas untuk penyiapan, perumusan, dan pemberian informasi kepada media massa yang akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri akan dilakukan oleh Biro Administrasi Menteri, bagian Informasi dan Media Massa. Pada hal ini terlihat bahwa coordinator media yang dimaksudkan oleh Yosol Iriantara dalam konsep strategi *media relations*, lebih tertuju kepada Biro Administrasi Menteri, bagian Informasi dan Media Massa. Bagian ini akan menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan substantif dan administratif kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri. Bagian ini menghimpun informasi dari unit terkait atau lembaga/ kementerian lain sebagai dasar isi informasi yang akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut menunjukkan tugas koordinator media dalam konsep Yosol Iriantara yang merupakan orang yang bekerja di belakang layar yang akan memberikan pasokan informasi yang diperlukan juru bicara dan penulis. Namun Koordinator Media juga melakukan pekerjaan menganalisis dan menilai. Pekerjaan ini lebih dikerjakan oleh Direktorat Informasi dan Media. Pada Direktorat Informasi dan Media terdapat subdit berita yang melakukan media monitoring, menganalisis dan menilai perkembangan opini publik yang disampaikan media massa. Pada hal

ini terlihat bahwa koordinator media yang dimaksudkan oleh Yosol Iriantara dalam konsep strategi *media relations* juga tertuju pada Direktorat Informasi dan Media.

Sementara itu, juru bicara dalam konsep Yosol Iriantara adalah orang yang menjalankan tugas untuk memberikan informasi atau keterangan pada pers. Berdasarkan hasil penelitian, juru bicara pada Kementerian Luar Negeri adalah Kepala Biro Administrasi Menteri. Beliau selalu memberikan informasi kepada pers terkait dengan arah, posisi, pandangan dan kebijakan Menteri Luar Negeri. Lalu ada pun penulis, adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan informasi secara tertulis, seperti siaran pers, *backgrounders* atau biografi singkat pembesar organisasi yang dipandang diperlukan media massa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis yang dimaksud dalam konsep Yosol Iriantara adalah bagian Informasi dan Media Massa, Biro Administrasi Menteri. Bagian ini yang akan menulis *press release* bagi juru bicara Menteri Luar Negeri serta media, berdasarkan substansi atau draft awal yang telah diberikan oleh unit-unit di Kementerian Luar Negeri. Setelah *press release* selesai dibuat, barulah Direktorat Informasi dan Media yang akan disebarakan kepada media melalui *e-mail*. *Press release* yang ditulis pun akan disebarakan kepada publik melalui media digital Kementerian Luar Negeri seperti portal Kementerian Luar Negeri.

Dalam mengelola relasi media, humas bukan hanya menjalin hubungan baik dengan institusi media massa saja, melainkan juga dengan para wartawan. Menjalinkan hubungan baik dengan media massa sebagai institusi sama pentingnya dengan menjalin hubungan baik dengan wartawan (Iriantara, 2011: 81).

Menurut triangulator dari sudut pandang seorang pakar komunikasi, Aria Nurfikry untuk membangun sebuah media relations yang baik, tentunya dibutuhkan jalinan hubungan dengan media sebagai organisasi juga wartawan media tersebut. Jalinan hubungan dengan media, salah satunya dapat dilakukan dengan media visit. Semetara itu, untuk jalinan hubungan dengan wartawan, dapat dilakukan dengan melakukan perjamuan makan siang bersama atau makan malam bersama. Dengan berinteraksi dengan lebih personal, terjalin kedekatan antara organisasi dengan media maupun wartawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, Kementerian Luar Negeri mengelola relasi dengan media massa sebagai institusi maupun juga mengelola hubungan dengan para wartawan media asing. Mengelola relasi dengan media massa sebagai suatu institusi, diantaranya adalah pelayanan kunjungan jurnalistik wartawan asing di Indonesia, pembuatan kartu pers tetap, pelayanan penempatan koresponden tetap asing di Indonesia, pembuatan rekomendasi pembuatan/perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Selain melayani hal prosedural tersebut, Kementerian Luar Negeri juga melayani kebutuhan lainnya, seperti memberikan pelayanan kebutuhan peliputan media. Kementerian Luar Negeri juga secara aktif melakukan aktivitas *media relations* kepada media massa asing seperti *press briefing*, *media gathering*, Journalist Vist Program (JVP) dan Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PTPM). Menjalin hubungan baik dengan institusi media massa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan melakukan berbagai pelayanan media, menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam mengelola relasi dengan

media asing. Kementerian Luar Negeri menyadari, pihak Kementerian Luar Negeri jelas membutuhkan media massa untuk mengomunikasikan informasi terkait Kementerian Luar Negeri maupun politik luar negeri kepada publiknya, serta pihak media massa asing pun membutuhkan Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu sumber beritanya.

“Pejabat Kemlu itu mengerti bahwa mereka harus mempunyai hubungan baik dengan media. Semua dari kita ini mengerti bahwa hubungan dengan media *is a must*. Karena bagaimana Kemlu bisa memberitahukan kepada masyarakat apa yang Kemlu lakukan, yaa salah satu caranya lewat media. Dan karena itu ada hubungan saling menguntungkan, mereka butuh berita, kita butuh mereka. Jadi secara tidak langsung, semua berusaha untuk *maintenance* hubungan.”⁵⁶

Jalinan yang baik antara Kementerian Luar Negeri dengan institusi media massa asing akan memudahkan masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya.

Kementerian Luar Negeri juga mengelola hubungan dengan para wartawan media asing sebagai pekerja media. Direktorat Informasi dan Media maupun Biro Administrasi Menteri, berusaha untuk memiliki hubungan yang baik secara individual dengan para wartawan media asing. Di Kementerian Luar Negeri pun, tidak hanya dua satuan kerja tersebut saja yang mengelola relasi dengan para wartawan, bahkan para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri pun ikut serta mengelola relasi dengan wartawan. Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, Pejabat Eselon 1 dan 2 di Kementerian Luar Negeri senantiasa untuk melakukan hubungan media yang baik dengan para wartawan.

⁵⁶ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri pada tanggal 21 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Hubungan baik dengan wartawan tidak bisa diabaikan. Wartawanlah yang akan menulis informasi yang disampaikan organisasi dalam bentuk tulisan yang siap disajikan media massa pada khalayak. Wartawan merupakan personifikasi dari institusi media massa. Wartawan itulah yang memasok informasi yang akan disiarkan oleh media massa, meski keputusan penyiaran satu informasi ada pada tangan redaktur. Namun pengambilan keputusan itu hanya akan terjadi bila ada informasi yang ditulis oleh wartawan entah dalam bentuk berita ataupun *feature* (Iriantara, 2011: 82).

Merujuk kepada pernyataan Iriantara, wartawan memiliki peran penting dalam *media relations*. Wartawan adalah pihak yang akan menulis informasi yang disampaikan organisasi dalam bentuk tulisan yang akan siap diberitahukan kepada publik. Hubungan baik dengan wartawan tentu juga penting untuk dijaga. Menurut triangulator, Aria Nurfikry, dari sudut pandang seorang pakar komunikasi, menjalin hubungan dengan wartawan juga dilakukan dengan memberikan pasokan informasi yang penting, yang dibutuhkan oleh wartawan. Hal ini menunjukkan sikap organisasi yang mengerti atas kebutuhan dari wartawan sebagai personifikasi dari media. Berdasarkan hasil penelitian, menurut wawancara dengan Kasi Akreditasi Media Asing, Titania Arimbi dapat diketahui bahwa secara personal, pejabat kementerian luar negeri juga sering mengundang para jurnalis pos kemlu untuk bincang-bincang santai sambil ngopi ataupun makan siang/malam. Bincang santai ini bersifat *off the record* yang bertujuan untuk memberikan *background* info atas sebuah isu yang sensitif.

Hubungan pribadi dengan awak media bisa jadi penentu baik buruknya hubungan satu organisasi dengan media massa. Kemampuan menjalin hubungan *interpersonal* tersebut sangat menunjang berjalan baiknya *media relations* organisasi.

Ada kalanya hubungan *interpersonal* seperti persahabatan yang erat dengan awak media massa atau insan pers memberikan ruang untuk menunjang tujuan PR organisasi. Tujuan mengubah sikap publik terhadap isu tertentu atau membangun citra positif yang awet diawali dengan mengubah pandangan awak media terhadap organisasi itu. Karena bagaimana awak media memandang satu organisasi sedikit banyak akan menampilkannya di media massa tempat mereka bekerja. (Iriantara, 2011: 15)

Merujuk pada pernyataan Yosol Iriantara tersebut, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan hubungan *interpersonal* dengan para insan pers atau koresponden media asing agar dapat lebih menunjang berjalan baiknya *media relations* yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, sehingga tujuan penguatan citra positif Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

Kementerian Luar Negeri berupaya untuk dapat menjangkau publiknya melalui media massa. Dengan demikian hubungan media yang dilakukan berusaha untuk dipotensialkan semaksimal mungkin. Publik Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional, mendorong Kemlu untuk menyusun daftar media yang sesuai dengan publiknya agar dapat membangun komunikasi serta menyampaikan informasi dengan baik kepada publik. Pada hal tersebut, tim media Kementerian Luar Negeri menyusun daftar media. Daftar media ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu media nasional dan asing. Daftar yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri disusun oleh Direktorat informasi dan media.

Dengan mengingat *media relations* itu dilakukan untuk membangun komunikasi dan relasi dengan publik organisasi, maka prioritas membangun relasi itu dilakukan dengan media yang secara potensial terpaannya dapat mengenai publik-publik organisasi. Karena itulah diperlukan daftar media cetak dan elektronik yang segmentasi khalayaknya sama atau sebagian besar merupakan publik-publik organisasi tersebut. (Iriantara, 2011: 86)

Menurut triangulator, Aria Nurfikry, dari sudut pandang pakar komunikasi, organisasi perlu mengenal karakteristik dari media agar dapat menyebarkan informasi secara tepat kepada media-media potensial. Misalkan, jika informasi yang akan disampaikan oleh organisasi (Kementerian Luar Negeri) berkaitan dengan ekonomi seperti investasi, maka akan lebih tepat jika informasi tersebut diberikan kepada media asing seperti *The Economist*, sehingga informasi terkait investasi tersebut dapat diketahui dengan lebih cepat dan baik oleh publik dunia yang memiliki konsen terhadap bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kementerian Luar Negeri hanya menyusun daftar media berdasarkan klasifikasi media nasional dan media asing. Daftar media yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri dengan memperhitungkan level media (nasional/ regional/ lokal). Kementerian Luar Negeri tidak menyusun daftar media asing berdasarkan *platform* maupun daerah.

“Kita tidak mengklasifikasikan berdasarkan wilayah karena jumlah media massa asing yang besar tidak begitu banyak. Tetapi mayoritas yang berada di *database* Kemlu, berasal dari Asia dan Australia. Media juga sulit untuk diklasifikasikan oleh kita, karena media massa asing besar biasanya punya berbagai platform jadi sulit untuk diklasifikasikan sesuai *platform*-nya.

Platform media massa sekarang juga kebanyakan bentuknya *multi-platform*.⁵⁷

Daftar media yang dimiliki Kementerian Luar Negeri lebih mirip dengan direktori media, bukan disusun berdasarkan daftar media yang secara potensial bisa dijadikan media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri, kurang diperhitungkan jenis khalayak media dan cakupan media secara geografis.

Pada kegiatan *media relations* pun, organisasi perlu membuat daftar kontak yang diberikan kepada media massa dan wartawan, yang akan memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan organisasi. (Iriantara, 2011: 87)

Berdasarkan hasil penelitian, Kementerian Luar Negeri juga memberikan daftar kontak pihak-pihak yang bisa dihubungi oleh media massa dan wartawan untuk memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Secara resmi, Kementerian Luar Negeri memberikan nomor juru bicara Kementerian Luar Negeri dan menteri luar negeri untuk mencari berita atau pun untuk mengkonfirmasi berita serta memberikan nomor Direktorat Informasi dan Media untuk mengurus peliputan media. Daftar kontak yang diberikan kepada media massa dan wartawan media asing, memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri untuk berhubungan dengan

⁵⁷ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 21 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

media massa. Daftar kontak media yang diberikan kepada media ini dapat digunakan oleh media untuk mencari berita maupun menanyakan layanan media.

“Media yang ingin menghubungi Kemlu untuk mencari berita atau mengkonfirmasi berita bisa langsung menghubungi nomor Jubir dan Menlu. Tetapi disaat mereka ingin mengurus untuk peliputan bisa langsung menghubungi Infomed. Kita tidak membagi secara langsung nomor kontak pejabat tetapi kita menciptakan suatu moment yang bisa mempertemukan antara orang-orang penting di kemlu seperti pejabat eselon 1 dan 2 dengan wartawan, misalkan melalui *press briefing*, media gathering atau PPTM. Di moment tersebut, wartawan bisa langsung berinteraksi dengan pejabat-pejabat Kemlu sehingga bisa langsung saling bertukar kontak yang dibutuhkan seperti nomor *handphone* atau *e-mail*”⁵⁸

Direktorat Informasi dan Media juga berusaha menciptakan *moment-moment* bagi media dan pejabat Kementerian Luar Negeri agar kedua belah pihak dapat semakin dekat dan memiliki hubungan yang lebih baik.

⁵⁸ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 21 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

4.2 Mengembangkan Strategi pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

4.2.1 Hasil Penelitian

Ketika menjalankan strategi *media relations*, hal kedua yang harus diperhatikan adalah mengembangkan strategi itu sendiri. Kementerian Luar Negeri mengembangkan strategi *media relations* untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Luar Negeri. Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media, sehingga strategi *media relations* pun dikembangkan oleh Direktorat Informasi dan Media.

“Keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri tidak terlepas dari upaya strategi komunikasi informasi melalui pengelolaan informasi hubungan luar negeri, pelayanan media yang handal, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau ‘digital diplomacy’ yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Informasi dan Media dalam mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019.”(Kementerian Luar Negeri, 2015: 3)

Berdasarkan Renstra Direktorat Informasi dan Media 2015-2019, Direktorat Informasi dan Media memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media. Peran tersebut diantaranya adalah upaya meningkatkan pemberitaan positif oleh media tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan strategi, perencanaan, dan kinerja melalui upaya-upaya peningkatan kualitas konten portal situs dan media sosial Kemlu atau yang disebut juga sebagai ‘*digital diplomacy*’,

pengoptimalan kemitraan dengan media massa, serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berdasarkan *database*.

Terkait mengembangkan strategi *media relations*, Direktorat Informasi dan Media memperhatikan kekuatan dan kelemahan sumber daya organisasi serta memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi.

Berikut ini analisis kekuatan, kelemahan sumber daya organisasi serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi (SWOT) pada Direktorat Informasi dan Media.



Tabel 4.2 Matriks SWOT Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri

Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Raksa Ibrahim pun menjelaskan terkait analisis SWOT media seperti pada media asing yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media.

“Setiap kegiatan media itu kita selalu data siapa saja wartawan yang hadir, berapa banyak yang datang, terus kita lihat juga tiap bulannya berapa banyak kita membuat kegiatan untuk bertemu dengan media, lalu berapa banyak media yang datang. Kita lihat antusiasme dan animo dari wartawan, kita juga melihat isu apa yang wartawan suka, dan bagaimana wartawan nantinya akan membingkai pemberitaan-pemberitaan baik secara bingkainya maupun kontennya. Sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita dapat melihat kira-kira *angle*-nya akan kemana, media ini, misalnya apakah media dari Australia akan memberikan peliputan yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung citra positif Indonesia.”⁵⁹

Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Raksa Ibrahim menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Informasi dan Media akan menilai media-media asing terhadap pemberitaan media asing.

“Kita menilai dari hasil liputannya, kan ada *fair*, akurat dan memberikan kecenderungan yang positif bagi Kemlu. Kalau dua dari hal tersebut cross berarti media ini entah salah, atau pun perlu diberikan pemahaman yang lebih baik, misalnya media tersebut memberitakan suatu isu tetapi tidak akurat, maka media tersebut perlu diberikan klarifikasi. Kalau *fair* atau berimbang terus akurat, tapi agak-agak kurang cenderung memberikan citra positif masih kita anggap oke, karena itu kan kebebasan pers tapi hal tersebut tidak berlebihan atau menimbulkan polemik serta menyulut paham kebencian antara satu pihak dengan pihak lain atau membentur antara negara dan masyarakat. Kita lihat hasil liputan dan haluan dari media tersebut. Meskipun sudah tidak terlalu pengaruh si haluan tersebut.”⁶⁰

Pengembangan strategi *media relations* yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, tidak hanya memperhatikan SWOT, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam berhubungan

⁵⁹ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶⁰ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

dengan media massa. Pertama, jangan pernah berbohong, Kementerian luar negeri selalu berusaha untuk memberikan fakta dan data yang paling benar saat menyampaikan informasi kepada media massa asing.

“Menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-ngurangi, harus sesuai porsinya, menyampaikan sesuatu yang akurat, misalnya fakta tentang kriminalitas di Indonesia.”⁶¹

Kepala Biro Administrasi Menteri atau Juru Bicara Kementerian Luar Negeri pun memberikan pernyataannya terkait prinsip ini.

“Kita tidak boleh bohong. Karena kalau sekali kita bohong, kita akan kehilangan kredibilitas. Jika kita kehilangan kredibilitas, kita akan kehilangan kerjaan. Karena itu adalah kerjaan kita. Jika ada wartawan yang menanyakan sesuatu, dan saya memang belum memiliki datanya, saya tidak bisa bilang ‘tidak tahu’. Kalau dengan media kita enggak boleh jawab ‘enggak tau atau *no comment*’. Itu yang tidak pernah boleh dikatakan oleh seorang juru bicara. Yang bisa kita katakan adalah ‘ya kita cek kembali atau saat ini saya belum bisa memberikan komentar karena datanya saya belum lengkap’ ”.⁶²

Kedua, mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (*rapport*) dengan media. Kementerian Luar Negeri berusaha mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media massa, baik media massa nasional maupun asing. Sebelum pelaksanaan atau setelah pelaksanaan peliputan seperti pada *press briefing*, pejabat Kementerian Luar Negeri dapat saling berinteraksi dengan media massa, sehingga dapat saling bertukar informasi maupun pendapat. Komunikasi yang dilakukan antara pihak Kementerian Luar Negeri tidak hanya seputar masalah internasional maupun Indonesia, tetapi juga seputar hobi dan yang lainnya berupa

⁶¹ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶² Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

obrolan ringan. Menurut Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim, jika ada yang memiliki hobi atau ketertarikan yang sama, akan saling bertukar pendapat dan informasi.⁶³

Ketiga, menjadi narasumber yang berharga. Kementerian Luar Negeri selalu berusaha untuk memberikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan fakta yang ada. Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim, mengatakan bahwa kita kan perlu memberikan informasi yang tepat, agar nanti peliputan atau pun pembuatan berita yang dilakukan wartawan itu akurat dan berimbang serta syukur-syukur memberikan kecenderungan yang positif bagi kita. Kementerian Luar Negeri berupaya untuk dapat menyajikan informasi langsung dari pihak pertama.⁶⁴ Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri menunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan statement yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri. Media massa asing yang ingin mengetahui informasi terkait Kementerian Luar Negeri ataupun kebijakan pemerintah Indonesia dapat menanyakan hal tersebut kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri.

“Sebagai jubah, kita harus *accessible*, harus bisa diakses. Karena kalau kita enggak bisa diakses, enggak ada gunanya. Jadi saya terima telepon, jawab sms jam 2 pagi, kadang-kadang, misalkan ada bom yang tiba-tiba meledak jam 2 pagi. Kalau saya masih bangun, yaa saya tanggapi. Kita harus mengerti bahwa mereka juga kan memiliki kewajiban untuk mencari narasumber untuk menyampaikan beritanya mereka. Justru kadang harus kita manfaatkan kesempatan seperti itu, untuk menyampaikan pandangan-

⁶³ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶⁴ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

pandangan kita. Karena kalau tidak, mereka akan punya pandangan tersendiri.”⁶⁵

Keempat, jangan membuka pertengkaran yang tak perlu. Kementerian Luar Negeri selalu berusaha menjaga relasi dengan media massa. Kementerian Luar Negeri berusaha menunjukkan keramahan dengan para media massa, termasuk media asing dengan mengajak berbicara saat berjumpa di kegiatan *press briefing*, *media gathering*, Journalist Visit Program (JVP), dan Penyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM). Kementerian Luar Negeri melalui juru bicara juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada media asing dengan selalu berusaha untuk dapat dihubungi atau dikontak melalui whatsapp atau email atau telepon jika media asing membutuhkan informasi atau konfirmasi atas suatu isu. Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim mengatakan bahwa menjaga relasi yang baik dan saling menghormati antar profesi itu yang paling utama.⁶⁶ Kasi Akreditasi Media Asing Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Titania Arimbi pun mengatakan bahwa hubungan dengan media itu harus. Untuk memberikan informasi kepada publik salah satunya harus lewat media jadi *maintenance* dengan media itu penting.⁶⁷

Tetapi Kementerian Luar Negeri kurang memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa. Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan

⁶⁵ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶⁶ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁶⁷ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Media Kementerian Luar Negeri, Titania Arimbi mengakui bahwa Kementerian Luar Negeri kerap kali dinilai tertutup dan lama dalam mengeluarkan pernyataan.

“Kementerian Luar Negeri suka dinilai tertutup dan lama dalam mengerluarkan pernyataan. Tapi sekali pernyataan tersebut keluar dari Kementerian Luar Negeri, akan dipercaya karena kemungkinan besar informasi itu benar. Kementerian Luar Negeri selalu melakukan *crosscheck* informasi hingga diyakini benar. Kita tidak mungkin menarik *press release* atau pernyataan yang telah diucapkan oleh pejabat kita sendiri.”⁶⁸

Kementerian Luar Negeri selalu berusaha untuk dapat memberikan informasi yang benar kepada media. Namun untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat, Kementerian Luar Negeri harus melakukan *check* hingga tiga kali. Proses untuk melakukan *check* yang memakan waktu tersebut, akhirnya mengakibatkan pemberian informasi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri menjadi lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan media yang harus menyampaikan informasi secara aktual. Setiap media massa, baik nasional maupun asing memiliki tenggat waktu (*deadline*) masing-masing.

Pada saat mengembangkan strategi, Kementerian Luar Negeri tidak hanya memperhatikan dimensi teknis atau prinsip dalam berhubungan dengan media massa, tetapi juga dimensi etis. Pada dimensi etis, Kementerian Luar Negeri melakukan manajemen berita melalui kegiatan terbuka seperti pengumuman dan publisitas tetapi tidak melakukan kegiatan tertutup. Kementerian Luar Negeri tidak melakukan upaya kegiatan tertutup atau kegiatan di bawah tangan seperti memanipulasi agenda yang mengarahkan liputan media massa. Kementerian Luar

⁶⁸ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Negeri hanya selalu berusaha untuk memberikan informasi atau menyajikan informasi sesuai dengan fakta dan data yang ada.

Kementerian Luar Negeri melakukan pengumuman dan publisitas terhadap segala kegiatan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri gencar untuk mendesiminasikan informasi melalui media digital Kemlu. Sesuai dengan kebijakan '*digital diplomacy*' yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Luar Negeri berusaha untuk dapat memberikan informasi melalui portal Kementerian Luar Negeri serta media sosial Kementerian Luar Negeri seperti twitter dan facebook. Setiap informasi yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri akan selalu diinformasikan melalui media digital Kementerian Luar Negeri. Direktorat Informasi dan Media yang bertanggung jawab secara langsung dalam *maintenance* media digital Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri memberikan kesempatan kepada media massa asing untuk mengakses informasi, mengutip pemberitaan yang telah di-*publish* oleh Kementerian Luar Negeri dari media digital Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri juga memberikan kesempatan kepada media massa asing untuk meminta *press release* atau *audio recording* atau video yang di-*publish* oleh Kementerian Luar Negeri jika media massa asing tersebut ingin mem-*publish* kembali di media massanya.

“Karena sekarang ini, menteri kita sangat *social media minded*. Jadi apapun informasi ingin segera diinformasikan secara *realtime*. Begitu selesai suatu kegiatan Kemlu, akan langsung tayang di sosial media kita. Jadi informasi didistribusikan lewat media digital Kemlu, tetapi juga tetap lewat media massa. Kita menginformasikannya melalui berbagai cara, termasuk bentuk video dan audio. Video dan Audio kita informasikan lewat portal kemlu, medsos kemlu, atau kita berikan ke pada media massa.

Jika ada media massa ada yang minta, maka akan kita berikan. Misalkan Antara minta foto dari kita, kita akan kasih ke mereka. Kalau ada minta foto gitu , media akan menghubungi subdit avis (audio visual), dengan perantara fasmmed (fasilitas media). Karena fasmmed yang lebih kenal wartawan.”⁶⁹

Kementerian Luar Negeri telah menjalankan beberapa kegiatan dalam upaya penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media. Pada kasus eksekusi hukuman mati, Kementerian Luar Negeri, berusaha untuk menjelaskan tentang kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia ini. Kementerian Luar Negeri membuat *press release* terkait eksekusi hukuman mati pada 17 Februari 2015, berjudul PTRI New York: Hukuman Mati Di Indonesia Tidak Langgar HAM dan Hukum Internasional.



Gambar 4.2 *Press Release* Kementerian Luar Negeri

Sumber : Portal Kemlu <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/PTRI-New-York-Hukuman-Mati-Di-Indonesia-Tidak-Langgar-HAM-dan-Hukum-Internasional.aspx>

⁶⁹ Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

Press release ini merupakan tanggapan atas pernyataan Juru Bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric tentang eksekusi terhadap narapidana kejahatan narkoba.

"Indonesia menghargai upaya Sekjen PBB untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah, namun menyayangkan sikapnya yang didasarkan pada pemahaman sempit dan sepihak. Sikap tersebut berpotensi mengurangi integritas Sekjen PBB dalam menjalankan mandatnya, khususnya terkait pembahasan isu hukuman mati yang masih berlangsung di PBB" demikian pungkas Dubes Desra."⁷⁰

Pada *press release* ini pun dijelaskan dasar dari pengambilan keputusan eksekusi hukuman mati kepada kejahatan narkoba. Pembuatan *press release* tersebut dilakukan oleh Biro Administrasi Menteri, bagian informasi dan media.

"Kalau sehubungan dengan adanya eksekusi hukuman mati, misalnya pengumuman mengenai si A, si B, si C akan dieksekusi, kita tidak ngeluarkan *statement*. Tapi kita memang merespon apabila ada protes. Responnya itu sederhana bahwa ini adalah proses hukum yang memang sudah dilaksanakan, merupakan hukum positif Indonesia, dilaksanakan setelah yang bersangkutan melewati *legal avenue* yang maksimal, kita mempertimbangkan hak-haknya dia sehingga tidak mengambil keputusan ini dengan gegabah dan tidak dilarang oleh undang-undang bahwa hukuman mati bukan bentuk *punishment* yang dilarang. Kita Itu *statement* kita bagian dari respon kita terhadap pernyataan orang lain. Tapi itu *statement*, karena itu posisinya tidak berubah."

Press release ini juga disebar melalui portal Kemlu dengan berbahasa Indonesia. Menurut Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Rissa Ambarizky, segala *press release* pasti akan disebar lewat portal Kemlu, selain di *blast* lewat *e-mail* kepada

⁷⁰ Kementerian Luar Negeri. *PTRI New York: Hukuman Mati Di Indonesia Tidak Langgar HAM dan Hukum Internasional*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2016 dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/PTRI-New-York-Hukuman-Mati-Di-Indonesia-Tidak-Langgar-HAM-dan-Hukum-Internasional.aspx>

media.⁷¹ Rissa Ambarizky pun menjelaskan terkait dengan *press release* PTRI New York: Hukuman Mati Di Indonesia Tidak Langgar HAM dan Hukum Internasional.

“Iyaa dulu pernah ada. *Press release* tersebut berasal dari unit (PTRI New York), lalu disampaikan kepada Kepala BAM. Setelah di *accept* oleh Kepala BAM, lalu diberikan kepada Direktorat Informasi dan Media untuk disebar melalui portal Kemlu. Jadi pas sampai di kita, langsung kita posting di portal Kemlu.”⁷²

Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Rissa Ambarizky pun menerangkan tentang penyampaian informasi melalui media sosial Kementerian Luar Negeri terkait eksekusi hukuman mati narapidana narkoba,

“Waktu dulu kan juga ada ketegangan hubungan diplomatik dengan Brasil karena menolak surat kepercayaan duta besar Indonesia. Itu sempat kita *posting* di Medsos Kemlu, twitter dan facebook. Tapi untuk eksekusi hukuman mati jilid 3 ini tidak ada yang kita *posting*, karena memang tidak ada yang berkaitan dengan ketegangan hubungan diplomatik atau diplomasi Indonesia.”⁷³

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri pernah melakukan *press briefing* satu kali pada tanggal 19 januari 2015 untuk menanggapi bentuk protes yang dilakukan Pemerintah Belanda dan Brasil atas eksekusi mati terhadap warganya. Aksi protes itu dilakukan dengan memanggil pulang sementara duta besar kedua negara itu dari Indonesia. Media pun melakukan *doorstop* kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri setelah *press briefing*.

“... tidak ada *media gathering*, hanya *press briefing* satu kali bersama pak Tata disini (ruang palapa), rame banget waktu itu, udah itu aja. Dan itu

⁷¹ Wawancara dengan Rissa Ambarizky, Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁷² Wawancara dengan Rissa Ambarizky, Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁷³ Wawancara dengan Rissa Ambarizky, Fungsional Diplomat Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 16 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

(*press briefing*) bukan yang kita buat khusus yaa, maksudnya kayak *press briefing* hukuman mati. Itu enggak ada. Itu pasti akan masuk ke *press briefing* mingguan. Kalau ada yang nanya-nanya, nanti dijawab. Kalau enggak ada, yaudah enggak ada. Enggak ada yang spesial gitu. Untuk eksekusi hukuman mati narapidana narkoba jilid 3 juga sama yang dilakukan.”⁷⁴

Juru bicara Kementerian Luar Negeri pun menegaskan terkait *press briefing* yang dilakukan setiap minggunya dan *press briefing* yang berhubungan dengan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba.

“Saya melaksanakan *press briefing* setiap minggu untuk isu-isu yang menjadi kepentingan Kemlu yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Saya tidak pernah mengadakan *press briefing* untuk secara khusus bahas masalah eksekusi hukuman mati. Walaupun pada saat *press briefing* mingguan, ada beberapa pertanyaan dari media terkait kasus hukuman mati.”⁷⁵



Gambar 4.3 Juru Bicara Kementerian Luar Negeri saat melakukan *press briefing*

Sumber: Suara Karya <http://www.suarakarya.id/2016/07/29/eksekusi-mati-tidak-bertentangan.html>

⁷⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁷⁵ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri



Gambar 4.4 *Doorstop* dengan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri setelah *press briefing*

Sumber : Metrotv News <http://internasional.metrotvnews.com/asia/8Ky9213K-eksekusi-mati-kemenlu-minta-negara-lain-hormati-hukum-indonesia>

Selain itu, sehubungan dengan banyaknya reaksi dari berbagai negara, khususnya negara-negara yang warganya termasuk dalam daftar terdakwa narapidana narkoba yang akan dihukum mati, Kementerian Luar Negeri melaksanakan *press statement*. *Press statement* ini menghadirkan Menteri Luar Negeri sebagai narasumber.

“Waktu eksekusi yang pertama itu ada *press statement* menlu,tapi itu saja. Waktu itu kan ada warga negara Australia, Perancis, Brazil. Itu yang pertama kan. Setelah itu, kita enggak pernah lagi *press statement* mengenai itu.”⁷⁶

Pada *press statement* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015 di Kantor Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati para terpidana kasus peredaran dan

⁷⁶ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

penyelundupan narkoba tidak ditujukan kepada negara, bangsa, dan warga negara tertentu. Beliau menekankan kebijakan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum positif di Indonesia yang diimplementasikan untuk jenis kejahatan luar biasa. Dalam pelaksanaan hukuman mati itu, kata Menteri Luar Negeri (Menlu), Pemerintah Indonesia telah memastikan proses hukum yang dijalani para terpidana telah benar-benar sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan hukum internasional. Menlu pun menjelaskan dalam *press statement* tersebut, Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan untuk tindak kejahatan yang sangat serius melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.⁷⁷



Gambar 4.5 Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers kepada media

Sumber : Info Bisnis <http://info.bisnis.com/read/20150227/285/407040/eksekusi-mati-terpidana-narkoba-begini-seharusnya-sikap-australia>

⁷⁷Arisandy, Yuni. *Kata Kemlu Soal Tekanan Negara Lain Atas Kasus Eksekusi Hukuman Mati*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 dari <http://www.antaraneews.com/berita/482180/kata-kemlu-soal-tekanan-negara-lain-atas-kasus-hukuman-mati>

Informasi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri terkait kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba berasal dari informasi yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung, Kemenkopolkam serta Kementerian Hukum dan HAM.

“Kalau waktu eksekusi hukuman mati itu, kita memiliki unit yang cukup mengurus terkait hal tersebut, namanya direktorat konsuler. Direktorat Konsuler ini, memberikan pelayanan fasilitas kepada diplomat asing. Ketika ada kasus eksekusi hukuman mati, ada warga negara sebuah negara yang akan dihukum mati, direktorat konsuler ini akan terima surat dari kejaksaan agung, pemberitahuan. Misalnya, disampaikan A, warga negara perancis akan dieksekusi hukuman mati, rencananya akan menjalani hukuman mati pada tanggal sekian. Nah surat ini oleh direktorat konsuler harus diserahkan ke kedutaan warga negara tersebut, karena dia akan punya hak untuk mengontak yang akan dihukum mati, boleh ketemu, boleh ngomong, dikasih jadwal lah yaa buat ngomong, sampe akhirnya permintaannya apa, mau dikubur disini atau dibawa kenegaranya, atau keluarganya mau datang, macem-macem lah, permintaannya pokoknya terbuka. Baru setelah itu kita mempersiapkan informasi seputar fakta-fakta tersebut. Datanya dari direktorat konsuler, ada juga data yang kita peroleh dari KBRI atau perwakilan kita di negara lain, misal KBRI Paris, dari Perancis, macem-macem informasinya, tapi sih yang paling utama, unit yang menangani yang ada di Kemlu yang akan memberikan kita bahan-bahan. Walaupun disini di BAM, kita punya hak untuk mengkombinasikan informasi itu dari berbagi sumber, sumber resmi yaa tentunya seperti kedutaan, unit kita disini atau kementerian lain.”⁷⁸

Kepala bagian informasi dan media, Biro Administrasi Menteri, Listiana Operananta memberikan pendapatnya terkait eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.

“Kalau menurut saya sih ya, untuk eksekusi hukuman mati, informasinya tidak terlalu *complicated* yaa dibandingkan dengan, misalkan isu laut china selatan yang berhubungan dengan perdamaian atau *stability*. Kalau hukuman mati data yang kita perlukan, diantaranya jumlahnya berapa, warga negara apa aja, kapan, itu kan pertanyaan wartawan kaya gitu kan. Dan terutama yang jadi fokus utama adalah apakah proses hukumnya sudah

⁷⁸ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

maksimal. Jika semua proses hukum, hak-hak dia sebagai seorang manusia gitu di sebuah negara asing, dia sudah lewat semua. *When all through legal avenue* dan ternyata tidak bisa mendapatkan pengampunan, yaa dia menjalani hukuman mati sesuai dengan hukuman yang diberikan. Jadi kemarin juga di *crosscheck* lagi ke Kejaksaan Agung tapi biasanya Kejaksaan Agung sudah memberikan keterangan bahwa si A ini sudah dihukum sejak tahun sekian, biasanya gitu kan, udah puluhan tahun kan rata-rata dipenjaranya, kita dapat tuh *detail*-nya. Dan biasanya kita juga minta kalau kita enggak dapat, pengacaranya sudah mengajukan kasasi, udah mengajukan ini dan itu, udah semua nya, berarti udah lengkap data informasinya. Jika sudah oke, kita sampaikan ke media.”⁷⁹

Kepala Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi menegaskan bahwa segala informasi yang berhubungan secara substansial yang disampaikan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri selalu berdasarakan atas apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM, karena sebenarnya eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba tidak berhubungan secara langsung dengan Kementerian Luar Negeri, kecuali berhubungan dengan warga negara asing (WNA).

“Eksekusi hukuman mati itu bukan pekerjaan Kementerian Luar Negeri. Itu adalah pekerjaan Kementerian Hukum dan HAM dan segala pernyataan mengenai yang berhubungan secara substansial dengan hukuman mati misalnya kenapa dihukum mati, kapan dihukum mati, siapa yang menng hukum mati, itu semua adalah tupoksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami kenapa jadinya ikut ribet juga ke Kementerian Luar Negeri, karena ada warga negara asingnya. Tapi semua hal yang kami sampaikan di Kementerian Luar Negeri itu selalu berdasarakan atas apa yang disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkopohukam. Jadi kami tidak pernah membuat *statement* sendiri karena sebenarnya hukuman mati itu tidak berhubungan secara langsung dengan Kementerian Luar Negeri, kecuali kalau ada hal yang berhubungan dengan warga negara asing.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁸⁰ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Pada saat pemberian informasi tentang eksekusi hukuman mati, Kementerian Luar Negeri berusaha untuk menyampaikan informasi sebaik mungkin kepada media, menjelaskan kebijakan Indonesia kepada publik tentang eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba.

“Kita terbuka memberitahukan kepada media. Eksekusi hukuman mati ini akhirnya kita lakukan supaya ada efek jera. Itu yang disasar oleh Presiden RI. Supaya ada efek Jera. Dikasih tau kepada orang. Kalau kamu berani bawa itu narkoba ke Indonesia, kamu akan dihukum mati. Itu aja sudah menjadi strategi media. Kita tidak pernah menyembunyikan sama sekali bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan, karena yang sebenarnya yang kita cari adalah efek jera dari si hukuman mati itu.”⁸¹

Kepala Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi mengakui bahwa meskipun sudah berusaha menyampaikan informasi kepada media dan publik, tetap masih banyak penolakan-penolakan yang terjadi.

“Apakah ada impilkasinya? Tentu. Banyak sekali penolakan. KBRI kita itu di datengin orang-orang yang menyatakan bahwa kita tuh *savage*, biadab. Karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan hukuman mati itu biadab. Cuma tetap saja kita dar awal, hukum sudah menyatakan bahwa kalau bawa segini ke Indonesia, kamu dihukum mati.”⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁸² Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri



Gambar 4.6 Masyarakat Australia menggelar aksi protes di depan KBRI Canberra, Australia, memohon agar eksekusi mati dibatalkan

Sumber : CNN Indonesia <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429130639-113-50017/usai-eksekusi-kbri-australia-rilis-surat-imbauan-untuk-wni/>



Gambar 4.7 Masyarakat Filipina menggelar aksi protes di depan KBRI Manila, Filipina, memohon agar eksekusi mati dibatalkan

Sumber : Kompas

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/19325091/Kemenlu.Himbau.Negara.Lain.Hormati.Eksekusi.Mati.Gelombang.Ketiga>

Ketika pemberitaan tentang hukuman mati kepada narapidana narkoba ini tersebar kepada media massa dan publik, banyak sekali jurnalis asing yang ingin meliput ke Indonesia, seperti dari Brazil, Perancis, Filipina, Nigeria, dan Australia

yang ingin meliput ke Indonesia. Namun kebanyakan dari media tersebut adalah dari Australia. Kementerian Luar Negeri, melalui Direktorat Informasi dan Media memiliki tugas untuk melayani media-media yang akan meliput Indonesia. Salah satu pelayanan yang diberikan adalah penerbitan visa jurnalis. Kementerian Luar Negeri berupaya untuk memudahkan pelaksanaan jurnalistik kepada media-media asing untuk melakukan kegiatan peliputan.

“Saat *the words is out*. Kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah media asal Australia, karena ada dua warga negara yang dihukum mati. Jadi kalau ada jurnalis asing mau datang ke Indonesia, mereka itu diharuskan menggunakan visa kunjungan jurnlasitik. Itu nama visanya. Jadi ketika *the words is out*, banyak sekali warga negara, media asal Australia yang mendaftar untuk meliput saat-saat eksekusi hukuman mati tersebut. Gitu. Itu kita fasilitasi. Maksudnya kita fasilitasi adalah kita permudah dalam mengurus visanya. Mereka memberikan aplikasi, dalam hitungan hari, langsung kita setuju. Bahkan kita sudah wanti-wanti kepada kedutaan dan konsul jenderal kita di Australia bahwa kalau misalnya ada jurnalis-jurnalis yang mendaftar khusus untuk peliputan hukuman mati itu langsung dikasih visa.”⁸³

Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah menyembunyikan informasi terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narkoba di Indonesia. Namun, ideologi atau agenda yang dimiliki oleh setiap media berbeda-beda. Kementerian Luar Negeri menyadari media asing tentu akan lebih mendukung kepada negaranya masing-masing. Kementerian Luar Negeri juga menyadari bahwa tekanan media yang cukup tinggi, akhirnya ikut menimbulkan dampak pada hubungan diplomatik dengan beberapa negara seperti Brazil, Filipina, Perancis, dan

⁸³ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Australia. *Blow up* dari media-media asing yang lebih menyorot kepada isu HAM telah memberikan dampak besar kepada Indonesia.

“Balik lagi, kita tidak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan. Karena yang kita sasar adalah efek jera dari pengedar narkoba. Apakah kemudian semuanya baik-baik saja? Tentu tidak. Karena, yang perlu dipahami disini adalah bahwa setiap media memiliki agenda, bisa tertebak kalau misalnya media Australia pasti lebih pro kepada orang Australia. Tidak mungkin mereka pro terhadap pemerintah Indonesia, *which is* enggak mungkin. Jadi yang mereka gaungkan dari Australia adalah masalah HAM, masalah betapa Indonesia adalah negara barbar karena masih mengadakan atau melaksanakan hukuman mati. Bahkan berkat adanya tekanan dari media, dan masyarakat yang disetir ini. Pemerintah Australia sempat mengatakan bahwa dia mau menghentikan hubungan diplomatik dengan Indoensia. Sampai seperti itu pada dua bali nine ini. Tapi pemerintah kita tetap *confirm* nggak bisa, ini udah hukum di Indoensia. Kalau kamu seperti itu berarti kamu mencampuri urusan dalam negeri orang lain.”⁸⁴

Dengan banyaknya pro kontra terhadap kebijakan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri berupaya melakukan hal lainnya, seperti melakukan *media monitoring* untuk mengetahui banyaknya pemberitaan terkait eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba dari media nasional dan media asing. Kementerian Luar Negeri membuat media monitoring khusus terkait eksekusi hukuman mati, baik dari klipng media nasional, maupun matriks pemberitaan *online* media lokal, nasional dan media asing. Sebagai contoh, berdasarkan laporan khusus pantauan berita pasca hukuman mati terkait narkoba di Nusakambangan, Jawa Tengah Tanggal 29 April – 4 Mei 2015, diketahui bahwa pemberitaan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap 8 orang terpidana mati narkoba (termasuk

⁸⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

7 WNA) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu dini hari, 29 April 2015 sebagian besar mendapat respon yang negatif dari dunia Internasional, khususnya dari para pemimpin negara-negara yang warganya telah dijatuhi hukuman mati, PBB, dan lembaga-lembaga HAM Internasional.

Terhitung sejak pelaksanaan eksekusi tahap kedua terhadap 8 orang terpidana mati, pada tanggal 29 April s/d 4 Mei 2015, di media online terdapat 151 pemberitaan mengenai pelaksanaan hukuman mati tersebut. Terdapat 71 pemberitaan di media online nasional (berita positif=15; berita netral=51, berita negatif=5). Disamping itu, terdapat 80 pemberitaan di media online asing (berita positif=4; berita netral=49; berita negatif=27). Sementara itu pada periode yang sama di media cetak nasional terdapat 120 berita mengenai eksekusi mati; 8 berita bernada positif, 106 berita bernada netral, dan 6 berita bernada negatif. (Kementerian Luar Negeri, 2015: 10)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri sebagai pihak yang juga ikut terlibat dalam menyampaikan informasi terkait eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan banyaknya pemberitaan terhadap kasus ini, mencoba *manage* pemberitaan dari berbagai media yang ada.

“Masalah di Indonesia itu kan semua orang pingin ngomong. Hukuman mati itu kan juga dilaksanakan di Arab Saudi, Singapura, di Amerika dan sebagainya, tapi mereka tidak gembar gembor ngomong di media. Waktu eksekusi hukuman mati yang pertama itu kan *detail* informasinya, semua diajabarkan di media. Walaupun Presiden pun sudah ngomong bahwa yang boleh ngomong terkait hukuman mati itu hanya kementerian luar negeri, karena menyangkut beberapa orang asing dan juga jaksa agung. Tapi orang lain semua ngomong, polisi ngomong, semua ngomong, akhirnya itulah, beritanya itu banyak sekali dan terkait dengan orang asing, jadi mendapat perhatian banyak sekali dari media asing, sehingga kita sulit *manage* beritanya. Nah tahun ini kan sekarang enggak ada seperti itu, sekarang *staretki* media nya berbeda sekali, kemlu enggak banyak ngomong, padahal orang asingnya ada tiga dari empat yang di eksekusi hukuman mati. Yang kita lakukan tahun ini mudah-mudahan lebih kita *control*, saya pun enggak banyak ngomong. Tapi itu kan untuk mencegah keresahan. Karena intinya di dunia internasional itu negara maju khususnya, negara-negara *partner* kita itu tidak suka kita melakukan hukuman mati, karena mereka pandang

bahwa itu tidak sesuai dengan HAM. Walaupun itu tidak melanggar hukum internasional maupun nasional. Secara hukum tidak ada masalah, tetapi dari perspektif HAM-nya negara maju, bukan HAM-nya Indonesia atau negara timur, tetapi HAM-nya negara maju itu tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.”⁸⁵

Kementerian Luar Negeri juga melakukan langkah lain yaitu melibatkan media dalam negeri untuk membantu dalam memberikan informasi terkait eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba, sehingga media asing maupun publik internasional yang ingin mengetahui informasi eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba dapat mengakses informasi tersebut dari media-media nasional.

“Tapi apa yang kementerian luar negeri lakukan kita lakukan semacam ini, kita kan *monitoring*. Yang kita lakukan adalah kita *engaged* justru media yang ada dalam negeri kita. Kita *feed* mereka dengan semua informasi yang mereka ingin tahu, misalnya kenapa hukuman mati dilakukan, kenapa dijatuhkan hukuman mati, berapa lama nunggunya, prosesnya berapa lama, pengacaranya siapa, mereka dapat apa aja, kesempatan mereka apa aja, apakah mereka diperlakukan humanis disana. Itu semua informasi sudah kita jelaskan.”⁸⁶

Namun Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi juga menyadari bahwa media-media di Indonesia pun tidak seluruhnya mendukung kebijakan pemerintah Indonesia. Namun Kementerian Luar Negeri berupaya untuk dapat menjelaskan dengan baik kepada media-media nasional dan media asing terkait eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. Kementerian Luar Negeri ternyata cukup mendapat dukungan dari media-media nasional. Hal ini itu pun menjadi bantuan bagi Kementerian Luar Negeri

⁸⁵ Wawancara dengan Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri, 25 Agustus 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁸⁶ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

dalam memberikan informasi dan menjelaskan terkait eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba kepada media asing dan publik internasional.

“Beberapa dari media kita memang humanis gitu looh, kayak yang ‘kasian kan dihukum mati, memang kamu Tuhan’. Balik lagi, kalau misalnya kamu ngomong kaya gitu, yang justru dibalik sekarang adalah kalau kamu ngomong kaya gitu, gimana dengan orang-orang yang kena narkoba. Itu aja sih. Dengan adanya dua kubu yang berbeda, Terus terang kala itu, media nasional itu mendukung Pemri penuh. Jarang sekali saya menemukan media nasional yang tidak mendukung langkah pemri mengeksekusi hukuman mati untuk kasus narkoba. Yang diluar, tentunya friksi kan, tetapi justru karena media di Indonesia, media-media kita ini mendukung, mengerti akan langkah pemerintah. Mereka kan selalu mengeluarkan berita yang sama terus, mau enggak mau berita itu disadur oleh media asing, bahwa ini looh pendapat, masyarakat Indoensia. Karena sebenarnya yang ditampilkan media indoensia saat itu adalah bagaimana pendapat masyarakat Indoensia sendiri terhadap reaksi hukuman mati Dan ini tuh terpampang dalam berita-berita. Jadi mereka tuh, oh ini looh, itu looh. Jadi lama kelamaan ada media-media yang *mainstream* Australia waktu itu yang memahami bahwa kedua orang ini bersalah.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan observasi yang dilakukan peneliti pada mengembangkan strategi dalam strategi media ini dapat diketahui bahwa:

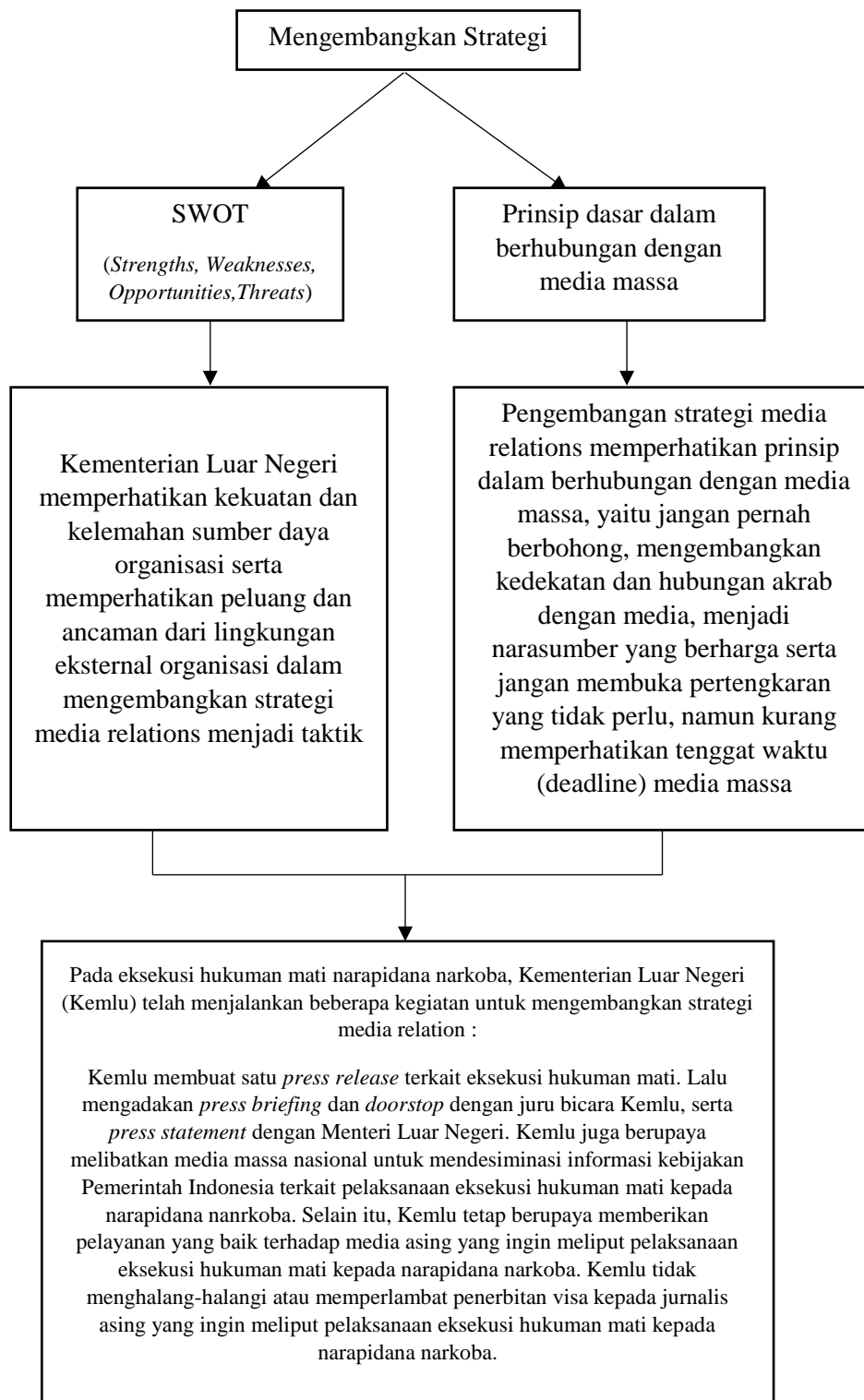
- a. Kementerian Luar Negeri mengembangkan strategi *media relations* untuk mencapai visi misi tujuan Kementerian Luar Negeri. Kegiatan *media relations* Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media, sehingga strategi *media relations* pun dikembangkan oleh Direktorat Informasi dan Media. Direktorat Informasi dan Media memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui

⁸⁷ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media.

- b. Kementerian Luar Negeri memperhatikan kekuatan dan kelemahan sumber daya organisasinya serta memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan ekseternal organisasi dalam mengembangkan strategi *media relations* menjadi taktik.
- c. Pengembangan strategi *media relations* yang dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Media tidak hanya memperhatikan SWOT, tetapi juga memperhatikan prinsip dalam berhubungan dengan media massa, yaitu jangan pernah berbohong, mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media, menjadi narasumber yang berharga serta jangan membuka pertengkaran yang tidak perlu. Namun, Kementerian Luar Negeri kurang memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa.
- d. Pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan beberapa kegiatan untuk mengembangkan strategi *media relations*. Kementerian Luar Negeri membuat *press release* terkait eksekusi hukuman mati. Lalu Kementerian Luar Negeri pun mengadakan *press briefing* dan *doorstop* dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengadakan *press statement* dengan menghadirkan menteri luar negeri sebagai narasumber. Kementerian Luar Negeri juga berupaya melibatkan media massa nasional untuk mendesiminasi informasi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. Selain itu,

pada kasus pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri tetap berupaya memberikan pelayanan yang baik terhadap media asing yang ingin meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. Kementerian Luar Negeri tidak menghalang-halangi atau memperlambat penerbitan visa kepada jurnalis asing yang ingin meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba.



Bagan 4.2 Mengembangkan Strategi pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

Sumber : Modifikasi Penulis

4.2.2 Pembahasan

Kementerian Luar Negeri mengembangkan strategi *media relations* untuk mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Luar Negeri. Direktorat Informasi dan Media mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media, sehingga strategi *media relations* pun dikembangkan oleh Direktorat Informasi dan Media. Direktorat Informasi dan Media merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri yang menjalankan fungsi dan peran *public relations* dalam Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan Renstra Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri 2015-2019, Direktorat Informasi dan Media memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media. Peran tersebut diantaranya adalah upaya meningkatkan pemberitaan positif oleh media tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Informasi dan Media berupaya untuk memberikan pemahaman terhadap publiknya, termasuk media asing melalui *media relations*.

Penting bagi PR untuk mengembangkan strategi menjalankan *media relations*. Strategi ini pada dasarnya adalah strategi untuk berkomunikasi dengan publik yang menjadi khalayak sasaran kegiatan komunikasi dengan publik yang menjadi khalayak sasaran kegiatan komunikasi dan relasi satu organisasi melalui praktik PR khususnya *media relations*. Strategi *media relations* merupakan

sekumpulan kebijakan dan taktik yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan *media relations* khususnya dan PR pada umumnya yang tentunya diacukan pada tujuan organisasi (Iriantara, 2011: 89-90).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Direktorat Informasi dan Media memiliki peran yang cukup penting untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Direktorat Informasi dan Media untuk mendukung penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan kualitas layanan dan penyebaran informasi serta kemitraan dengan media diantaranya adalah upaya meningkatkan pemberitaan positif oleh media tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. Untuk dapat memenuhinya, Direktorat Informasi dan Media melakukannya dengan menyelaraskan strategi, perencanaan, dan kinerja melalui upaya-upaya peningkatan kualitas konten portal situs dan media sosial Kemlu atau yang disebut juga sebagai '*digital diplomacy*', pengoptimalan kemitraan dengan media massa, serta peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berdasarkan data-based. Kebijakan Direktorat Informasi dan Media yang telah ditetapkan ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan untuk mencapai tujuan kegiatan *media relations* pada Kementerian Luar Negeri.

Dalam dunia *media relations* dikenal ada prinsip-prinsip yang kemudian sering menjadi acuan dalam menyusun taktik *media relations*. Prinsip tersebut

dinamakan Lima Prinsip Dasar yang menjadi pedoman dalam berhubungan dengan media massa, yakni : (1) Memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa, (2) Jangan pernah berbohong, (3) Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media, (4) Menjadi narasumber yang berharga, (5) Jangan membuka pertengkaran yang tak perlu. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan acuan dan dikembangkan menjadi taktik dalam *media relations*. Karena pada kelima prinsip tersebut ada dimensi teknis seperti memperhatikan tenggat waktu media massa; ada dimensi etis, yang tercermin dalam bicara jujur; ada juga dimensi hubungan manusiawi, dan yang terpenting integritas seorang PRO yang menjadi personifikasi organisasi di mata media dan publik. Prinsip tersebut juga menunjukkan bagaimana sebaiknya taktik-taktik dalam *media relations* kita kembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pada pelaksanaan *media relations*nya, Kementerian Luar Negeri memperhatikan prinsip-prinsip dalam berhubungan dengan media massa. Pada prinsip tidak pernah berbohong, Kementerian luar negeri selalu berusaha untuk memberikan fakta dan data yang paling benar saat menyampaikan informasi kepada media massa asing. Lalu pada prinsip mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab (*rapport*) dengan media. Kementerian Luar Negeri berusaha mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media massa, baik media massa nasional maupun asing. Sebelum pelaksanaan atau setelah pelaksanaan peliputan seperti pada *press briefing*, pejabat Kementerian Luar Negeri dapat saling berinteraksi dengan media massa, sehingga dapat saling bertukar informasi maupun pendapat. Selanjutnya, pada prinsip menjadi narasumber yang berharga. Kementerian Luar Negeri selalu berusaha

untuk memberikan informasi yang benar dan tepat sesuai dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri menunjuk seseorang untuk menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan *statement* yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri. Terakhir, pada prinsip jangan membuka pertengkaran yang tak perlu. Kementerian Luar Negeri selalu berusaha menjaga relasi dengan media massa. Kementerian Luar Negeri berusaha menunjukkan keramahan dengan para media massa, termasuk media asing dengan mengajak berbicara saat berjumpa di kegiatan *press briefing*, *media gathering*, Journalist Visit Program (JVP), dan Penyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM). Tetapi Kementerian Luar Negeri kurang memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa. Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, Titania Arimbi mengakui bahwa Kementerian Luar Negeri kerap kali dinilai tertutup dan lama dalam mengeluarkan pernyataan.

Jika mengacu pada pernyataan Iriantara, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Luar Negeri kurang memperhatikan dimensi teknis seperti memperhatikan tenggat waktu media massa. Padahal dimensi teknis tersebut merupakan salah satu pedoman dalam berhubungan dengan media massa. Kepala Biro Administrasi Menteri merangkap sebagai Juru Bicara Kemlu yang memiliki beban dan tanggung jawab besar untuk mengkomunikasikan posisi, arah dan kebijakan luar negeri Republik Indonesia baik secara domestik maupun Internasional. Hal ini berarti Kepala Biro Administrasi Menteri memiliki beban kerja yang lebih besar karena merangkap sebagai Juru Bicara Kemlu. Biro

Administrasi Menteri yang dipimpinya pun memiliki beberapa tugas tumpang tindih dengan unit operasional, misalnya dalam penyusunan bahan masukan atau tugas keprotokolan Menlu. Pada akhirnya, Dengan struktur yang ada, seringkali timbul *crosscutting* pelaksanaan tugas dengan unit-unit lain, seperti dengan Direktorat Informasi dan Media. Sehingga menimbulkan pelayanan media dan strategi *media relations* yang tidak optimal.

Menurut triangulator, Aria Nurfikry berdasarkan sudut pandang dari pakar komunikasi, adanya rangkap jabatan pada posisi juru bicara Kementerian Luar Negeri tidak terlalu masalah dan masih bisa disebut ideal, karena juru bicara merupakan orang yang dekat dengan pemimpin organisasi. Masih menurut triangulator, juru bicara organisasi hanya boleh satu orang, jika lebih dari satu orang dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Meskipun informasi yang diberikan oleh juru bicara satu dengan juru bicara lainnya, namun dengan cara penyampaian berbeda dan nada pembicaraan yang berbeda, dapat menimbulkan makna yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka Kementean Luar Negeri dapat membuat jabatan khusus kepada seseorang untuk posisi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas informasi.

Pada saat mengembangkan strategi *media relations*, Kementerian Luar Negeri tetap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya organisasi serta memperhatikan pula peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi. Hal ini tertuang pada matriks SWOT yang telah terdapat pada Renstra (Rencana Strategis) Direktorat Informasi dan Media.

Dengan demikian, dalam mengembangkan strategi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama-tama, tentulah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya organisasi. Lalu memperhatikan pula peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi. (Iriantara, 2011: 94)

Jika mengacu pada pernyataan Iriantara, maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah melakukan hal-hal untuk mengembangkan strategi *media relations* yaitu memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya organisasi serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi. Hal ini tertuang pada Renstra Direktorat Informasi dan Media.

Pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan beberapa kegiatan untuk mengembangkan strategi *media relations*. Kementerian Luar Negeri membuat satu *press release* terkait eksekusi hukuman mati. Lalu Kementerian Luar Negeri pun mengadakan satu kali *press briefing* untuk menanggapi bentuk protes yang dilakukan Pemerintah Belanda dan Brasil atas eksekusi mati terhadap warganya. Aksi protes itu dilakukan dengan memanggil pulang sementara duta besar kedua negara itu dari Indonesia. Setelah *press briefing*, media melakukan *doorstop* dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mengadakan *press statement* dengan menghadirkan menteri luar negeri sebagai narasumber. Kementerian Luar Negeri juga berupaya melibatkan media massa nasional untuk mendesiminasi informasi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. Selain itu, pada kasus pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri tetap berupaya memberikan

pelayanan yang baik terhadap media asing yang ingin meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba. Kementerian Luar Negeri tidak menghalang-halangi atau memperlambat penerbitan visa kepada jurnalis asing yang ingin meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba.

Menurut triangulator, Aria Nurfikry, dari sudut pandang pakar komunikasi, saat memberikan informasi kepada media, khususnya pada saat terjadinya sebuah isu besar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu informasi yang diberikan dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut. Ketika kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba tersebut terjadi, Kementerian Luar Negeri harus mempersiapkan pesan yang tepat dan menyebarkan pesan disaat yang tepat, akan lebih baik jika informasi terhadap isu tersebut disampaikan dengan jeda tidak lebih dari 24 jam. Masih menurut triangulator, Kementerian Luar Negeri sebaiknya mengundang media sebelum eksekusi hukuman mati narapidana narkoba tersebut terjadi dan langsung memberikan informasi setelah eksekusi hukuman mati narapidana narkoba tersebut terjadi. Kementerian Luar Negeri harus sudah memberi informasi sebelum media mengejar, jangan diam dan hanya menunggu. Kementerian Luar Negeri dapat melakukan press briefing bersamaan dengan Kejaksaan Agung saat memberikan informasi terkait eksekusi hukuman mati narapidana narkoba tersebut, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi karena terlalu banyak sumber atau lembaga negara yang berbicara. Selanjutnya menurut triangulator, juru bicara dapat melakukan *holding statement* ketika masih menunggu atas kroscek informasi. Setelah informasi final terverifikasi, juru bicara dapat memberikan informasi lebih lanjut. Dengan demikian, media tidak dibiarkan

untuk menebak-nebak atau berspekulasi atas informasi yang dibutuhkan, jangan pernah tidak memberikan informasi sama sekali kepada media.

Menurut Iriantra (2011: 91), mengembangkan strategi dilakukan untuk lebih memaksimalkan strategi-strategi yang sudah ada. Beberapa upaya pengembangan strategi dengan cara mengembangkan materi-materi PR untuk media massa, menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan kepada publik, membangun dan memelihara kontak dengan relasi baru, memosisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media massa, memosisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara di berbagai kegiatan, serta selalu berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam organisasi sehingga selalu mendapatkan informasi mutakhir.

Merujuk pada pernyataan Iriantara tersebut, Kementerian Luar Negeri pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, telah melakukan pengembangan strategi dengan cara mengembangkan materi-materi PR untuk media massa seperti memberikan press release kepada media massa nasional dan asing, namun hanya satu press release yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri,. Kementerian Luar Negeri juga menggunakan berbagai media untuk menyampaikan pesan kepada publik. Pesan tersebut berisi bahwa hukuman mati ini diterapkan untuk memberikan efek jera dan pencegahan yang maksimal terhadap kejahatan berat narkoba dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia serta hukuman mati di Indonesia tidak melanggar HAM dan hukum internasional. Media yang digunakan Kementerian Luar Negeri diantaranya melalui *press release* yang *di-posting* portal Kemlu, *press briefing* kepada media massa nasional dan asing, *doorstop* dengan juru bicara

Kementerian Luar Negeri dan *press statement* dengan Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri juga memosisikan organisasi sebagai sumber informasi handal untuk media massa, Kementerian Luar Negeri berusaha untuk memberikan fakta dan data yang ada untuk diberitahukan kepada media massa. Kementerian Luar Negeri juga berupaya memosisikan pimpinan organisasi sebagai juru bicara di berbagai kegiatan, seperti Menteri Luar Negeri untuk menjadi seseorang yang dapat dimintai keterangannya atas sikap Indonesia pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, namun dengan adanya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Arrmanatha Nasir sehingga media lebih banyak meminta keterangan atau konfirmasi berita dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri dibandingkan Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri pada kasus eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba selalu berkoordinasi dengan bagian-bagian lain dalam organisasi sehingga selalu mendapatkan informasi mutakhir, yaitu dengan Direktorat Konsuler.

4.3 Mengembangkan Jaringan pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

4.3.1 Hasil Penelitian

Kementerian Luar Negeri membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi seperti Kehumasan. Kementerian Luar Negeri membuka dan memperluas jaringan dengan organisasi humas pemerintah bernama Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah). Bakohumas adalah Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah, Lembaga Negara serta BUMN. Kementerian Luar Negeri merupakan anggota dari Bakohumas sejak berdirinya Bakohumas pada tanggal 13 Maret 1971.

“Kita memiliki jejaring dengan Bakohumas. Jadi di Indonesia ini punya yang namanya Bakohumas (Badan Koordinasi Humas). Sekretariat Bakohumas ada di Kominfo. Ketua Umum maupun Ketua Pelaksana organisasi Bakohumas ada di Kominfo. Di Kominfo ada Dirjen yang namanya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Dirjennya tersebut akan secara otomatis menjadi Ketua Bakohumas. Tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh instansi kehumasan yang di pemerintah, di setiap Kementerian Lembaga ada biro humas nya. Anggota Bakohumas ada 700an. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 700an Kementerian Lembaga, termasuk Direktorat Infomed. Setiap humas Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah adalah anggota Bakohumas.”⁸⁸

Sebagai anggota Bakohumas, Kementerian Luar Negeri merupakan termasuk anggota Bakohumas yang aktif. Kementerian Luar Negeri pernah menjadi salah satu pengurus Bakohumas pada tahun 2014, yang menjadi pengurus bakohumas saat itu adalah Direktur Informasi dan Media. Pada Kemnterian Luar Negeri yang membuka dan memperluas jaringan dengan Bakohumas adalah

⁸⁸ Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

Direktorat Informasi dan Media. Hal ini dilakukan karena Direktorat Informasi dan Media merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri yang menjalankan fungsi humas. Sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri aktif dalam menyelenggarakan forum Bakohumas. Forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri dilaksanakan selama satu hari penuh dengan menghadirkan narasumber seperti pejabat-pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (direktur jenderal, direktur dan duta besar).

“Setiap Kementerian/ Lembaga diberi kesempatan untuk menyelenggarakan suatu forum. Contohnya adalah Direktorat Informasi dan Media melalui subdit data media, setiap tahun menyelenggarakan forum Bakohumas. Jadi kita undang para anggota bakohumas dari berbagai macam Kementerian/ Lembaga/Pemerintah untuk datang, kumpul, terus di forum tersebut kita mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang luar negeri. Kemlu kan mengurus pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang luar negeri, politik luar negeri. Forum ini diadakan pasti setahun sekali, tetapi untuk waktunya bisa berubah-ubah, tergantung kita yang merencanakan. Damed (data media) mengalokasikan untuk pelaksanaan forum bakohumas.”⁸⁹

Sejak pertama kalinya diadakan forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri pada tahun 2006, hingga pada tahun 2013, forum tersebut selalu diadakan di Jakarta dan mengundang Kementerian/ Lembaga di tingkat pusat. Namun sejak tahun 2014, forum mulai diadakan di daerah untuk menjangkau pemerintah daerah. Pada forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri mengundang para pejabat humas daerah dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi untuk mengikuti forum ini. Tujuan dari pelaksanaan forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri ini adalah sosialisasi kebijakan dan hubungan luar negeri Indonesia dan sosialisasi kinerja Kementerian Luar Negeri.

⁸⁹ Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

“Sejak tahun 2014 mulai diadakan di daerah untuk menjangkau pemerintah daerah. Pada tahun 2014 kita mengadakan forum di Kalimantan Timur, tahun 2015 di Sulawesi Selatan, tahun 2016 kita mengadakan di Sumatera Selatan. Kalau kita mengadakan di daerah, tidak seluruh Kementerian kita undangan, kita fokus di pejabat humas pemerintah daerah. Kita menyadari bahwa *stakeholder* kita menyebar di seluruh Indonesia, kita perlu menjangkau pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah daerah juga perlu tahu tentang hubungan luar negeri kita. Pemerintah daerah akan mengetahui yang dikerjakan oleh Kemlu. Yang disosialisasikan seputar apa yang dikerjakan oleh Kemlu dalam melaksanakan politik dan hubungan luar negeri, bagaimana Kemlu menjalankan kebijakan pemerintah dalam hubungan luar negeri.”⁹⁰

Tidak hanya Kementerian Luar Negeri yang melakukan forum tersebut, Kementerian/ Lembaga lain pun menyelenggarakan serupa. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sekretariat. Bakohumas pun memiliki agenda tahunan untuk mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh pejabat humas Kementerian/ Lembaga. Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku sekretariat Bakohumas. Rapat koordinasi ini adalah forum bersilaturahmi serta ajang menjelaskan politik masing-masing untuk menemukan strategi optimal menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Menurut kepala subdit data media, Andi Syamsurijal Usman, Jika Kementerian/ Lembaga lain ada yang menyelenggarakan forum bakohumas, kerap kali Kementerian luar negeri diundang.⁹¹

Dengan bergabung pada Bakhumas, Kementerian Luar Negeri mendapat manfaat antara lain adalah membina jejaring Kerja.

⁹⁰ Wawancara dengan Andi Syamsurijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁹¹ Wawancara dengan Andi Syamsurijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

“Forum Bakohumas cukup efektif karena kita dapat membina jejaring kerja dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sehingga jika Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah ingin berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri saat ingin melakukan kesepakatan/ kerjasama dengan negara lain, mengetahui siapa yang harus dihubungi di Kementerian Luar Negeri.”⁹²

Selain membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi kehumasan, Kementerian Luar Negeri juga memperluas jaringan melalui organisasi profesi kewartawanan. Pada media asing, Kementerian Luar Negeri memiliki kontak dengan organisasi profesi kewartawanan media asing yaitu Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC), namun Kementerian Luar Negeri tidak memasuki organisasi ini. Menurut Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media Raksa Ibrahim mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki hubungan baik dengan JFCC ini. Biasanya tiap tahun mereka ganti kepemimpinan. Mereka sifatnya *loose*. JFCC cuma forum untuk kumpul-kumpul dan *sharing*, forum untuk mendekatkan koresponden dengan tokoh-tokoh di Indonesia.⁹³ Kementerian Luar Negeri pernah beberapa kali diundang sebagai panelis di acara JFCC. Pada tanggal 16 April 2016, mantan menteri luar negeri, Marty Natalegawa diundang sebagai panelis pada acara JFCC “*Panel Discussion on Foreign Policy under Jokowi*”

⁹² Wawancara dengan Andi Syamsulrijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, 26 Juli 2016, di Kantor Kementerian Luar Negeri

⁹³ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri



Gambar 4.8 Marty Natalegawa menjadi panelis pada JFCC "Panel Discussion on Foreign Policy under Jokowi"

Sumber : Jfcc Info http://www.jfcc.info/jfcc_content.php?nav=pdc&c=1279

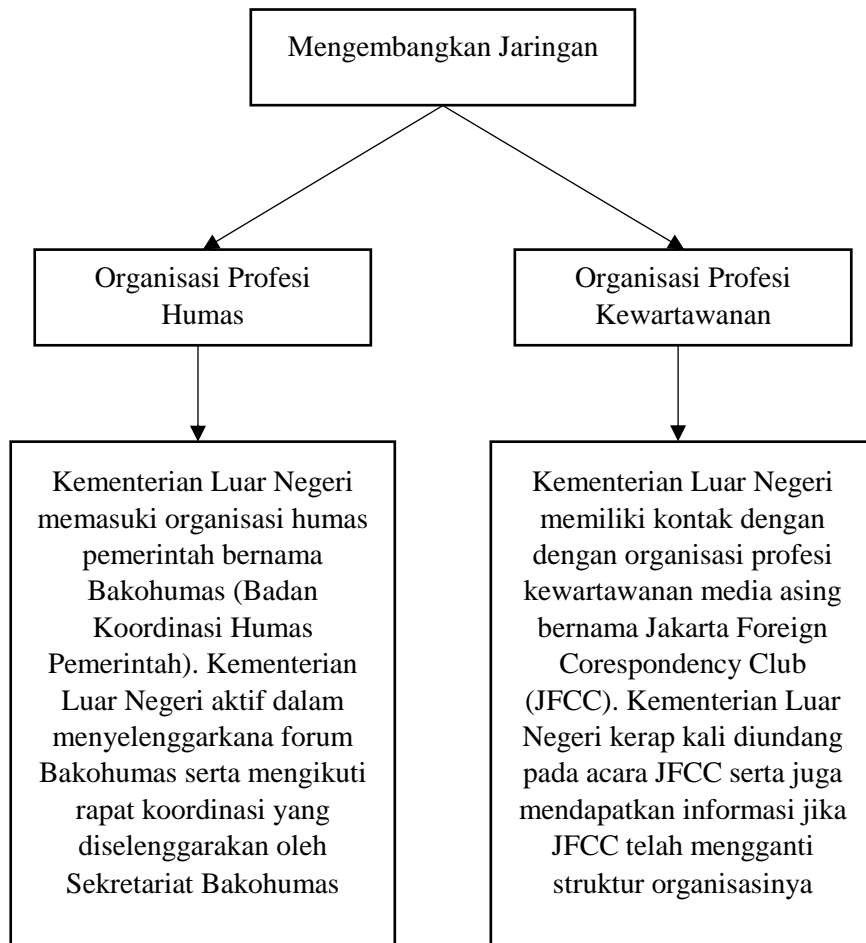
Lalu menurut Kepala Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Titania Arimbi menambahkan bahwa Kementerian Luar Negeri tau dan kenal dengan JFCC, tetapi kita bukan bagian dari JFCC ini. Karena organisasi ini memang organisasi para wartawan media asing. Tetapi tetap saja kita punya hubungan baik dengan mereka.⁹⁴

Kementerian Luar Negeri mengetahui tentang adanya komunitas atau paguyuban seperti Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC). Melalui membuka dan memperluas jaringan dengan koresponden media asing, Kementerian Luar Negeri terbantu untuk dapat melacak para korseponden media asing yang masih bekerja atau tidak.

⁹⁴ Wawancara dengan Titania Arimbi, Kasi Akreditasi Media Asing, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 20 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dan observasi yang dilakukan peneliti pada mengembangkan jaringan dalam strategi media ini dapat diketahui bahwa:

- a. Kementerian Luar Negeri membuka dan memperluas jaringan dengan organisasi humas pemerintah bernama Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah). Kementerian Luar Negeri pernah menjadi salah satu pengurus Bakohumas pada tahun 2014, yang menjadi pengurus Bakohumas saat itu adalah Direktur Informasi dan Media.
- b. Sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri aktif dalam menyelenggarakan forum Bakohumas. Forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri dilaksanakan selama satu hari penuh dengan menghadirkan narasumber seperti pejabat-pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (direktur jenderal, direktur dan duta besar). Tujuan dari pelaksanaan forum Bakohumas Kementerian Luar Negeri ini adalah sosialisasi kebijakan dan hubungan luar negeri Indonesia dan sosialisasi kinerja Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri juga aktif mengikuti rapat koordinasi yang selenggarakan oleh sekretariat Bakohumas.
- c. Kementerian Luar Negeri juga membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi kewartawanan. Pada media asing, Kementerian Luar Negeri memiliki kontak dengan organisasi profesi kewartawanan media asing yaitu Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC). Kementerian Luar Negeri kerap kali diundang pada acara JFCC serta juga mendapatkan informasi jika JFCC telah mengganti struktur organisasinya.



Bagan 2.3 Mengembangkan Jaringan pada Strategi *Media Relations* Kementerian Luar Negeri Indonesia

Sumber : Modifikasi Penulis

4.3.2 Pembahasan

Kementerian Luar Negeri membuka dan memperluas jaringan dengan organisasi humas pemerintah bernama Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah). Kementerian Luar Negeri pernah menjadi salah satu pengurus Bakohumas pada tahun 2014, yang menjadi pengurus Bakohumas saat itu adalah Direktur Informasi dan Media. Pada Kementerian Luar Negeri yang membuka dan memperluas jaringan dengan Bakohumas adalah Direktorat Informasi dan Media. Hal ini dilakukan karena Direktorat Informasi dan Media merupakan bagian dari Kementerian Luar Negeri yang menjalankan fungsi humas.

Mengembangkan jaringan merupakan aspek pokok dalam *media relations* organisasi. Salah satu kunci untuk membuka pintu jaringan relasi tersebut adalah dengan menjalin relasi melalui organisasi profesi, seperti kehumasan. (Iriantara, 2011: 94) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kementerian Luar Negeri telah membuka jaringan dengan Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas). Kementerian Luar Negeri pernah menjadi salah satu pengurus Bakohumas pada tahun 2014. Sejak tahun 2006, Kementerian Luar Negeri aktif dalam menyelenggarakan forum Bakohumas yang mengundang humas-humas dari Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah daerah. Melalui forum Bakohumas ini, Kementerian Luar Negeri ini dapat melakukan sosialisasi kebijakan dan hubungan luar negeri Indonesia dan sosialisasi kinerja Kementerian Luar Negeri.

Menurut Ruslan, fungsi *public relations* antara lain adalah sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi (Kementerian Luar Negeri) dengan

publiknya, serta membina *relationship* yang artinya membangun hubungan yang positif dan baik dengan publik sebagai target sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Informasi dan Media menjalankan fungsi *public relations* terbukti dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini, humas pemerintah daerah maupun humas dari kementerian/ lembaga lain berupa informasi kebijakan dan hubungan luar negeri Indonesia yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif. Direktorat Informasi dan Media menjalankan fungsi *public relations* yaitu membina *relationship* melalui hubungan yang positif dan baik dengan ummas pemerintah daerah maupun humas dari kementerian/ lembaga lain.

Kementerian Luar Negeri juga aktif mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rapat koordinasi ini adalah forum bersilaturahmi serta ajang menjelaskan politik masing-masing untuk menemukan strategi optimal menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Namun rapat koordinasi ini hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun sehingga kurang memberikan dampak kepada anggota Bakohumas seperti Kementerian Luar Negeri. Namun Kementerian Luar Negeri merasakan manfaat lain dari forum Bakohumas, yaitu membina jejaring kerja dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sehingga jika Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah ingin berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri saat ingin melakukan kesepakatan/ kerjasama dengan negara lain, mengetahui siapa yang harus dihubungi di Kementerian Luar Negeri.

Membuka dan memperluas jaringan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan media massa (Iriantara, 2011: 95) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui Kementerian Luar Negeri juga membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi kewartawanan. Pada media asing, Kementerian Luar Negeri memiliki kontak dengan organisasi profesi kewartawanan media asing yaitu Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC), namun Kementerian Luar Negeri tidak memasuki organisasi ini atau bukan bagian dari organisasi ini.

Kementerian Luar Negeri hanya membuka jaringan dengan JFCC, namun tidak bergabung dengan JFCC sebagai anggota organisasi, karena JFCC merupakan organisasi khusus yang mewadahi para koresponden media asing. Kementerian luar Negeri memiliki hubungan baik dengan JFCC.

Kementerian Luar Negeri kerap kali diundang jika JFCC memiliki acara, serta Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan informasi jika JFCC telah mengganti struktur organisasinya. Menurut Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan media, Raksa Ibrahim mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri memiliki hubungan baik dengan JFCC ini. Biasanya tiap tahun mereka ganti kepemimpinan. Mereka sifatnya *loose*. JFCC cuma forum untuk kumpul-kumpul dan *sharing*, forum untuk mendekatkan koresponden dengan tokoh-tokoh di Indonesia.⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri, 21 Juli 2016 di Kantor Kementerian Luar Negeri

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari wartawan media asing, ABC yang menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri pernah diundang dalam acara yang diselenggarakan oleh JFCC sebagai panelis.

“Sekali-sekali kita undang Kementerian Luar Negeri juga. Kalau kita undang, ya berarti sebagai panelis. Kalau enggak, biasanya kita *e-mail blast* aja ke semua pihak kalau kita bikin acara gini, siapa aja yang mau datang ya, boleh saja. Tapi dulu kita pernah undang Pak Marty juga. Lalu kita juga pernah mengundang salah satu direktur di Kementerian Luar Negeri untuk menjadi panelis mengenai terorisme di acara JFCC.”⁹⁶

Keikutsertaan Kementerian Luar Negeri pada acara JFCC menunjukkan peran Kementerian Luar Negeri yang penting pada pemerintahan Indonesia, namun keikutsertaan Kementerian Luar Negeri ini masih kurang frekuensinya. Karena dengan frekuensi yang lebih meningkat akan meningkatkan publisitas Kementerian Luar Negeri kepada media asing, sehingga informasi yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia akan lebih dipahami oleh media asing.

Menurut triangulator, Aria Nurfikry, dari sudut pandang pakar komunikasi, kontak yang dilakukan oleh organisasi kepada organisasi wartawan dapat dilakukan dengan melakukan makan bersama atau kumpul bersama dengan organisasi wartawan tersebut. Organisasi perlu kenal dekat dan menjalin hubungan baik kepada para orang-orang penting organisasi, sehingga jika organisasi akan menyampaikan suatu informasi kepada wartawan-wartawan dan belum memiliki kontak dari wartawan tersebut, dapat menghubungi atau bertanya kepada para orang-orang penting organisasi. Kontak dengan organisasi wartawan tidak hanya

⁹⁶ Wawancara dengan Archicco, wartawan media asing ABC, 10 Agustus 2016 di Grand Indonesia

berarti memiliki nomor telepon atau email dari organisasi wartawan, tetapi juga membangun networking dengan organisasi wartawan itu sendiri.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh simpulan mengenai strategi *media relations* kementerian luar negeri Indonesia di mata media asing pada kasus eksekusi hukuman mati narapidana narkoba. Strategi *media relations* yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri adalah:

1. Pada pengelolaan relasi, Kementerian Luar Negeri menyadari berhubungan atau berelasi dengan media merupakan hal penting. *Media relations* Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh dua unit satuan kerja, yaitu Direktorat Informasi dan Media yang mengurus *maintenance media relations*, sedangkan Biro Administrasi Menteri yang mengurus isi informasi pada *press release* dan isi informasi yang akan disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Kepala Biro Administrasi Menteri menjadi juru bicara Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini memiliki standar penyampaian informasi dalam menyampaikan informasi dari organisasi kepada publiknya. Kementerian Luar Negeri tidak melakukan perbedaan *treatment* kepada media nasional maupun media asing. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi dengan media sebagai

institusi diantaranya melakukan pelayanan prosedural dan pelayanan bahan peliputan. Kementerian Luar Negeri mengelola relasi dengan wartawan sebagai pekerja media diantaranya kumpul bersama untuk bertukar informasi atas keteratrikan yang sama atau hobi. Kementerian Luar Negeri melakukan penyusunan daftar media, namun tidak ada klasifikasi khusus pada daftar media seperti wilayah atau *platform* (cetak, elektronik atau online). Selain menyusun daftar kontak media sebagai *database* Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri juga memberikan daftar kontak pihak-pihak yang bisa dihubungi oleh media massa dan wartawan untuk memudahkan wartawan atau media massa untuk berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri seperti nomor juru bicara Kementerian Luar Negeri, nomor menteri luar negeri, dan nomor Direktorat Informasi dan Media.

2. Pada pengembangan strategi, strategi *media relations* dikembangkan oleh Direktorat Informasi dan Media. Dalam mengembangkan strategi *media relations*, Kementerian Luar Negeri memperhatikan kekuatan dan kelemahan sumber daya organisasinya serta memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi dalam mengembangkan strategi *media relations* menjadi taktik. Tidak hanya memperhatikan SWOT, tetapi juga memperhatikan prinsip dalam berhubungan dengan media massa, yaitu jangan pernah berbohong, mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media, menjadi narasumber yang berharga serta jangan membuka pertengkaran yang tidak perlu. Namun, Kementerian

Luar Negeri kurang memperhatikan tenggat waktu (*deadline*) media massa. Pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan beberapa kegiatan untuk mengembangkan strategi *media relations*. Kementerian Luar Negeri membuat satu *press release* terkait eksekusi hukuman mati. Lalu Kementerian Luar Negeri pun mengadakan *press briefing* dan *doorstop* dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengadakan *press statement* dengan Menteri Luar Negeri, melibatkan media massa nasional untuk mendesiminasikan informasi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba, Kementerian Luar Negeri juga berupaya melayani media asing yang ingin meliput pelaksanaan eksekusi hukuman mati narapidana narkoba, dengan tidak memperlambat penerbitan visa kepada jurnais media asing yang ingin meliput kejadian tersebut.

3. Pada pengembangan jaringan, Kementerian Luar Negeri membuka dan memperluas jaringan dengan bergabung pada organisasi humas pemerintah bernama Bakohumas (Badan Koordinasi Humas Pemerintah). Kementerian Luar Negeri aktif dalam menyelenggarakan forum Bakohumas serta mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh sekretariat Bakohumas. Kementerian Luar Negeri juga memiliki kontak dengan organisasi profesi kewartawanan media asing bernama Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC). Kementerian Luar Negeri kerap kali diundang pada acara JFCC serta juga mendapatkan informasi jika JFCC

telah mengganti struktur organisasinya, namun baru beberapa kali diundang menjadi panelis pada acara yang diadakan JFCC.

5.2 Saran

1. Pada pengelolaan relasi, Kementerian Luar Negeri sebaiknya lebih memperhatikan untuk mengelola relasi dengan wartawan media asing. Kementerian Luar Negeri harus berusaha untuk lebih berkomunikasi secara intens dengan wartawan media asing saat media asing datang ke Kementerian Luar Negeri seperti saat *press briefing* mingguan, sehingga kedekatan yang terjalin secara individual lebih baik. Kementerian Luar Negeri sebaiknya menyusun daftar media dengan memperhatikan aspek-aspek seperti jenis khalayak media, cakupan media, dan level media, sehingga dapat mengetahui daftar media yang secara potensial bisa dijadikan media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri.
2. Pada mengembangkan strategi, Kementerian Luar Negeri perlu memperhatikan prinsip berhubungan dengan media massa yaitu memperhatikan *deadline* media massa. Kementerian Luar Negeri sebaiknya membuat kebijakan tentang juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu dengan menunjuk seseorang yang hanya bertugas sebagai juru bicara, sehingga jika ada wartawan yang membutuhkan konfirmasi atas suatu isu dari pihak Kementerian Luar Negeri, akan mendapatkan konfirmasi atau pernyataan dengan cepat. Wartawan media asing tidak perlu lagi menilai jika Kementerian Luar Negeri tidak cepat tanggap dalam memberikan pernyataan.

3. Pada mengembangkan jaringan, Kementerian Luar Negeri dapat lebih aktif berkomunikasi dengan Jakarta Foreign Correspondency Club (JFCC) sehingga Kementerian Luar Negeri mendapat kemungkinan dan berpeluang untuk menjadi panelis dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh JFCC. Ini merupakan peluang bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan publisitas serta mensosialisasikan politik luar negeri dan kinerja Kementerian Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Iriantara, Yosol. 2011. *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Jefkins, Frank. 2015. *Public Relations*. Jakarta: Airlangga
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Erlangga
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinaro. 2015. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardhani, Diah. 2010. *Media Relations : Sarana Membangun Reputasi Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumber Internet:

Arisandy, Yuni. *Kata Kemlu Soal Tekanan Negara Lain Atas Kasus Eksekusi Hukuman Mati*. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016 pukul 10.20 dari <http://www.antaraneews.com/berita/482180/kata-kemlu-soal-tekanan-negara-lain-atas-kasus-hukuman-mati>

Kementerian Luar Negeri. *PTRI New York: Hukuman Mati Di Indonesia Tidak Langgar HAM dan Hukum Internasional*. Diakses pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 13.36 dari <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/PTRI-New-York-Hukuman-Mati-Di-Indonesia-Tidak-Langgar-HAM-dan-Hukum-Internasional.aspx>

Mandey, Adrianus. (2015). *Eksekusi Mati di Tengah Tekanan Dunia*. Diakses. Diakses pada tanggal 6 April 2016 pukul 17.29 dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/620072-eksekusi-mati-di-tengah-tekanan-dunia>

Maharani, Esthi. (2015). *Tedjo: Media Asing Bentuk Opini Indonesia Pelanggar HAM*. Diakses pada tanggal 6 April 2016 pukul 19.15 dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/09/nkxpg7-tedjo-media-asing-bentuk-opini-indonesia-pelanggar-ham>

Wahyuni, Natasia Christy (2015). *Hukuman Mati, Perwakilan dari 5 Negara Bungkam Usai Pertemuan dengan Kemlu*. Diakses pada tanggal 6 April 2016 pukul 21.42 dari <http://www.beritasatu.com/nasional/249677-hukuman-mati-perwakilan-dari-5-negara-bungkam-usai-pertemuan-dengan-kemlu.html>

Sumber Lainnya:

Kementerian Luar Negeri. 2015. *Laporan Khusus Pantauan Berita Pasca Hukuman Mati Terkait Narkoba Di Nusakambangan, Jawa Tengah Tanggal 29 April–4 Mei 2015* (p.10). Jakarta: Kemlu

Kementerian Luar Negeri. 2015. *Laporan Kinerja Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik TA 2015* (p.3). Jakarta: Kemlu

Kementerian Luar Negeri. 2015. *Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia 2014* (p.22). Jakarta: Kemlu

Kementerian Lyar Negeri. 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kementerian Luar Negeri* (pp.1-2). Jakarta: Kemlu

Kementerian Luar Negeri. 2015. *Rencana Strategis Direktorat Informasi dan Media 2015-2019* (p.3). Jakarta: Kemlu

PEDOMAN WAWANCARA

Mengelola Relasi

1. Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?
2. Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?
3. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?
4. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?
5. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?
6. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

7. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?
8. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?
9. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan) ?
10. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?
11. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?
12. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing dan wartawan pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Mengembangkan Strategi

13. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations* pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?
14. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk

- pengembangan strategi *media relations* pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?
15. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?
 16. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?
 17. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?
 18. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?
 19. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Mengembangkan Jaringan

20. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?
21. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?
22. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa

Profil Informan 1

Titania Arimbi, merupakan Informan pertama yang memiliki jabatan selaku Kasi Akreditasi Media, Subdit Fasilitas Media, Direktorat Informasi dan Media. Proses wawancara dengan *Key Informant* 1 berlangsung selama 90 menit dan 20 detik di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, mulai pukul 13.10. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Kamis dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

- 1. Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya. saat berhubungan dengan media ada dua pihak yang ikut terlibat, yaitu BAM (Biro Administrasi Menteri) dan Direktorat Informasi dan Media. Direktorat Informasi dan Media. Kita memiliki standar operasi seperti bentuk pembagian tugas antara dua pihak ini.

- 2. Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

BAM dan Infomed bekerja secara berkesinambungan as a team. On the daily basis, Infomed dalam hal ini fasmed (fasilitas media) yang mengurus tentang kebutuhan media atau jurnalis. Teman-teman jurnalis kalau ada apa-apa, akan menghubungi infomed. Tetapi kalau mereka mencari berita, mereka akan ke pak Tata sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri daripada ke Ibu Sofie sebagai Direktur Infomed. Pak Tata ini juga merupakan Kepala Biro Administrasi Menteri. Dalam penyampaian informasi ke publik ada jejak penyaringannya, apa yang perlu disampaikan kepada publik, apa yang tidak perlu disampaikan akan dibahas sebelum benar-benar di-*publish*. Kita akan melakukan penyaringan hingga tiga kali untuk memastikan informasi yang akan di-*publish* merupakan informasi yang benar. Jika ada isu, unit terkait berkoordinasi dengan BAM nanti BAM menyampaikan kepada Infomed, kita bantu untuk *finishing* dan mem-*publish*-nya. Strategi relasi dengan media itu infomed. Tapi kita kan bekerja beriringan. Jadi kita sama-sama merumuskan apakah isu ini kita ingin redam atau kita ingin blow-up.

- 3. Jadi seluruh informasi itu datangnya dari BAM atau dari unit?**

Kita mengklasifikasikan informasi menjadi dua, yaitu informasi biasa dan informasi sensitif. Informasi biasa contohnya perayaan HUT RI di KBRI Tokyo. Informasi biasa itu yang bikin unit terkait, lalu berdasarkan permintaan, kita sebar ke media, baik melalui email blasting, maupun portal kemlu, twitter kemlu, facebook kemlu. Isu bersifat sensitif seperti bom di

prancis, unit terkait Eropa barat bekerjasama dengan BAM, meramu siaran pers, setelah draft jadi diperlihatkan kepada ibu menlu langsung atau paling tidak ke wamenlu. Setelah di acc untuk terbit, baru akan disampaikan ke Infomed untuk kami lihat kembali untuk pengecekan apakah ada typo, ada salah nama. Jadi itu tugasnya infomed untuk approve terakhir. Kalau di Infomed, saat di check ada yang salah, akan di balikkan kembali ke BAM sekaligus diberikan catatan “apakah ini sudah benar?” jika sudah benar, maka akan di blast oleh infomed lewat e-mail atau portal Kemlu. Jika ada *press briefing*, maka akan disampaikan oleh Pak Tata. Tetapi jika hal tersebut dirasa penting sekali maka Ibu Menlu yang akan langsung berbicara. Kalau ibu menlu yang berbicara, maka namanya akan menjadi press-statement.

4. **Apa perbedaan pelaksanaan press briefing dengan press statement itu?**
Press statement yaitu ibu menlu datang, memberikan statement, tanpa tanya jawab, ibu langsung keluar. Sedangkan, press-briefing yaitu jubar datang, memberikan statement, ada tanya jawab sekitar 2-3 pertanyaan, jubar keluar. Perlu diketahui, Kemlu memiliki satu kebijakan yaitu bahwa seluruh statement yang mengatasnamakan kementerian luar negeri akan dikeluarkan oleh Pak Arramanatha Natsir (Pak Tata). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir salah informasi.
5. **Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?**
Ya, kita punya daftar kontak media. publik kementerian luar negeri sendiri, menurut saya pribadi, isu-isu luar negeri biasanya dibaca orang yang paling tidak memiliki pendidikan setara dengan s1 atau memiliki ketertarikan tentang isu internasional. Isu luar negeri biasanya ada di media nasional. Media cetak mainstream yang sering dibaca. Karena demikian itulah, daftar kontak media, kami sesuaikan.
6. **Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?**
Daftar media kita kelompokkan menjadi dua yaitu media nasional dan media asing. Hanya itu. Berisi nama, nomor kontak, email, foto.
7. **Biasanya datanya di-update berapa bulan sekali?**
Diperbaharui untuk media nasional per tiga bulan untuk mengecek apakah wartawan tersebut masih di kemlu atau sudah pindah kerja, media asing diperbaharui 1 bulan sekali, tapi untuk keseluruhan data diperbaharui 6 bulan sekali.
8. **Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?**

Media yang ingin menghubungi Kemlu untuk mencari berita atau mengkonfirmasi berita bisa langsung menghubungi nomor Jubir dan Menlu. Tetapi disaat mereka ingin mengurus untuk peliputan bisa langsung menghubungi Infomed. Kita tidak membagi secara langsung nomor kontak pejabat tetapi kita menciptakan suatu moment yang bisa mempertemukan antara orang-orang penting di kemlu seperti pejabat eselon 1 dan 2 dengan wartawan, misalkan melalui *press briefing*, media gathering atau PTPM. Di moment tersebut, wartawan bisa langsung berinteraksi dengan pejabat-pejabat Kemlu sehingga bisa langsung saling bertukar kontak yang dibutuhkan seperti nomor handphone atau email

9. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Enggak ada, tidak ada perbedaan treatment antara media nasional dan media asing. Tapi kita tetap berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada mereka.

10. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Juru bicara, Menlu, Wamenlu, Pejabat Tinggi Kemlu eselon 1 dan eselon 2, Infomed. Pejabat Kemlu itu mengerti bahwa mereka harus mempunyai hubungan baik dengan media. Semua dari kita ini mengerti bahwa hubungan dengan media is a must. Karena bagaimana Kemlu bisa memberitahukan kepada masyarakat apa yang Kemlu lakukan, yaa salah satu caranya lewat media. Dan karena itu ada hubungan saling menguntungkan, mereka butuh berita, kita butuh mereka. Jadi secara tidak langsung, semua berusaha untuk maintenance hubungan.

11. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?

Jadi wartawan asing yang datang ke Indonesia, perlu perizinan untuk kerja di Indonesia, kita coba dukung, kita bantu dengan memberikan surat rekomendasi untuk izin kerja dan tinggal di Indonesia. Jika mereka perlu dan membutuhkan, kita juga buat kartu press sebagai bagian dari pelayanan kita, semua syarat tersebut kita berikan secara cuma-cuma. Dengan kartu press tersebut, menandakan bahwa mereka sudah diverifikasi oleh Kemlu dan menunjukkan bahwa mereka benar adalah wartawan asing serta meliput kegiatan-kegiatan di Kemlu. Kita juga memberikan pelayanan terpadu di gedung Kemlu dekat gedung konsuler, agar pelayanan makin terintegrasi dengan baik. Ibu menlu juga mengajak koresponden media asing untuk makan bareng terus disitu mereka ngobrol dengan nyaman tentang berbagai isu yang berkembang, sifatnya off the record, mereka menjadi tau pandangan pejabat kemlu dan kemlu pun menjadi tau arah tulisan dari para media asing.

12. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?

Pejabat Kemlu seluruhnya melakukan hubungan dengan media. Tidak harus selalu bagian humas yang me-maintenance untuk hubungan pribadi dengan media. Seluruh pejabat Kemlu diberi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan media manapun dan kepada wartawan siapapun.

13. Bagaimana pejabat Kemlu menjalin hubungan dengan media itu?

Secara personal, pejabat kementerian luar negeri juga sering mengundang para jurnalis pos kemlu untuk bincang-bincang santai sambil ngopi ataupun makan siang/malam. Bincang santai ini off the record yang bertujuan untuk memberikan background info atas sebuah isu yang sensitif.

14. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Enggak ada tim khusus jika menangani suatu kasus. Sama aja yang kita lakukan untuk semua kasus. Yang mengerjakan Infomed dan BAM lagi.

15. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Infomed dan bagian konsuler jika mereka ingin membuat visa, ijin untuk peliputan. Kalau ingin mencari berita, bisa menghubungi Pak Tata selaku jubir Kemlu.

16. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Itu ada di renstra yaa. Tapi menurut aku, untuk kekuatannya, Kemlu ini kan punya portal dan medsos seperti twitter dan facebook. Jadi kita bisa sebar informasi lewat situ. Kalau dr kelemahan, kita lemah dari sisi SDM-nya, karena pekerjaan banyak, tapi orangnya sedikit.

17. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Itu juga ada di renstra. Menurut aku, Kemlu ini cukup dipercaya oleh media, karena kita selalu memberikan informasi yang benar sesuai fakta yang ada. Kementerian Luar Negeri suka dinilai tertutup dan lama dalam mengemukakan pernyataan. Tapi sekali pernyataan tersebut keluar dari Kementerian Luar Negeri, akan dipercaya karena kemungkinan besar informasi itu benar. Kementerian Luar Negeri selalu melakukan cross check informasi hingga diyakini benar. Kita tidak mungkin menarik press release atau pernyataan yang telah diucapkan oleh pejabat kita sendiri. Tetapi, juga masih banyak media yang menulis berita tidak berimbang jadi suka salah persepsi. Tapi yaa setiap media juga kan punya agenda sendiri-sendiri.

18. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

Menyampaikan apa yang perlu disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-ngurangi, harus sesuai porsinya, menyampaikan sesuatu yang akurat, misalnya fakta tentang kriminalitas di Indonesia.

19. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kita biasanya melihat evaluasi dari tahun sebelumnya. Kita lihat mana yang kurang dan yang perlu diperbaiki.

20. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kebijakan, untuk memastikan adanya ketepatan dalam pengutipan, SOP yang berlaku adalah hanya jubar atau menlu atau pejabat tinggi kemlu yang memiliki kewenangan untuk menangani isu tertentu. Kalau bentuk kegiatan gitu, setiap tahun kita mengadakan beberapa kegiatan seperti *press briefing* mingguan, *media gathering*, *journalist visit program* dan *PPTM*. Tujuan *press briefing* Kemlu adalah Untuk menginformasikan kegiatan yang akan dan atau yang telah dilaksanakan oleh Kemlu. *Press briefing* juga dimaksudkan untuk menginformasikan isu-isu terkini ataupun hal-hal penting yang berhubungan dengan politik luar negeri yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. *Press briefing* dilaksanakan mingguan yang dipimpin langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Arrmanatha Nasir. Ketika akan melaksanakan *press briefing*, akan diidentifikasi isu-isu penting ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu tersebut untuk kemudian dibuat summary bagi media. BAM/Unit terkait akan menyiapkan bahan substansi yang akan disampaikan kepada media. Sementara itu, Infomed akan menyiapkan logistik, undangan dan pengaturan jurnalis/jadwal wawancara.

21. Bagaimana dengan *media gathering*? Kapan dilaksanakan *media gathering*?

Media gathering dilaksanakan untuk isu-isu khusus ataupun pelaksanaan event internasional yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari media. *Media gathering* biasanya dilaksanakan menjelang acara/events dengan mengundang narasumber khusus (diluar jubar kemlu) yang menangani langsung acara. Contohnya Mantan Menlu RI, Hassan Wirajuda untuk Bali Democracy Forum.

22. Bagaimana dengan kegiatan JVP dan PPTM?

Kegiatan selama JVP adalah mengunjungi UKM, mengunjungi Pemda untuk melihat potensi daerah, mengunjungi pegiat pariwisata dan masyarakat local serta mengunjungi tempat wisata. PPTM dilaksanakan

awal tahun, mengundang media nasional dan media asing serta dubes negara lain.

23. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kita melakukan media monitoring terkait kasus tersebut. Kita juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Eksekusi hukuman mati itu bukan pekerjaan Kementerian Luar Negeri. Itu adalah pekerjaan Kementerian Hukum dan HAM dan segala pernyataan mengenai yang berhubungan secara substansial dengan hukuman mati misalnya kenapa dihukum mati, kapan dihukum mati, siapa yang menng hukum mati, itu semua adalah tupoksi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami kenapa jadinya ikut ribet juga ke Kementerian Luar Negeri, karena ada warga negara asingnya. Tapi semua hal yang kami sampaikan di Kementerian Luar Negeri itu selalu berdasarkan atas apa yang disampaikan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kemenkopolkham. Jadi kami tidak pernah membuat statement sendiri karena sebenarnya hukuman mati itu tidak berhubungan secara langsung dengan Kementerian Luar Negeri, kecuali kalau ada hal yang berhubungan dengan warga negara asing.

24. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kita terbuka memberitahukan kepada media. Eksekusi hukuman mati ini akhirnya kita lakukan supaya ada efek jera. Itu yang disasar oleh Presiden RI. Supaya ada efek Jera. Dikasih tau kepada orang. Kalau kamu berani bawa itu narkoba ke Indoensia, kamu akan dihukum mati. Itu aja sudah menjadi strategi media. Kita tidak pernah menyembunyikan sama sekali bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan, karena yang sebenarnya yang kita cari adalah efek jera dari si hukuman mati itu. Apakah ada impilkasinya? Tentu. Banyak sekali penolakan. KBRI kita itu di datengin orang-orang yang menyatakan bahwa kita tuh savage, biadab. Karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan hukuman mati itu biadab. Cuma tetap saja kita dari awal, hukum sudah menyatakan bahwa kalau bawa segini ke Indonesia, kamu dihukum mati. Saat the words is out. Kebanyakan yang datang ke Indonesia adalah media asal Australia, karena ada dua warga negara yang dihukum mati. Jadi kalau ada jurnalis asing mau datang ke Indonesia, mereka itu diharuskan menggunakan visa kunjungan jurnlasitik. Itu nama visanya. Jadi ketika the words is out. Banyak sekali warga negara, media asal Australia yang mendaftar untuk meliput saat-saat eksekusi hukuman mati tersebut. Gitu. Itu kita fasilitasi.

25. Fasilitasi itu maksudnya seperti apa?

Maksudnya kita fasilitasi adalah kita permudah dalam mengurus visanya. Mereka memberikan aplikasi, dalam hitungan hari, langsung kita setujui. Bahkan kita sudah wanti-wanti kepada kedutaan dan konsul jenderal kita di

Australia bahwa kalau misalnya ada jurnalis-jurnalis yang mendaftar khusus untuk peliputan hukuman mati itu langsung dikasih visa. Balik lagi, kita tidak pernah menyembunyikan kenyataan bahwa hukuman mati itu akan dilaksanakan. Karena yang kita sasar adalah efek jera dari pengedar narkoba. Apakah kemudian semuanya baik-baik saja? Tentu tidak. Karena, yang perlu dipahami disini adalah bahwa setiap media memiliki agenda, bisa tertebak kalau misalnya media Australia pasti lebih pro kepada orang Australia. Tidak mungkin mereka pro terhadap pemerintah Indonesia, which is enggak mungkin. Jadi yang mereka gaungkan dari Australia adalah masalah HAM, masalah betapa Indonesia adalah negara barbar karena masih mengadakan atau melaksanakan hukuman mati. Bahkan berkat adanya tekanan dari media, dan masyarakat yang disetir ini. Pemerintah Australia sempat mengatakan bahwa dia mau menghentikan hubungan diplomatik dengan Indoensia. Sampai seperti itu pada dua bali nine ini. Tapi pemerintah kita tetap confirm enggak bisa, ini udah hukum di Indoensia. Kalau kamu seperti itu berarti kamu mencampuri urusan dalam negeri orang lain.

26. Jadi apa yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri selanjutnya?

Tapi apa yang kementerian luar negeri lakukan kita lakukan semacam ini, kita kan monitoring. Yang kita lakukan adalah kita *engaged* justru media yang ada dalam negeri kita. Kita *feed* mereka dengan semua informasi yang mereka ingin tahu, misalnya kenapa hukuman mati dilakukan, kenapa dijatuhkan hukuman mati, berapa lama nunggunya, prosesnya berapa lama, pengacaranya siapa, mereka dapat apa aja, kesempatan mereka apa aja, apakah mereka diperlakukan humanis disana. Itu semua informasi sudah kita jelaskan. Beberapa dari media kita memang humanis gitu looh, kaya yang kasian kan dihukum mati, memang kamu Tuhan, Balik lagi, kala misalnya kamu ngomong kaya gitu, yang justru dibalik sekarang adalah kalau kamu ngomong kaya gitu, gimana dengan orang-orang yang kena narkoba. Itu aja sih. Dengan adanya dua kubu yang berbeda, Terus terang kala itu, media nasional itu mendukung Pemri penuh. Jarang sekali saya menemukan media nasional yang tidak mendukung langkah pemri mengeksekusi hukuman mati untuk kasus narkoba. Yang diluar, tentunya friksi kan, tetapi justru karena media di Indonesia, media-media kita ini mendukung, mengerti akan langkah pemerintah. Mereka kan selalu mengeluarkan berita yang sama terus, mau enggak mau berita itu disadur oleh media asing, bahwa ini looh pendapat, masyarakat Indoensia. Karena sebenarnya yang ditampilkan media indoensia saat itu adalah bagaimana pendapat masyarakat Indoensia sendiri terhadap reaksi hukuma mati Dan ini tuh terpampang dalam berita-berita. Jadi mereka tuh, oh ini looh, itu looh. Jadi lama kelamaan ada media-media yang mainstream Australia waktu itu yang memahami bahwa kedua orang ini bersalah.

27. Apakah ada media gathering pada kasus eksekusi hukuman mati ini?

Tidak ada media gathering, hanya press briefing satu kali bersama pak Tata disini (ruang palapa), rame banget waktu itu (press briefing esksekusi hukuman mati kepada narapidana narkoba), udah itu aja, sebelum pelaksanaan hukuman mati dan setelah dilaksanakan hukuman mati. Kita tidak terlalu biasa membesar-besarkan masalah. Untuk eksekusi hukuman mati narapidana narkoba jilid 3 juga sama yang dilakukan. Dan itu (press briefing) bukan yang kita buat khusus yaa, maksudnya kayak press briefing hukuman mati. Itu enggak ada. Itu pasti akan masuk ke press briefing mingguan, terus Pak Tata mungkin akan bilang, misalnya besok akan ada eksekusi hukuman mati atau dalam minggu ini akan ada eksekusi hukuman mati. That's it. Kalau ada yang nanya-nanya, nanti dijawab. Kalau enggak ada, yaudah enggak ada. Enggak ada yang spesial gitu.

28. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya, ada seperti itu.

29. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kemlu bergabung dengan Bakohumas, itu organisasi humas pemerintah gitu

30. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Pada media asing, ada yang namanya JFCC, Jakarta Foreign Correspondency Club. Kita tau dan kenal dengan JFCC, tetapi kita bukan bagian dari JFCC ini. Karena organisasi ini memang organisasi para wartawan media asing. Tetapi tetap saja kita punya hubungan baik dnegan mereka.

Profil Informan 2

Raksa Ibrahim, merupakan Informan kedua yang memiliki jabatan selaku Kasi Liputan Media, Subdit Fasilitas Media, Direktorat Informasi dan Media. Proses wawancara dengan *Key Informant 2* berlangsung selama 62 menit dan 30 detik di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016, mulai pukul 15.10. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Kamis dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

- 1. Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, ada SOP penyampaian informasinya. Untuk penyampaian informasi ada yang Infoemd kerjain, ada BAM yang kerjain.

- 2. Jadi pada BAM itu mengerjakan apa yaa, mas?**

Pada BAM terdapat sub bagian bernama informasi dan media massa, yang mengurus komunikasi menteri, yang pekerjaannya bersinggungan dengan Direktorat Informasi dan Media. Sub bagian Infomed yang ada di BAM secara perinci mengurus konten dan kebutuhan menlu. Jadi sebenarnya khusus untuk menlu. Sementara Direktorat Informasi dan Media ini memiliki renstra sendiri dan kita berkaitan dengan kebutuhan Kemlu.

- 3. Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Kemlu dalam menyampaikan informasi harus berdasarkan sumber yang benar dan terpercaya. Selain itu, menteri luar negeri atau juru bicara atau pejabat-pejabat Kemlu harus mampu menjelaskan secara baik mengenai prinsip dan kebijakan Indonesia atas suatu isu, serta berusaha mengajak publik untuk mendukung pemerintah Indonesia. Dalam penyampaian informasi ke publik ada jejak penyaringannya, apa yang perlu disampaikan kepada publik, apa yang tidak perlu disampaikan akan dibahas sebelum benar-benar di-*publish*. Kita akan melakukan penyaringan hingga tiga kali untuk memastikan informasi yang akan di-*publish* merupakan informasi yang benar. Jika ada isu, unit terkait berkoordinasi dengan BAM nanti BAM menyampaikan kepada Infomed, kita bantu untuk *finishing* dan mem-*publish*-nya. Strategi relasi dengan media itu infomed. Tapi kita kan bekerja beriringan. Jadi kita sama-sama merumuskan apakah isu ini kita ingin redam atau kita ingin blow-up.

- 4. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?**

Ya, ada daftar media-nya. Publik Kemlu itu kan masyarakat luas, diantaranya mahasiswa, pelajar, praktisi, orang yang memiliki ketertarikan dengan Indonesia, jika berada di luar negeri. Segmentasi publik bisa berubah sesuai dengan isi, seperti kadang-kadang pebisnis, professional.

5. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?

Media yang meliput kemlu itu media kolom internasional, politik, dan keamanan. Berkaitan dengan politik luar negeri dan posisi Indonesia di luar negeri. Jadi kita susun menjadi media massa nasional dan media massa asing.

6. Apakah ada klasifikasi seperti wilayah atau yang lainnya?

Kita tidak mengklasifikasikan berdasarkan wilayah karena jumlah media massa asing yang besar tidak begitu banyak. Tetapi mayoritas yang berada di database Kemlu, berasal dari Asia dan Australia. Media juga sulit untuk diklasifikasikan oleh kita, karena media massa asing besar biasanya punya berbagai platform jadi sulit untuk diklasifikasikan sesuai platformnya. Platform media massa sekarang juga kebanyakan bentuknya multi-platform.

7. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?

Kita tidak membagi secara langsung nomor kontak pejabat tetapi kita menciptakan sustainment moment yang bisa mempertemukan antara orang-orang penting di kemlu dengan jurnalis, semacam media gathering seperti makan siang bareng menlu atau ngopi bareng menlu bisa terjadi sebulan sekali walaupun tidak selalu, tergantung keadaan. Biasanya disaat ibu menlu pulang dari konferensi, ibu akan cerita ke jurnalis, tentang konferensi mereka seperti apa. Kalau sifatnya terbuka, akan media massa asing dan nasional diundang.

8. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Enggak ada, tidak ada seperti itu, sama aja media nasional dan media asing.

9. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Infomed, direktur, dirjen, wamenlu, menlu

10. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?

Kami pastinya menghargai profesi mereka, kita mencoba memberikan pelayanan kepada mereka, terutama pada bidang peliputan mereka misalnya untuk akreditasi. Jadi wartawan asing yang datang ke Indonesia, perlu perizinan untuk kerja di Indonesia, kita coba dukung, kita bantu dengan

memberikan surat rekomendasi untuk izin kerja dan tinggal di Indonesia. Jika mereka perlu dan membutuhkan, kita juga buat kartu press sebagai bagian dari pelayanan kita, semua syarat tersebut kita berikan secara cuma-cuma. Dengan kartu press tersebut, menandakan bahwa mereka sudah diverifikasi oleh Kemlu dan menunjukkan bahwa mereka benar adalah wartawan asing serta meliput kegiatan-kegiatan di Kemlu. Kita juga memberikan pelayanan terpadu di gedung Kemlu dekat gedung konsuler, agar pelayanan makin terintegrasi dengan baik. Dalam menyampaikan pelayanan, ada yang bentuknya procedural, ada juga pelayanan peliputan mereka misalnya audio recording, siaran pers, transkripsi (jika mereka memerlukan), untuk meningkatkan pelayanan peliputan media nasional dan asing, kita sedang mengembangkan website atau portal, portalnya bernama LAKSMI (layanan akreditasi dan peliputan di Kemlu). Jadi melalui portal ini akan disajikan pelayan-pelayanan kita secara online, semua aplikasi dan permohonan yang masuk terjawab secara online, lalu layanan-layanan kita kepada media dalam memberikan kebutuhan bahan-bahan wartawan untuk membuat berita seperti siaran pers, audio recording, bahkan suatu saat kita sedang mencoba membuat untuk live streaming press briefing, atau disaat ada kegiatan media yang tidak dapat didatangi langsung oleh jurnalis, itu bisa diakses secara online. Kita sudah bergerak kearah sana dan sedang mengerjakannya. Kita terus berupaya untuk bisa menjawab kebutuhan media. Beranjak dari kita yang membutuhkan mereka dan mereka pun juga membutuhkan kita.

11. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?

Kita biasanya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik kepada wartawan, menunjukkan keramahan, Jika ada yang memiliki hobi atau ketertarikan yang sama, akan saling bertukar pendapat dan informasi, membantu mereka saat mengerjakan tugas dengan menyediakan snack ataupun makanan, misal saat *press briefing*.

12. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Enggak ada yang seperti itu

13. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Mereka bisa menghubungi Infomed untuk urusan liputan, untuk mencari berita atau konfirmasi, bisa menghubungi jubir kemlu.

14. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Setiap kegiatan media itu kita selalu data siapa saja wartawan yang hadir, berapa banyak yang datang, terus kita lihat juga tiap bulannya berapa banyak kita membuat kegiatan untuk bertemu dengan media, lalu berapa banyak media yang datang. Kita lihat antusiasme dan animo dari wartawan, kita juga melihat isu apa yang wartawan sukai, dan bagaimana wartawan nantinya akan membingkai pemberitaan-pemberitaan baik secara bingkainya maupun kontennya. Sehingga kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita dapat melihat kira-kira angle-nya akan kemana, media ini, misalnya apakah media dari Australia akan memberikan peliputan yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung citra positif Indonesia.

15. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Kita menilai dari hasil liputannya, kan ada fair, akurat dan memberikan kecenderungan yang positif bagi Kemlu. Kalau dua dari hal tersebut cross berarti media ini entah salah, atau pun perlu diberikan pemahaman yang lebih baik, misalnya media tersebut memberitakan suatu isu tetapi tidak akurat, maka media tersebut perlu diberikan klarifikasi. Kalau fair atau berimbang terus akurat, tapi agak-agak kurang cenderung memberikan citra positif masih kita anggap oke, karena itu kan kebebasan pers tapi hal tersebut tidak berlebihan atau menimbulkan polemik serta menyulut paham kebencian antara satu pihak dengan pihak lain atau membentur antara negara dan masyarakat. Kita lihat hasil liputan dan haluan dari media tersebut. Meskipun sudah tidak terlalu pengaruh si haluan tersebut.

16. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

kita kan perlu memberikan informasi yang tepat, agar nanti peliputan atau pun pembuatan berita yang dilakukan wartawan itu akurat dan berimbang serta syukur-syukur memberikan kecenderungan yang positif bagi kita. Kementerian Luar Negeri berupaya untuk dapat menyajikan informasi langsung dari pihak pertama.

17. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Strategi *media relations* itu tergantung di resnstra (rencana strategis) Kemlu. Disana tertuang jika kita harus melakukan digital campaign, digital diplomasi, fasilitasi media, mendukung peliputan, ada semua disitu. Perencanaan secara terinci, tahun per tahun, bulan per bulan itu tidak ada, tetapi resnstra itu akan diinterpretasi dan akan diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.

18. Maksudnya seperti apa mas?

Misalnya press briefing yang telah kita lakukan tidak tepat nih, maka akan dilihat kekurangannya, dan akan segera diperbaiki.

19. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri?

Kebijakan dan taktik media relations Kemlu selalu berubah-ubah sesuai dengan isunya, tetapi tidak akan melenceng dari platform yang kita miliki, sumberdaya yang kita miliki, dan keadaan di lapangan. Strateginya dinamis tetapi dalam rangkaianannya hanya itu saja, tetapi kan sudah ada SOP nya, harus penyampaiannya seperti apa, bagaimana kita menghubungi mereka. Kita lihat dari SOP, kita lihat dari renstra-nya, apa yang diharapkan atau tujuannya, kita sesuaikan implementasinya.

20. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Implementasinya kita sesuaikan terutama yang berkaitan dengan orang asing, lalu mengenai hubungan bilateral dengan negara asal terdakwa, itu kita maintenance.

21. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kita mengeluarkan press release tetapi tidak banyak, karena kita menghindari pemelintiran pemberitaan dengan jubiir yang langsung berbicara, dalam berbagai kesempatan, kita juga kan mengadakan press briefing. Waktu itu, ada press release-nya tetapi press release-nya adalah press release yang disampaikan oleh perwakilan tetap kita di New York, PBB. Disadurnya dari situ, karena ada perdebatan mengenai hukuman mati di UN, New York, disitu menjelaskan posisi Indonesia seperti apa. Kemlu itu kan hanya mengurus WNA, hubungan bilateral dengan asal WNA tetapi konsep penegakan hukum, pelaksanaan eksekusi itu tugas dari kejaksaan dan Kemenkumham. Kemlu tidak memberika statement apapun terkait penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman mati, seperti kapan pelaksanaan hukuman mati, kenapa mereka dihukum mati, itu tidak diberikan statementnya, tetapi kita menjelaskan posisi kita, kenapa kita mengambil posisi ini, landasan kita melaksanakan ini, itu semua sesuai dengan peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu semata-mata untuk penegakan hukum dan mereka sudah dinyatakan bersalah.

22. Jadi informasi yang disampaikan oleh jubiir itu berasal darimana?

Informasi yang diberikan oleh jubiir berasal dari berbagai sumber, karena sebelumnya ada rapat-rapat antar kementerian, ada pembahasan dari UN, dari regional (ASEAN), dari pembahasan secara bilateral. Ini semua diramu, mana yang bisa disampaikan, dan juga mengemas bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut. Unit terkait ada juga yang ikut terlibat pada isu ini, misal bilateral dengan Australia, jadi unit asia timur dan pasifik

ikut memberikan informasi. Unit yang ikut terlibat, unit negara dari warga negara asal terdakwa terpidana mati, unit pelayanan kekonsuleran. Unit memberikan informasi kepada BAM dan infomed (direktur infomed). Nanti direktur infomed yang akan menentukan akan diturunkan ke bagian mana isu ini akan ditindaklanjuti. Misal ke fasmec, ngurusin press briefing dan liputan wartawan asingnya, ke mulmed ngurusin pemberian informasi lewat portal Kemlu atau medsos Kemlu.

23. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya, kita lakukan itu

24. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kemlu ikut gabung di Bakohumas, itu semacam organisasi humas pemerintah Indonesia

25. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Ada yang namanya JFCC atau Jakarta Foreign Correspondency Club, itu semacam kumpulan para koresponden media asing. Kita memiliki hubungan baik dengan JFCC ini. Biasanya tiap tahun mereka ganti kepemimpinan. Mereka sifatnya loose. JFCC cuma forum untuk kumpul-kumpul dan sharing, forum untuk mendekatkan koresponden dengan tokoh-tokoh di Indonesia.

Profil Informan 3

Andi Syamsurijal merupakan Informan ketiga yang memiliki jabatan selaku Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media. Proses wawancara dengan *Key Informant 3* berlangsung selama 50 menit dan 42 detik di ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, mulai pukul 16.35. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Selasa dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

1. **Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, ada SOP penyampaian informasi Kemlu.

2. **Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Penyampaian informasi melalui beberapa media. Ada informasi yang disampaikan melalui media digital Kemlu (situs portal kemlu atau media sosial kemlu). Informasi ini bisa setiap saat diakses publik, ada penyampaian informasi yang diberikan kepada public berdasarkan permohonan yang masuk. Publik mengajukan informasi dalam wadah PPID. PPID dibentuk berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang keeterbukaan informasi public. Dalam UU tersebut, memang diamanatkan bahwa seluruh badan public pemerintah maupun non pemerintah wajib membentuk PPID dan membangun system pelayanan informasi public yang transparan, mudah diakses oleh publik, berbiaya murah dan akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan. Masyarakat bisa datang langsung ke Kemlu ke ruang pusat pelayanan informasi public. Masyarakat bisa datang lalu meminta informasi, nanti dari kita melayani, serta juga masyarakat bisa minta informasi melalui email ke pelayanan.ppid@kemlu.co.id, Nanti informasi yang masuk akan kita lihat, apakah informasi yang masuk itu apakah sudah tersedia di infomed, di bank informasi kita atau tidak, kalau tidak, apakah ada satker lain di Kemlu, kalau ada di satker Kemlu lain, kita akan berkomunikasi dengan satker tersebut untuk minta mereka untuk menyediakan informasi tersebut. Di Kemlu ini ada 54 satker eselon 2, yang biasa disebut direktorat atau biro atau pusat. Setiap unit kerja memiliki informasi masing-masing yang mereka kuasai.

3. **Apakah bisa meminta seluruh informasi yang dimiliki Kemlu?**

Ada informasi yang bisa dibuka untuk publik, ada yang dikecualikan. Jika informasi yang diminta tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan, maka bisa kita berikan kepada informan. Dikecualikan itu

berarti rahasia, tetapi rahasia itu juga ada jangka waktunya, ada 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jika jangka waktu habis, maka akan disampaikan kepada public. Selain itu kita juga menerbitkan siaran pers, itu juga merupakan media untuk mendesiminasikan informasi. Siaran pers ini kita distribusikan, kita blast ke semua media nasional maupun perwakilan media asing. Mereka akan membuat berita di media massa berdasarkan sumber berita yang kita kasih berupa siaran pers tersebut didistribusikan lewat email. Ya jelas dalam setiap penyampaian informasi itu harus benar, berdasarkan sumber terpercaya, sesuai dengan fakta dan data yang ada.

- 4. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?**

Ya, ada daftar media-nya.

- 5. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?**

Hanya dibagi menjadi media nasional dan media asing saja

- 6. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?**

Yang diberikan nomor jubah kemlu, untuk media bisa mencari informasi. Ibu menlu pun memberikan nomornya. Ada juga nomor infomed, khususnya subdit fasmed. Mereka bisa menghubungi infomed jika ingin mengurus peliputan di Indonesia.

- 7. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Tidak ada, sama aja media nasional dan media asing.

- 8. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Jubir, infomed, menlu, pejabat-pejabat tinggi Kemlu.

- 9. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?**

Kita memberikan pelayanan kepada media asing berupa pembuatan kartu pers tetap, pelayanan penempatan koresponden tetap asing di Indonesia, pembuatan rekomendasi pembuatan/perpanjangan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS), dan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Kita juga memberikan pelayanan peliputan, jika ada media asing yang membutuhkan bahan liputan seperti audio recording atau video gitu, bisa menghubungi infomed untuk meminta bahan liputan.

- 10. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?**

Pastinya dengan berkomunikasi yang baik dengan para wartawan, memberikan pelayanan dengan ramah.

11. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Tidak ada yang begitu

12. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Wartawan akan menghubungi jubah untuk mencari berita. Lalu akan menghubungi infomed, pada bagian fased untuk mengurus izin peliputan.

13. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Itu retuang dalam renstra (rencana strategis) kita. Ada yang namanya renstra Direktorat Informasi dan Media. Renstra tersebut merupakan turunan dari renstra Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik juga turunan dari resntra Kemlu. Jadi dari renstra kemlu diturunkan menjadi renstra dirjen IDP, diturunkan lagi menjadi renstra Direktorat Infomed. Untuk menurunkan atau men-cesceding renstra kemlu, setiap eselon satu akan punya renstra masing-masing, dalam hal ini dirjen IDP juga punya renstra yang telah di-cesceding dari renstra kemlu. Kemudian renstra-nya dirjen IDP akan di-cesceding menjadi renstra Direktorat Infomed. Ini adalah renstra untuk lima tahun ke depan 2014-2019.

14. Renstra itu maksudnya seperti apa?

Renstra adalah penjabaran visi dan misi. Renstra ini dibuat sekali dalam lima tahun. Renstra akan diganti setiap periode kinerja pemimpin negara. Berdasarkan renstra 2015-2019, kekuatannya adalah Direktorat Informasi dan Media memiliki platform/sarana berupa portal, media sosial dan kedekatan dengan media yang dapat menunjang pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri terutama dalam diseminasi informasi dan outreach kepada konstituen dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan dukungan platform yang ada maka informasi dapat disampaikan secara real time, global dan tidak mengenal batas negara (borderless). Disamping itu, platform tersebut dapat difungsikan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat ke Perwakilan RI di seluruh dunia. Untuk kelemahannya sendiri adalah Kelemahan yang paling mendasar adalah lemahnya koordinasi, baik koordinasi di dalam Kemlu, maupun koordinasi di luar Kemlu. Direktorat Informasi dan Media sebagai unit pendukung di bidang media untuk semua satker di Kemlu dan Perwakilan memerlukan informasi mengenai jadwal kegiatan satker Kemlu yang penting untuk diketahui publik. Lemahnya sinergitas menyulitkan Kemlu melakukan agenda setting

terkait berbagai prioritas utama politik luar negeri dan dari hubungan luar negeri guna mengurangi manajemen informasi yang bersifat reaktif.

15. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Itu juga ada di renstra. Berdasarkan renstra kita, peluangnya adalah Pada tataran dunia internasional, Indonesia diapandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi dalam forum internasional. Direktorat informasi dan media dianggap sebagai pihak yang kredible sebagai sumber informasi baik bagi media nasional maupun media internasional, untuk mendukung citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan berkembangnya masyarakat pengguna teknologi informasi di dunia, informasi dapat termutakhirkan secara real time dan langsung menyentuh kepada individu pembaca berita. Indonesia termasuk pengguna media sosial nomor 4 terbesar di dunia yang berpotensi mempengaruhi opini publik dunia. Untuk ancamannya adalah Masih ada media asing yang menulis secara tidak berimbang mengenai Indonesia sehingga menimbulkan persepsi yang salah dan berdampak negatif terhadap citra Indonesia. Media sosial yang dapat menyebarkan informasi secara real time dan borderless bisa menimbulkan krisis apabila tidak ditangani dengan manajemen krisis yang baik, cepat dan tepat.

16. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

Tentunya kita melihat dari kebutuhan media. Kita memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang ada, kita juga berusaha untuk membangun komunikasi atau relasi yang baik dengan media, dengan mencoba membangun hubungan yang dekat dengan mereka. Kemlu ini kan punya jubah atau juru bicara. Beliau akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan media, khususnya terkait politik luar negeri Indonesia.

17. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kita biasanya melihat dari renstra. Di renstra ini ada indikator kinerja. Indikator kinerja bisa berubah sesuai perkembangan keadaan. Setiap awal tahun akan ada rapat rencana kerja. Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan). Kinerja kita pada triwulan 1 (bulan januari, februari, maret) akan di evaluasi pada bulan april. Biasanya antara tanggal 1-14 April, itu harus selesai proses evaluasi dan monitoring, namanya e-monev. Evaluasi triwulan 1 di bulan april, triwulan 2 di bulan juli, evaluasi triwulan 3 di bulan oktober, evaluasi triwulan 4 di bulan januari awal tahun

selanjutnya. Program kerja tahun 2017, sudah kita susun dari april-mei 2016, namanya rancangan kinerja. Jadi rencana kinerja yang 1 tahun itu akan tetap di evaluasi per tiga bulan.

18. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri?

Itu selalu berubah-ubah sesuai dengan isunya, tetapi tetapakan disesuaikan dengan sumberdaya dan platform yang kita miliki, serta keadaan di lapangan.

19. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kebijakannya sendiri disesuaikan dengan keadaan. Pada eksekusi hukuman mati tahun lalu kan cukup besar beritanya, jadi kita lakukan hal yang agak berbeda.

20. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kita sempat mengeluarkan press release tentang hal ini. Untuk yang tahun ini, belum tahu seperti apa. Tapi yang pasti akan ada press briefing. Nanti jubar akan memberitahukan informasi terkait dengan eksekusi hukuman mati narapidana narkoba.

21. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya, tentu saja kita melakukannya.

22. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kita memiliki jejaring dengan Bakohumas. Jadi di Indonesia ini punya yang namanya Bakohumas (Badan Koordinasi Humas). Sekretariat Bakohumas ada di Kominfo. Ketua Umum maupun Ketua Pelaksana organisasi Bakohumas ada di Kominfo. Di Kominfo ada Dirjen yang namanya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik. Dirjennya tersebut akan secara otomatis menjadi Ketua Bakohumas. Tugasnya adalah mengkoordinasikan seluruh instansi kehumasan yang di pemerintah, di setiap Kementerian Lembaga ada biro humas nya. Anggota Bakohumas ada 700an. Jadi di Indonesia ini ada sekitar 700an Kementerian Lembaga, termasuk Direktorat Infomed. Setiap humas Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah adalah anggota Bakohumas. Setiap Kementerian/ Lembaga diberi kesempatan untuk menyelenggarakan suatu forum. Contohnya adalah Direktorat Informasi dan Media melalui subdit data media, setiap tahun menyelenggarakan forum Bakohumas.

23. Seperti apa forum Bakohumas itu pak?

Jadi kita undang para anggota bakohumas dari berbagai macam Kementerian/ Lembaga/Pemerintah untuk datang, kumpul, terus di forum tersebut kita mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam

bidang luar negeri. Kemlu kan mengurus pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang luar negeri, politik luar negeri. Forum ini diadakan pasti setahun sekali, tetapi untuk waktunya bisa berubah-ubah, tergantung kita yang merencanakan. Subdit Damed mengalokasikan untuk pelaksanaan forum bakohumas. Sejak tahun 2014 mulai diadakan di daerah untuk menjangkau pemerintah daerah. Pada tahun 2014 kita mengadakan forum di Kalimantan Timur, tahun 2015 di Sulawesi Selatan, tahun 2016 kita mengadakan di Sumatera Selatan. Kalau kita mengadakan di daerah, tidak seluruh Kementerian kita undangan, kita fokus di pejabat humas pemerintah daerah.

24. Kenapa menjadi fokus ke pejabat humas pemerintah pak?

Kita menyadari bahwa stakeholder kita menyebar di seluruh Indonesia, kita perlu menjangkau pemerintah-pemerintah daerah, pemerintah daerah juga perlu tahu tentang hubungan luar negeri kita. Pemerintah daerah akan mengetahui yang dikerjakan oleh Kemlu. Yang disosialisasikan seputar apa yang dikerjakan oleh Kemlu dalam melaksanakan politik dan hubungan luar negeri, bagaimana Kemlu menjalankan kebijakan pemerintah dalam hubungan luar negeri. Jika kementerian/ lembaga lain ada yang menyelenggarakan forum bakohumas, kerap kali Kementerian luar negeri diundang. Forum Bakohumas cukup efektif karena kita dapat membina jejaring kerja dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sehingga jika Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah ingin berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri saat ingin melakukan kesepakatan/ kerjasama dengan negara lain, mengetahui siapa yang harus dihubungi di Kementerian Luar Negeri.

25. Selain itu apalagi yang dilakukan?

Kita juga mengikuti rapat koordinasi bakohumas. Jadi, Bakohumas pun memiliki agenda tahunan untuk mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh pejabat humas kementerian/ lembaga. Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku sekretariat Bakohumas. Rapat koordinasi ini adalah forum bersilaturahmi serta ajang menjelaskan politik masing-masing untuk menemukan strategi optimal menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK)

26. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Kita ada kontak dengan JFCC, Jakarta Foreign Correspondency Club. Kita beberapa kali diundang pada acara yang diselenggarakan oleh JFCC ini. Kita datang sebagai tamu maupun panelis.

Profil Informan 4

Listiana Operananta merupakan Informan keempat yang memiliki jabatan selaku Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri. Proses wawancara dengan *Key Informant 4* berlangsung selama 47 menit dan 51 detik di ruang kerja Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, mulai pukul 15.12. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Kamis dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

- 1. Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, tentu kita ada SOP-nya. Penyampaian informasi Kemlu kepada publik itu dikerjakan oleh Infomed. Tetapi kalau penyampaian informasi Menlu itu kita yang mengerjakan.

- 2. Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Penyampaian informasi Kemlu kepada publik itu dikerjakan oleh Infomed. Tetapi kalau penyampaian informasi Menlu itu kita yang mengerjakan. Di Infomed itu lebih untuk Kemlu. Jadi yang menjadi *stakeholder*-nya adalah seluruh bagian dari kementerian ini. Di Kemlu ini akan ada banyak direktorat. Itu semua menjadi tanggung jawabnya Direktorat Infomed untuk menyampaikan apa yang menjadi informasi yang perlu disampaikan kepada publik, apapun bentuk informasinya, baik itu dalam bentuk berita, dalam bentuk *press release*, twitter, facebook, itu semua tugasnya Infomed. Kalau di BAM, kami menyampaikan apa yang ibu menteri, bapak wakil menteri luar negeri, pak juru bicara. Jadi fokus saya hanya kepada ketiga orang yang menjadi atasan saya sementara ini. Memang karena bagaimanapun ketiga orang ini merupakan narasumber utama Kemlu, akhirnya apa yang kami lakukan itu mencakup juga Kementerian Luar Negeri secara umum.

- 3. Bagaimana dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri? Kenapa Kepala BAM menjadi juru bicara Kemlu?**

Kepala Biro Administrasi Menteri (Kabam) ditunjuk atas perintah Menteri Luar Negeri sebagai juru bicara karena dianggap seorang Kabam tahu kegiatan menlu dari awal sampai akhir. Jadi saat pertemuan menlu dengan siapapun, seorang Kabam ikut biasanya. Sehingga dengan demikian, Kabam itu memiliki informasi *detail* sehubungan dengan diantaranya, terutama adalah agenda menteri luar negeri. Jadi semua yang dilakukan, semua yang disampaikan oleh menteri luar negeri, Kabam ini tahu, dengan demikian

akan memudahkan apabila yang bersangkutan juga, dari segi koordinasi untuk menjadi juru bicara.

- 4. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?**

Ya, kita ada daftar media-nya. Tetapi yang punya data nya itu Infomed

- 5. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?**

Setahu saya hanya dibagi menjadi media nasional dan media asing saja

- 6. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?**

Kalau mau mencari informasi, biasanya mereka akan menghubungi Pak Tata atau ke Ibu Menlu.

- 7. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Enggak ada, sama aja

- 8. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Jubir, Ibu Menlu, Dirjen, Direktur, Infomed, dan BAM juga

- 9. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?**

Kita memberikan pelayanan kepada media dengan memberikan informasi yang tepat, sesuai fakta dan data, dari sumber-sumber resmi seperti unit-unit kita atau lembaga atau kementerian lain

- 10. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?**

Kita bikin media gathering, biasanya juga Pak Tata suka ngajak wartawan untuk ngopi bareng, kumpul, ngobrolin berbagai macam hal, enggak hanya ngomongin tentang Kemlu atau dunia internasional.

- 11. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?**

Enggak ada sih seperti itu

- 12. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?**

Waktu itu banyak wartawan yang minta informasi ke Pak Tata dan juga Ibu Menlu terkait hal tersebut

13. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Strategi media itu yang mengerjakan ada di Infomed

14. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Itu juga Infomed yang mengerjakannya

15. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

Tentunya kita melihat dari kebutuhan media. Kita memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang ada, kita juga berusaha untuk membangun komunikasi atau relasi yang baik dengan media, dengan mencoba membangun hubungan yang dekat dengan mereka. Kemlu ini kan punya jubah atau juru bicara. Beliau akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan media, khususnya terkait politik luar negeri Indonesia.

16. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kementerian Luar Negeri akan melihat dari substansi isu dalam menyampaikan informasi. Misalkan isu terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia (PWNI), maka yang menjadi narasumber adalah direktur PWNI dan jubah Kementerian Luar Negeri. Untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia, sikap pemerintah Indonesia, dan pandangan Indonesia atau Kementerian Luar Negeri, akan disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, untuk hal teknis atau *detail*-nya akan disampaikan oleh Direktur PWNI. Kalau ada berita yang substansinya penting sekali, nanti yang menyampaiannya langsung Ibu Menlu, namanya Press statement. Disitu Ibu akan menjelaskan sikap, pandangan dari Kemneterian Luar Negeri atau Pemerintah Indonesia.

17. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kita memiliki dokumen yang namanya dokumen antisipasi media. Itu yang dibawa-bawa Pak Tata sebagai juru bicara seperti saat *press briefing* tadi. Sebelum beliau mulai *press briefing* kita siapkan. Biasanya antisipasi media itu datang dari perhatian berbagai media yang ada selama sebelum hari kamis (*briefing* mingguan), kita lihat, kita cek, apa yang lagi menjadi perhatian media. Ada juga wartawan yang telepon ke kita, menanyakan A,B,C,D. 'Ok, datang saja saat *press briefing*' Pertanyaannya kita masukan juga ke dalam dokumen. Kita siapakan informasi terkait hal-hal tersebut. Kita berusaha siapkan sebaik mungkin. Tapi namanya juga dokumen antisipasi media, jadi yaa enggak pasti juga, ada yang *miss*, ada yang kita enggak tahu juga, ada yang kita tahu dan *detail* tahunya, ada yang kita tahu

tapi enggak *detail*, belum banyak. Yaa macam-macam. Tidak pasti rangkumannya dapat semua.

18. Apakah seluruh informasi dibuat press release-nya?

Informasi yang kita dapatkan kadang dibuat juga press release-nya. Press release itu yang buat masing-masing unit di Kementerian Luar Negeri ini. Biasanya *Press release*, umumnya akan diperiksa lagi sama kita untuk dilihat dan dikaji kembali perihal substansinya. Tapi kadang juga enggak.

19. Apakah ada standar operasi untuk penulisan press release Kemlu?

Penulisan press release itu kita ada style sendiri, ini berlaku untuk semua unit, termasuk BAM juga. *Press release* umumnya berkisar antara 3 sampai 5 alinea. Pada alinea 1 berisi kutipan terkait isu yang menjadi judul *press release*, alinea 2 berisi informasi 5W + 1H (*What, When, Who, Why, Where* dan *How*), lalu alinea 3 sampai 5 berisi informasi tambahan yang merupakan fakta dan data terkait isu. Lalu *press release* dikirim via *e-mail, mailing list* yang berisi *e-mail* seluruh wartawan yang ada di kontak kita, kita blasting di portalnya Kemlu dan dikutip, diambil bagian-bagian untuk dijadikan konten di twitter dan facebook. Itu dikerjakan oleh Direktorat Informasi dan Media.

20. Bagaimana dengan press statement apakah di upload di portal juga?

Kalau press statement, beda lagi. Itu kita yang buat. Jadi nanti kita buat untuk Ibu Menlu, yang kita namakan Script. Script ini isinya point-point penting informasi yang dibutuhkan Ibu Menlu untuk disampaikan kepada media. Script ini tidak dibagikan kepada media baik di upload di portal atau dibagikan dalam bentuk hardcopy, hanya dibacakan saat press statement oleh Ibu. Script itu bentuknya kaya kertas A5 gitu. 1 atau 2 halaman yang kita pakai. Beliau juga menyampaikannya juga enggak urut, terserah. Misalnya kita kasih taunya dari awal hingga akhir kan, tapi ada yang enggak dibacakan, yaa enggak masalah. Isi yang disampaikan juga enggak dibaca sampai titik koma itu juga enggak, pasti berubah bahasanya atau kalimatnya. Tapi informasinya ada disitu. Jadi sesuai Ibu mau menyampaikannya gimana

21. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kalau waktu eksekusi hukuman mati itu, kita memiliki unit yang cukup mengurus terkait hal tersebut, namanya direktorat konsuler. Direktorat Konsuler ini, memberikan pelayanan fasilitas kepada diplomat asing. Ketika ada kasus eksekusi hukuman mati, ada warga negara sebuah negara yang akan dihukum mati, direktorat konsuler ini akan terima surat dari kejaksaan agung, pemberitahuan. Misalnya, disampaikan A, warga negara perancis akan dieksekusi hukuman mati, rencananya akan menjalani hukuman mati pada tanggal sekian. Nah surat ini oleh direktorat konsuler harus diserahkan ke kedutaan warga negara tersebut, karena dia akan punya hak untuk

mengontak yang akan dihukum mati, boleh ketemu, boleh ngomong, dikasih jadwal lah yaa buat ngomong, sampe akhirnya permintaannya apa, mau dikubur disini atau dibawa kenegaranya, atau keluarganya mau datang, macam-macam lah, permintaannya pokoknya terbuka. Baru setelah itu kita mempersiapkan informasi seputar fakta-fakta tersebut. Datanya dari direktorat konsuler, ada juga data yang kita peroleh dari KBRI atau perwakilan kita di negara lain, misal KBRI Paris, dari Perancis, macam-macam informasinya, tapi sih yang paling utama, unit yang menangani yang ada di Kemlu yang akan memberikan kita bahan-bahan. Walaupun disini di BAM, kita punya hak untuk mengkombinasikan informasi itu dari berbagai sumber, sumber resmi yaa tentunya seperti kedutaan, unit kita disini atau kementerian lain. Kalau menurut saya sih ya, untuk eksekusi hukuman mati, informasinya tidak terlalu *complicated* yaa dibandingkan dengan, misalkan isu laut china selatan yang berhubungan dengan perdamaian atau *stability*. Kalau hukuman mati data yang kita perlukan, diantaranya jumlahnya berapa, warga negara apa aja, kapan, itu kan pertanyaan wartawan kaya gitu kan. Dan terutama yang jadi fokus utama adalah apakah proses hukumnya sudah maksimal. Jika semua proses hukum, hak-hak dia sebagai seorang manusia gitu di sebuah negara asing, dia sudah lewat semua. *When all through legal avenue* dan ternyata tidak bisa mendapatkan pengampunan, yaa dia menjalani hukuman mati sesuai dengan hukuman yang diberikan. Jadi kemarin juga di *crosscheck* lagi ke Kejaksaan Agung tapi biasanya Kejaksaan Agung sudah memberikan keterangan bahwa si A ini sudah dihukum sejak tahun sekian, biasanya gitu kan, udah puluhan tahun kan rata-rata dipenjaranya, kita dapat tuh *detail*-nya. Dan biasanya kita juga minta kalau kita enggak dapat, pengacaranya sudah mengajukan kasasi, udah mengajukan ini dan itu, udah semua nya, berarti udah lengkap data informasinya. Jika sudah oke, kita sampaikan ke media.

22. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kalau sehubungan dengan adanya eksekusi hukuman mati, misalnya pengumuman mengenai si A, si B, si C akan dieksekusi, kita tidak ngeluarin *statement*. Tapi kita memang merespon apabila ada protes. Responnya itu sederhana bahwa ini adalah proses hukum yang memang sudah dilaksanakan, merupakan hukum positif Indonesia, dilaksanakan setelah yang bersangkutan melewati *legal avenue* yang maksimal, kita mempertimbangkan hak-haknya dia sehingga tidak mengambil keputusan ini dengan gegabah dan tidak dilarang oleh undang-undang bahwa hukuman mati bukan bentuk *punishment* yang dilarang. Kita Itu *statement* kita bagian dari respon kita terhadap pernyataan orang lain. Tapi itu *statement*, karena itu posisinya tidak berubah. Kita juga pastinya melakukan press briefing. Oh ya, waktu eksekusi yang pertama itu ada *press statement* menlu, tapi itu saja. Waktu itu kan ada warga negara Australia, Perancis, Brazil. Itu yang

pertama kan. Setelah itu, kita enggak pernah lagi *press statement* mengenai itu. Kalau seingat saya sekitar bulan Februari diadakannya.

23. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya, tentu.

24. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kita ada kontak dengan yang namanya Bakohumas tapi yang ngurus itu Infomed

25. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Ada dong, tapi biasanya yang mengurus itu juga Infomed

Profil Informan 5

Arrmanatha Nasir merupakan Informan kelima yang memiliki jabatan selaku Kepala Biro Administrasi Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian Luar Negeri. Proses wawancara dengan *Key Informant 5* berlangsung selama 34 menit dan 17 detik di ruang kerja Kepala Biro Administrasi Menteri, Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, mulai pukul 19.35. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Kamis dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

1. **Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, kita punya SOP-nya.

2. **Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

BAM mengurus segala hal yang berkaitan dengan menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri dalam berbagai aspek, termasuk pidato. Semua bahan substansi ibu menteri luar negeri, itu kita yang olah, meskipun draft awal yang berisi substansi-substansi datang dari berbagai unit. *draft* awal datang dari unit-unit terkait, tapi pada akhirnya kita yang mengolah, kadang-kadang kita bongkar total, kadang-kadang kita menyesuaikan, tergantung apa yang kita pandang, kita lihat apa yang diinginkan oleh ibu menlu. Dengan demikian, dilihat dari kebutuhannya tersebut, agar menteri itu ada satu unit yang bisa mengurus beliau, sehingga beliau tidak harus ke tempat unit masing-masing. Dari situ, dirasakan untuk Kementerian Luar Negeri, perlunya ada seseorang yang menyampaikan kebijakan, pandang posisi menteri luar negeri dan kementerian luar negeri. Untuk bisa seperti itu, kan orang tersebut harus tahu apa yang dipikirkan oleh ibu menlu, apa keyakinannya seorang menteri, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Oleh karena itu lah secara otomatis, Kepala Biro Administrasi Menteri yang mengurus masalah seperti itu, mengurus segala urusannya menteri, termasuk urusan-urusan diluar substansi dipandang yang paling cocok untuk menjadi juru bicara. Karena itu lah dibuat dalam biro administrasi sendiri unit kantor juru bicara, yang dipimpin oleh bu listy. Jadi kita yang menyampaikan semua ke media. Tapi kan sarana medianya yang mengatur adalah Direktorat Informasi dan Media. Hanya bahan substansinya, khususnya yang berhubungan dengan menlu berasal dari kita. Tetapi tetap saja untuk berbagai isu, yang menyampaikan kepada publik adalah jubir. Tujuannya adalah agar suara dari kementerian luar negeri itu satu, enggak

direktur A ngomong A, direktur B ngomong B. Nah, walaupun direktur lainnya bisa ngomong juga, tetapi biasanya mereka konsultasi kepada saya.

3. Apa tugas dan fungsi dari Kementerian Luar Negeri?

Salah satu tugas saya sebagai juru bicara adalah untuk mengetahui apa yang ada di media, setiap hari, terkait dengan Kemlu dan politik luar negeri. Oleh karena itu, setiap hari, setiap pagi, orang pertama yang ketemu dengan menteri adalah saya. Biasanya saya sampaikan ‘Ibu menteri, hari ini di media ini, ini yang lagi banyak dibahas, kemungkinan saat ini, hal ini lah yang akan banyak muncul, yang akan banyak ditanyakan oleh media kepada ibu menteri maupun kepada saya. Disitu kita akan menyusun yang kita namakan script, apa yang akan kita sampaikan kepada media bila ditanya, untuk isu apapun juga.

4. Bagaimana pembagian penyampaian informasi antara jubar dengan ibu menlu?

Kadang-kadang juga strategi kita adalah ibu menyampaikan A, saya menyampaikan B. Agar terlihat bahwa kalau saya menyampaikan B kan tingkat politisnya kan lebih rendah, itu juga kan beda-beda. Jadi kadang-kadang saya lebih detail, ibu lebih policy, atau kadang-kadang, saat kita lagi mencoba mengetes policy, saya menyampaikan, ibu enggak bicara. Kalau nanti diserang sama media, kan yang diserang itu saya bukan ibu. Jadi masih ada yang mengkoreksi. Jadi selalu gitu. Karena kalau sudah ibu yang bicara kan akan susah dikoreksi, yang bisa mengoreksi adalah presiden. Jadi kalau saya yang menyampaikan, lalu saya ada yang salah atau ada yang disampaikan tetapi kurang tepat, masih ada yang bisa mengkoreksi.

5. Bagaimana dengan press briefing yang biasa bapak lakukan?

Sebelum melakukan press briefing mingguan, saya selalu bertemu dengan ibu. Saya akan memberitahukan ‘ini bu yang saya akan sampaikan kepada media, kira-kira ini yang menjadi perhatian media, ada pesan?’ terus ibu kadang titip pesan, ‘tolong jangan sampai begini-begini-begini’. Setelah press briefing, saya laporkan ke beliau. ‘tadi press briefing ini yang menjadi perhatian media, ini yang saya jawab’ Jadi kalau nanti ibu menlu ditanya oleh media hal yang sama, ibu tahu apa yang telah saya omongin.

6. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?

Ya, ada. Data lengkap media-nya ada di Infomed.

7. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?

Dilihat dari publik-nya, sehingga dibagi menjadi media nasional dan media asing

8. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak

yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?

Di Kemlu ini, jika ingin mencari *statement* resmi atau posisi dan pandangan Kemlu bisa menghubungi saya atau ibu menlu. Tapi kalau mau mendalami suatu isu, mengenai suatu topik bisa langsung ke direktur atau dirjen terkait. Kalau saya hanya menjelaskan ini posisi Kemlu, ini posisi Indonesia. Kalau ditanya kenapa posisi-nya begini, saya akan jelaskan. Tapi *statement* saya lebih kepada posisi dan pandangan Kemlu atau Indonesia. Kalau *detail*-nya yang lebih mengetahui Dirjen atau Direktur yang mengetahui atau menangani isu tersebut

9. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Tidak ada sama saja.

10. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?

Saya, Ibu Menlu, Bapak Wakil Menlu, Para Dirjen, Direktur, dari Infomed, BAM, semuanya.

11. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?

Intinya sama. Kita menyampaikan posisi kita. Namun kalau dengan media asing, itu kan *angle* media-nya beda-beda. Kalau dengan media asing kita harus juga memperhatikan posisi Indonesia di kawasan atau di tingkat global. Ketertarikan mereka (media asing) juga beda-beda, yang bikin media asing tertarik adalah isunya bukan cara penyampaiannya. Mereka tertarik dengan isu-isu seperti peran Indonesia di kawasan, demokrasi, HAM. Kalau dalam penyampaiannya, tetap saya harus menyampaikan posisi Indonesia, pandangan kita, baru menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kalau sebaliknya, malah menjadi tidak terlihat posisi kita. Karena pertanyaan tersebut sudah di-*guide*. Jadi kita harus terlebih dahulu selalu menyampaikan posisi kita, sehingga bisa merubah persepsi mereka

12. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?

Saya berusaha untuk mengenal wartawan-wartawan, kita bikin kadang-kadang, mengopi bersama, atau misalkan setelah *press briefing*, setelah bertemu dengan ibu menlu, saya kembali ke bawah untuk ngobrol dengan mereka, bercanda-bercanda, agar mengenal mereka. Agar mereka mengerti saya, mereka bisa tahu kapan saya bercanda kalau bicara, kapan saya serius. Saya juga mengerti mereka, *angle* mereka, apa yang mereka cari. Mereka orangnya seperti apa. Jadi saya selalu berusaha untuk ada *personal touch* dengan mereka

13. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi

intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Enggak ada yang seperti itu

14. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Saya memberikan pandangan, posisi Pemerintah Indonesia terkait hal tersebut. Ibu pun juga sempat memberikan press-statement pada eksekusi waktu pertama pada tahun lalu.

15. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Kita lihat situasinya dan melihat pada yang dikita miliki

16. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Kita lihat situasinya juga, keadaan di lapangan seperti apa

17. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

Kita tidak boleh bohong. Karena kalau sekali kita bohong, kita akan kehilangan kredibilitas. Jika kita kehilangan kredibilitas, kita akan kehilangan kerjaan. Karena itu adalah kerjaan kita. Jika ada wartawan yang menanyakan sesuatu, dan saya memang belum memiliki datanya, saya tidak bisa bilang 'tidak tahu'. Kalau dengan media kita enggak boleh jawab 'enggak tau atau *no comment*'. Itu yang tidak pernah boleh dikatakan oleh seorang juru bicara. Yang bisa kita katakan adalah 'ya kita cek kembali atau saat ini saya belum bisa memberikan komentar karena datanya saya belum lengkap'.

18. Apakah ada hal lainnya lagi pak?

Sebagai jubah, kita harus *accessible*, harus bisa diakses. Karena kalau kita enggak bisa diakses, enggak ada gunanya. Jadi saya terima telepon, jawab sms jam 2 pagi, kadang-kadang, misalkan ada bom yang tiba-tiba meledak jam 2 pagi. Kalau saya masih bangun, yaa saya tanggapi. Kita harus mengerti bahwa mereka juga kan memiliki kewajiban untuk mencari narasumber untuk menyampaikan beritanya mereka. Justru kadang harus kita manfaatkan kesempatan seperti itu, untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita. Karena kalau tidak, mereka akan punya pandangan tersendiri.

19. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

kita harus terlebih dahulu menyampaikan posisi kita, posisi kemlu, baru menjawab pertanyaan wartawan. Karena tujuan saya disini bukan menjawab

pertanyaan media, tetapi tugas saya adalah menyampaikan posisi dan pandangan Kementerian Luar Negeri. Seorang juru bicara itu bukan saja melayani wartawan dengan menjawab pertanyaannya tetapi juga menyampaikan posisi dan pandangan kementerian. Itu lah tujuannya. Kita harus menyampaikan posisi dan pandangan kita, dan tidak ikut konteks menjawab pertanyaannya saja.

20. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri?

Saya menerapkan contohnya, saya sebagai jubiir, saya harus menghindari dari kesalahan tangkap orang bahwa itu adalah pandangan saya. Jadi saya sengaja hanya menyampaikan kebijakan-kebijakan, posisi menlu, atau kementerian luar negeri. Oleh karena itu, langkah yang saya ambil adalah saya tidak akan pernah melakukan atau hadir di talkshow. Karena kalau kita di talkshow, segmennya panjang, itu ada satu kecendrungan dimana saya menyampaikan posisi yang di luar posisi kemlu atau posisi kemlu lebih expended. Itu kan bisa membahayakan posisi kemlu sehingga untuk hadir di talkshow seperti itu yang hadir adalah dirjen atau direktornya langsung. Dengan demikian jika ada dirjen atau direktur yang menyampaikan posisi kemlu melebihi yang seharusnya, bisa saya koreksi. Saya hadir di interview, press briefing.

21. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Kita lihat situasi keadaan di lapangan seperti apa, strategi tahun lalu dengan tahun sekarang tentunya berbeda.

22. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Masalah di Indonesia itu kan semua orang pingin ngomong. Hukuman mati itu kan juga dilaksanakan di arab Saudi, Singapura, di Amerika dan sebagainya, tapi mereka tidak gembar gembor ngomong di media. Waktu eksekusi hukuman mati yang pertama itu kan *detail* informasinya, semua diajabarkan di media. Walaupun Presiden pun sudah ngomong bahwa yang boleh ngomong terkait hukuman mati itu hanya kementerian luar negeri, karena menyangkut beberapa orang asing dan juga jaksa agung. Tapi orang lain semua ngomong, polisi ngomong, semua ngomong, akhirnya itulah, beritanya itu banyak sekali dan terkait dengan orang asing, jadi mendapat perhatian banyak sekali dari media asing, sehingga kita sulit *manage* beritanya. Nah tahun ini kan sekarang enggak ada seperti itu, sekarang strategi media nya berbeda sekali, kemlu enggak banyak ngomong, padahal orang asingnya ada tiga dari empat yang di eksekusi hukuman mati. Yang kita lakukan tahun ini mudah-mudahan lebih kita *control*, saya pun enggak banyak ngomong. Tapi itu kan untuk mencegah keresahan. Karena intinya di dunia internasional itu negara maju khususnya, negara-negara *partner*

kita itu tidak suka kita melakukan hukuman mati, karena mereka pandang bahwa itu tidak sesuai dengan HAM. Walaupun itu tidak melanggar hukum internasional maupun nasional. Secara hukum tidak ada masalah, tetapi dari perspektif HAM-nya negara maju, bukan HAM-nya Indonesia atau negara timur, tetapi HAM-nya negara maju itu tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

23. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

tentu saja, dengan berbagai kalangan.

24. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kita bergabung dengan organisasi humas pemerintah bernama Bakohumas

25. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Kita ada kontak dengan beberapa organisasi media. Untuk media asing, kita ada kontak dengan JFCC, Jakarta Foreign Correspondency Club

Profil Informan 6

Rissa Ambarizky merupakan Informan keenam yang memiliki jabatan selaku Fungsional Diplomat di Subdit Multimedia, Direktorat Informasi dan Media. Proses wawancara dengan *Key Informant 6* berlangsung selama 33 menit dan 14 detik di ruang Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, mulai pukul 10.12. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Selasa dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

1. **Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, SOP-nya standar aja

2. **Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Jadi dari satuan kerja atau unit-unit di Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan RI di luar negeri, itu nanti dikirimkan ke Direktorat Informasi dan Media. Nirimnya bisa lewat e-mail atau lewat nota dinas atau brafax (beritra fax). Brafax itu semacam buat komunikasi antar perwakilan dengan kita. Media-nya namanya brafax. Tapi sih kita yang pasti di proses, yang lewat e-mail. Itu kan tinggal kita download dan tinggal kita edit kan. Jadi meskipun mereka udah kirim nota dinas atau pun brafax, mereka tetep kita suruh untuk kirim lewat email. Soalnya biar lebih mempermudah kan, ada foto-fotonya segala. Jadi sebenarnya ada SOP tertulis, tapi karena kan baru kita susun, waktu ada analisa jabatan dan segala macam itu, jadi belum buisa kita cetak hardcopy semuanya. Tapi intinya sih, dikirim ke kita, lalu kita olah. Kita olah itu maksudnya kita edit, kita hilangkan bagian-bagian yang enggak perlu, kita pilih foto-fotonya yang bagus, terus kita pilih fotonya, kita edit juga fotonya, terus nanti baru kita tayangin ke portal dan medsos.

3. **Apakah semua informasi ditayangkan dengan portal dan medsos?**

Jadi mayoritas yang kita upload di portal, kita upload di medsos juga. Tapi enggak semua yang kita taro di medsos, kita taro di portal. Informasi yang benar-benar penting, kita upload di portal. Di medsos itu lebih ke yang live, terus ringan. Begitu kan. Terus juga tergantung segmennya kalau di twitter dan di facebook. Misalnya nih kita ada kegiatan donor darah di Kemlu. Berita-berita kaya gitu kan kalau di portal, subtansinya kurang, jadi kita cuma taro di medsos aja. Biasanya kalau kita upload informasi di facebook, lebih banyak fotonya. Kalau di twitter, informasinya setara antara foto dengan kata-katanya atau tweetsnya. Biasanya yang kita taro di seluruh

platform kita itu yang bentuknya berita, missal berita-berita yang ada hubungannya dengan diplomasi, berita tentang bu menlu, berita tentang pak wamen, berita tentang asean. Pokoknya berita-berita yang jadi prioritas diplomasi Indonesia, polugri Indonesia seperti diplomasi ekonomi, perlindungan WNI, peran organisasi Indonesia di kancah internasional (Asean, PBB, dan sebagainya). Yang ada hubungannya dengan prioritas spolugri Indonesia, kita taro di portal dan medsos juga. Kalau yang lainnya, ada yang ditaro di portal doang atau di medsos doang.

4. Apakah seluruh informasi yang akan di upload di portal selalu acc bu Direktur Infomed?

Kalau ada informasi itu pastinya terlebih dahulu ditunjukkan ke Ibu Direktur, nanti Ibu Direktur pasti diposisi ke kita, subdit multimedia. Prosesnya enggak lama, kalau udah di acc bu Direktur, nanti kita langsung post di portal atau di medsos. Bahkan kalau kadang-kadang lagi cepet banget, enggak via nota dinas atau brafax, cuma via whatsapp group, jadi yaudah informasinya disitu, kita langsung upload di portal, tentunya setelah di acc bu Direktur. Itu untuk informasi-informasi yang ada hubungannya dengan Bu Menlu, berita-berita penting. Kalau berita dari perwakilan, biasanya, dari Bu Direktur pasti udah otomatis di acc, jadi kita juga otomatis, akan naikin beritanya di portal. Berita perwakilan itu berita-berita kegiatan perwakilan. Misalkan perwakilan ada nih melakukan kunjungan kemana, dubes ketemu dengan pejabat disana, macam-macam kaya gitu. Kalau berita kaya gitu, bisa langsung kirim ke e-mail mulmed, nanti langsung kita proses. Untuk yang kita upload di Portal, berita-berita dari Unit itu di cek dulu sama bu direktur dari sis substansinya, nanti unruk pengecekan lagi kaya typo atau ejaan gitu dari kita-nya sendiri, sebelum di upload ke portal. Kalau kontennya udah sesuai, yaudah nanti kitya yang cek teknis kaya kutipan, typo gitu.

5. Bagaimana koordinasi dengan BAM?

Kalau sama BAM itu, kaitannya dengan press release yang ada hubungannya dengan Menlu, Wamnelu dan berita-berita khusus. Misalkan ada pengeboman di Turki, itu kan biasanya kita bikin pernyataan kan, kaya statement gitu missal : pemerintah Indonesia mengecam tindakan pengeboman di turki yang telah menewaskan sekian orang, bla bla bla, kaya gitu kan. Itu biasanya kta harus lewat acc BAM dulu, lebih ke acc Pak Kabam. Pokoknya isu-isu sensitive, khusus dan adanya dengan menlu dan wamenlu akan di acc dulu oleh BAM.

6. Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?

Ya, kita buat daftar media. Daftar media-nya ada di fasmmed

7. Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?

kebagi dua saja, media nasional dan media asing.

- 8. Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?**

Kalau mau mencari berita bisa langsung hubungin Pak Tata sebagai jubi Kemlu, atau menghubungi Ibu Menlu. Kalau mau mengurus tentang kebutuhan liputan gitu bisa menghubungi Infomed

- 9. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Enggak ada, sama aja baik yang media nasional maupun media asingnya.

- 10. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Jubi, menlu, pejabat-pejabat tinggi Kemlu kayak Dirjen atau Direktur.

- 11. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?**

Kita kan memberikan pelayanan kepada media asing yang mau meliput ke Indonesia seperti visa. Kita juga memberikan pelayanan bahan liputan seperti audio recording atau video gitu, mereka bisa akses itu, salah satunya di portal Kemlu atau mereka minta ke kita.

- 12. Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?**

Kita pastinya berushaa untuk melayani dengan baik juga dengan ramah, friendly laah

- 13. Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?**

Enggak ada sih yaa, sama aja semua isu juga yang kerja tetap itu-itu aja

- 14. Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?**

Mereka akan menghubungi jubi kalau mau cari berita, terus ke kita, khususnya ke fasmed untuk urus izin peliputannya, misal di nusa kambangan itu. Kalau mereka mau cari berita di portal juga bisa

- 15. Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?**

Digital diplomacy jadi salah stau strategi media Kemlu. Untuk kekuatanny sendiri, kita udah ada tampilan portal yang baru. medossTapi kamu udah tau belum kalau di situs digital diplomacy di seluruh dunia,

digitaldiplomacy.live, Indonesia dapat peringkat 37 dari sekitar 160an negara. Jadi mereka me-rangking negara mana yang paling tinggi sampai paling rendah digital diplomacy-nya. Ada juga tweetplomacy.com, mereka menempatkan akun twitter Kemlu, akun berpengaruh nomor empat setelah Jokowi, Istana untuk Rakyat dan Setkab. Ini segmennya jelas yaa untuk pemerintahan. Kalau kelemahannya mungkin, SDM kita sedikit yaa terus juga anggaran, sejauh ini gitu sih. Di medsos kan butuh banyak konten grafis, di kita belum ada orang yang bisa meng-handle info grafis yang kita butuhkan. Itu belum ada. Kita mau meng-hire orang, anggarannya terbatas. Jadi kita enggak bisa hire orang untuk bikin konten grafis secara berkala. Cuma kita lagi kerjasama dengan konsultan, kita minta mereka untuk bikin kaya gitu.

16. Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?

Kita pasti ada evaluasi gitu. Biasanya kita coba untuk melihat dari apa yang lagi banyak diperbincangkan netizen di medsos gitu. Dilihat dari evaluasi yang kita sudah lakukan, Kita sedang menyusun kode etik penggunaan media sosial di lingkungan Kemlu. Kita juga kan bikin lokakarya untuk para diplomat yang sudah ditempatkan atau diposting dan diplomat-diplomat muda. Biasanya kan mereka pasti punya medsos gitu, nah kita upayakan agar mereka enhance medsos mereka agar informasi kita bisa diupload dengan mereka.

17. Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?

Kita tentunya harus memberikan informasi sesuai fakta dan data yang kita punya. Apalagi kalau info-nya kita posting di medsos kaya twitter gitu, itu kalau ada salah, susah banget untuk diperbaikannya, soalnya kan dalam hitungan detik bisa ratusan orang yang melihat. Kalau di portal, masih bisa kita edit.

18. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Kita lihat dari isunya, dari keadaan di lapangannya. Jadi bisa beda-beda yang dilakukannya.

19. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?

Untuk berita yang kita sampaikan di portal, yang nantinya bisa disadur oleh media, kita biasanya menerapkan standar, panjangnya berita itu tidak boleh dari 1 halaman A4 dengan font Arial 11. Biasanya kalau ada draft dikirim lebih dari itu, kita pangkas sendiri. Kecuali kalau ada hubungannya dengan menlu, wamenlu atau isu-isu sensitif, itu harus acc bu direktur dulu. Kalau berita-berita biasa, akan kita cut sendiri.

20. Bagaimana dengan digital diplomacy?

Kita juga kan ada yang namanya, digital diplomacy, itu yang kita lakukan. Jadi kita memperkuat diplomasi melalui media digital. Maka dari itu, kita lebih menyampaikan kebijakan-kebijakan itu melalui media sosial juga selain lewat portal. Karena kan dia kan, media digital kan banyak diakses oleh orang-orang. Kita untuk saat ini masih menggunakan twitter dan facebook, karena di twitter followers kita udah banyak, twitter juga masih banyak dipake. Facebook juga masih banyak dipake. Kecilkan kemungkinan orang enggak punya facebook atau twitter. Jadi kita pakai yang mayoritas aja sih. Karena kedua media sosial itu dianggap masih menjadi media sosial paling berpengaruh dan kemungkinan besar informasi yang kita sampaikan akan sampai ke publik. Kalau Instagram kita masih jajaki, karena belum menemukan formulasi kontennya seperti apa. Untuk portal-nya, tahun ini kita ada portal yang baru.

21. Apa beda portal yang baru dengan yang lama? Apa yang berubah?

Sebetulnya menu-nya sama aja dengan portal yang lama, tapi tampilannya kita bikin lebih user-friendly, lebih gampang diaksesnya, bisa diakses lewat hp. Soalnya kalau dulu tuh susah, lama loadingnya. Belum mobile friendly. Nah jadi sekarang pengunjung baru itu, mereka mayoritas aksesnya lewat hp. Kalau kita lihat di google analytics, pengunjung barunya lebih banyak dibandingkan tahun lalu, grafik nya meningkat. Konten portal dan edia sosial selalu di-update setiap hari. Untuk berita-berita urgent dan penting, mekipun weekend, akan langsung kita uploada beritanya di portal ataupun medsos. Jadi publik akan bisa langsung akses beritanya. Cuma untuk isu-isu sensitif dan khusus akan tetap tunggu acc dari BAM dulu. Kalau acc dengan BAM itu tentu it takes time. Tapi kan enggak seluruh isu sensitif yaa. Jadi yang kadang-kadang aja kaya gitu. Pokoknya isu-isu sensitif harus lewat BAM, sisanya yang bukan isu sensitif, semua menjadi kewenangan infomed semua. Intinya sih biasanya yang harus minta acc ke BAM, karena via jibir juga kan, itu isu-isu yang sensitif. As long as isu nya umum terus tidak menimbulkan pemahaman ganda di masyarakat, kita langsung.

22. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Hukuman mati itu kan isunya sensitif yaa, ada menyangkut Kemlu, menyangkut instansi lain, menyangkut negara lain juga. Kita dapat informasinya dari BAM.

23. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati naarapidana narkoba?

Iyaa dulu pernah ada. *Press release* tersebut berasal dari unit (PTRI New York) karena ada hubungannya dengan PBB kan, lalu disampaikan kepada Kepala BAM. Setelah di *accept* oleh Kepala BAM, lalu diberikan kepada Direktorat Informasi dan Media untuk disebar melalui portal Kemlu. Jadi

pas sampai di kita, langsung kita posting di portal Kemlu. Kita waktu itu ikut cek teknis-nya, kaya typo-nya, ngecek kalau ada kata-kata yang kurang pas. Kalau substansi adanya dari BAM.

24. Apakah semua press release disebar lewat portal Kemlu?

Segala *press release* pasti akan disebar lewat portal Kemlu, selain di *blast* lewat *e-mail* kepada media. Press release-press release yang di upload di portal Kemlu belum tentu di kirim ke media, tetapi yang kita kirim ke media sudah pasti kita upload juga di portal Kemlu. Waktu dulu kan juga ada ketegangan hubungan diplomatik dengan Brasil karena menolak surat kepercayaan duta besar Indonesia. Itu sempat kita *posting* di Medsos Kemlu, twitter dan facebook. Tapi untuk eksekusi hukuman mati jilid 3 ini tidak ada yang kita *posting*, karena memang tidak ada yang berkaitan dengan ketegangan hubungan diplomatik atau diplomasi Indonesia. Kita tidak perlu kan men-trigger sesuatu yang enggak ada.

25. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya, kita melakukan yang kaya gitu.

26. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Ada yang namanya Bakohumas, biasanya yang ikut kegiatan Bakohumas itu Subdit damed (data media). Mereka juga suka bikin forum-forum Bakohumas gitu.

27. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Ada juga dengan media masa. Biasanya yang ngurusnya itu fased, yang lebih tau subdit fased. Kalau enggak salah, dengan media asing, kita ada kontak dengan JFCC gitu.

Profil Informan 7

Achmad Ramadhan merupakan Informan ketujuh yang memiliki jabatan selaku Kepala Subdit Berita, Direktorat Informasi dan Media. Proses wawancara dengan *Key Informant 7* berlangsung selama 67 menit dan 35 detik di ruang Direktorat Informasi dan Media, Kementerian Luar Negeri pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, mulai pukul 11.23. Proses wawancara dilakukan setelah informan melakukan kegiatannya pada hari Selasa dan proses wawancara berlangsung dengan baik.

Transkrip Wawancara

1. **Apakah tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri memiliki standar operasi sebagai pedoman dalam menyampaikan informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Ya, SOP-nya standar aja

2. **Bagaimanakah standar operasi penyampaian informasi dari Kementerian Luar Negeri kepada publiknya?**

Informasinya dari satuan unit kerja yang ada di Kemlu atau dari perwakilan, nanti akan disampaikan ke Infomed. Nanti di Infomed ini akan kita sebar, bisa lewat portal Kemlu, medsos Kemlu atau lewat e-mail ke wartawan atau media gitu.

3. **Apakah Kemlu membuat daftar kontak media yang memiliki segmentasi khalayak sama atau sebagian besar juga merupakan publik Kementerian Luar Negeri?**

Ya, ada daftarnya, yang punya datanya itu bagian fasmed

4. **Bagaimana Kemlu menyusun daftar media yang secara potensial dapat menjadi media komunikasi dengan publik Kementerian Luar Negeri?**

media nasional dan media asing saja.

5. **Apakah Kemlu menyediakan daftar kontak yang berisi daftar orang dalam Kementerian Luar Negeri yang bisa dihubungi media massa kepada institusi media dan wartawan? Siapa sajakah daftar kontak yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa dihubungi media massa?**

Kalau mencari berita bisa menghubungi jubi Kemlu, Arrmanatha Nair. Nanti beliau yang akan menjelaskan tentang posisi, pandangan Kemlu, atau menghubungi Ibu Menlu. Tapi kalau mau urus izin peliputan, bisa kita menghubungi kita, Infomed. Tapi khususnya ke bagian fasmed.

6. **Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**

Enggak ada yang gitu, sama aja dnegan media nasional.

7. **Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing?**
Yang biasa berkomunikasi sih jubah, Menlu atau dirjen, direktur yang jadi narasumber.
8. **Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan media asing sebagai suatu institusi?**
Kita memberikan pelayanan izin peliputan gitu, ada juga kita kan mengadakan berbagai kegiatan seperti PPTM, press briefing mingguan gitu.
9. **Bagaimana Kemlu mengelola relasi dengan wartawan sebagai personifikasi media asing (secara individual dengan wartawan)?**
Kita berusaha untuk melayani dengan baik, berkomunikasi dengan ramah gitu ke wartawannya
10. **Apakah Kemlu membentuk tim media (koordinator media, juru bicara dan penulis) Kementerian Luar Negeri untuk menjalin komunikasi intens antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?**
Tidak ada yang begitu
11. **Siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi antara Kementerian Luar Negeri dengan media asing pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?**
Waktu itu sih media banyak berkomunikasi ke Jubir, ke Menlu juga bisa. Tergantung apa yang ingin dikonfirmasi
12. **Bagaimana Kemlu menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sumber daya Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?**
Dari sisi kekuatannya sepertinya media informasi kita ke publik sudah cukup baik selama ini, misalkan portal dan sosmed Kemlu. Kalau kelemahannya dari sisi SDM-nya sih masih kurang
13. **Bagaimana Kemlu menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal Kementerian Luar Negeri untuk pengembangan strategi *media relations*?**
Dari sisi peluangnya, kita bisa melihat banyak masyarakat yang cukup tertarik dengan isu-isu internasional, dengan Kemlu. Tapi yaa masih banyak juga kan berita dari media yang bersentimen negatif, yang ditunjukkan kepada kita.
14. **Apa saja prinsip dasar Kemlu dalam berhubungan dengan media massa yang menjadi pedoman pada pengembangan strategi *media relations*?**
Pastinya memberikan informasi berdasarkan fakta dan data yang ada, tidak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi gitu.
15. **Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik *media relations* Kementerian Luar Negeri?**

Dari media monitoring yang kita lakukan. Pemantauan media disini ditunjukkan kepada media online dan media cetak. Kalau media elektronik, kita pantau di website-nya mereka. Media cetak yang kita pantau media nasional. Media cetak yang kita monitoring, ada keterbatasan, dengan banyaknya media cetak yang beredar, harus kita pilih mana yang kita monitor. Kita juga akan keterbatasan anggaran, jadi enggak semua media kita berlangganan. Sejauh ini ada 10 media cetak nasional yang kita langganan dan kita pantau. Cuma untuk media cetak, semenjak tahun 2016 ini, kita ada kerjasama dengan jasa konsultan, namanya Digivla. Mereka juga provide media cetak untuk kita monitoring dalam bentuk kliping. Kan sekarang udah enggak jaman lagi untuk gunting-gunting koran. Dulu kita kan potong-potong koran, lalu kita jilid. Dulu jamannya Pak Marty, dari BAM rajin minta klipingsnya yang sudah kita jilid. Dengan berkembangnya teknologi informasi kaya gini, udah enggak ada yang kaya gitu. Jadi modelnya sekarang kita scan, dalam bentuk digital. Kalau untuk media asing tidak ada media cetak, hanya media online.

16. Media online yang dimaksud itu seperti apa?

Untuk media online, kita ada beberapa produk. Yang pertama adalah media monitoring yang pagi, istilahnya adalah medmon pagi yang berupa link dan ada sedikit abstraksi, yang dikirimkan pagi ke Menlu, biasanya kita kirimkan ke Direktur dulu yaa. Itu hanya pagi saja. Yang dikirimkan ini tidak diberikan sentiment beritanya. Prosesnya adalah berita yang kita masukan adalah berita jam empat sore hingga jam tujuh pagi. Misalkan jam empat sore di tanggal kemarin sampai jam tujuh pagi, tanggal hari ini. Yang kedua adalah media monitoring berbentuk matriks, yang lebih detail informasinya. Di matriks ini kita masukan juga sentimen pemberitaannya. Kemudian ada juga analisa berita yang berupa statistik dan ada news highlight-nya. Statistik-nya berupa pie chart dan bentuk bar, ada info grafisnya. Hasil statistic ini akan dikirimkan ke menlu, wamenlu, jubar, secretariat menlu, secretariat wamenlu, direktur infomed. Tapi sebenarnya seluruh produk kita ini akan dikirimkan ke menlu. Tapi yang analisa ini terbatas yang menerima. Nah Cuma dari sejak minggu lalu, ada kebijakan baru bahwa hasil analisa ini dikirimkan juga ke pejabat eselon 1 dan 2 juga perwakilan. Perwakilan itu maksudnya seluruh perwakilan RI di luar negeri. Yang lainnya, seperti matriks dan kliping, sejak dahulu sudah dikirimkan ke menlu, pejabat kemlu serta perwakilan RI di luar negeri. Semua kita kirimkan per hari lewat email. Jadi harusnya mereka up-date tentang pemberitaan di dalam negeri maupun luar negeri yang dipantau oleh kita. Supaya mereka aware, isu yang lagi hangat sekarang ini seperti apa. Untuk yang sore, produknya sama, yang membedakan hanya periode waktunya, medmon kalau sore waktunya dari jam delapan hingga jam empat sore, sesuai jam kerja kita disini.

17. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri?

Salah satunya lewat PPTM, Pernyataan Pers Tahunan Menlu. Jadi PPTM ini tujuannya, pertama adalah untuk mendesiminasikan pencapaian-pencapaian diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu, misalkan pada tahun PPTM 2016 berarti pencapaian tahun 2015, dan juga apa yang akan dilakukan pada tahun 2016, prediksi bagaimana diplomasi ke depan, bagaimana kita, Indonesia harus menyikapinya. Kalau substansi atau isi yang akan disampaikan itu, yang bertanggung jawab adalah Biro Administrasi Menteri bersama dengan unit-unit terkait yang ada di Kemlu ini. Misalkan terkait Amerika dan Eropa, BAM akan minta bahan ke Dirjen Amerika dan Eropa. Semua unit yang ada di Kemlu akan dimintakan bahan substansinya, yang nantinya akan disusun oleh BAM. Kalau infomed bertanggung jawab dibagian teknis penyelenggaraan. Penyelenggaraan itu termasuk pengaturan wartawan.

18. Pada PPTM ini, siapa saja yang diundang?

Kita akan tidak hanya mengundang media, tahun ini kita juga mengundang perwakilan kedubes asing yang ada di Jakarta, pejabat tinggi Kemlu eselon 1, eselon 2, DPR, kalangan diplomatik, perwakilan dari Organisasi Internasional, Akademisi dan dari lembaga tinggi negara. Tahun ini dari segi undangan lebih banyak. Media yang diundang adalah media nasional dan media asing, baik media cetak, elektronik, online. Tahun 2015, ada 25 media nasional dan 27 media asing. Yang datang harus undangan, media yang diundang oleh Infomed. Infomed disini juga berkoordinasi dengan BAM. Kadang BAM minta beberapa media untuk ikut diundang. Yang bisa ikut acara ini hanya undangan saja. Karena kan juga kapasitas tempatnya terbatas, sekitar 300an.

19. Dimana dan Kapan PPTM dilaksanakan?

Pelaksanaan PPTM di ruang nusantara, lantai 2 gedung Kemlu ini. Acara PPTM diadakan setiap awal tahun, bulan Januari, minggu pertama. Acara intinya yaitu penyampaian dari Menlu itu sekitar satu jam acaranya. Disini hanya Menlu yang berbicara, tidak aja tanya jawab, hanya paparan saja. Kalau wartawan ingin bertanya, biasanya bisa tanya jawab di luar acara. Untuk mendesiminasikan informasi, tidak hanya PPTM saja, ada juga press briefing setiap minggu kepada media. Jadi media selalu update kegiatan di Kemlu.

20. Apalagi yang dilakukan saat PPTM?

Oh ya, di PPTM ini ada juga pemberian penghargaan, namanya Malik Awards. Ini pemberian penghargaan kepada media dan wartawan yang berpartisipasi aktif memberitakan politik luar negeri Indonesia yang bersifat informatif dan edukatif kepada masyarakat luas. Pemberian ini khusus kepada media nasional saja. Media nasional ini kita bagi kategori-nya, ada media cetak, media online, media TV, media radio dan jurnalis perorangan.

Pemenangnya satu-satu. Kategori media cetak, yang menang tahun ini Kompas, media online-nya detik.com yang menang. Lalu media TV-nya Metro TV, media radio-nya dari RRI dan jurnalis perorangnya juga dari RRI. Yang menentukan pemenangnya adalah dari Infomed kerjasama dengan BAM. Jadi kita merekap pemberitaan, karena kita kan melakukan media monitoring setiap hari. Dari situ kita rekap, media mana yang sangat aktif, sifatnya edukatif dan informatif, bukan yang negatif. Kan ada juga media yang sentimennya selalu negatif, itu enggak termasuk. Pemberian penghargaan ini sudah ada sejak tahun 2002. Jadi dikalangan media mereka tahu PPTM itu juga akan ada Malik Awards. Nanti pemenangnya akan mendapat plakat, diserahkan langsung oleh Menlu.

21. Bagaimana Kemlu menyusun kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Salah satunya dari media monitoring dan analisis yang telah kita lakukan setiap hari terhadap pemberitaan-pemberitaan yang ada di media

22. Bagaimana bentuk kebijakan dan taktik media relations Kementerian Luar Negeri pada eksekusi hukuman mati narapidana narkoba?

Pada eksekusi hukuman mati yang jilid tiga ini, kita memang melakukan media monitoring khusus terkait pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Dan memang pemberitaannya cukup banyak yaa. Kalau lihat dari periode-nya, kita batasi seminggu sebelum pelaksanaan hukuman mati dan seminggu setelah pelaksanaan hukuman mati. Pelaksananya kan, yang jilid tiga ini, Jumat minggu dini hari, seminggu sebelumnya dan seminggu sesudah. Nah yang kita kumpulkan selama periode tersebut, ada 79 artikel berita dari 35 media nasional, dan 37 artikel dari 26 media asing. Dan memang dari segi pemberitaan mayoritas negatif sentimennya. Karena banyak yang mengutip pemberitaan dari pihak organisasi internasional atau LSM internasional yang tidak menyetujui adanya pelaksanaan hukuman mati. Karena kutipan itu, kan banyak tuh yang against, dari berbagai pihak, dari Uni Eropa, dari PBB, dari LSM asing, Amnesty Internasional. Semuanya itu minta dihentikan, tidak menyetujui pelaksanaan hukuman mati. Kebanyakan sentimennya negatif. Kalau dari media nasional-nya kan banyak, kita kan pantau yang media online-nya, kalau kliping atau media cetak, kita tidak melakukan khusus mengenai berita eksekusi hukuman mati. Di kliping sih memang ada sub judul hukuman mati, cuma kita bikin kliping khusus eksekusi hukuman mati, tidak kita lakukan.

23. Bagaimana dengan hasil media monitoring yang media online tersebut pak?

Tapi kalau media monitoring online, kita lakukan secara khusus. Kalau secara prosentase pemberitaan itu ada, tapi prosentasi sentimennya enggak ada. Dalam media nasional, secara kategori topik pemberitaan, 25% yang meliputi pernyataan PBB dan Uni Eropa, 5% media nasional yang

memberitakan mengenai mendukung pemerintah Indonesia. Ada juga pemberitaan 5%, eksekusi hukuman mati tidak akan mengganggu hubungan bilateral. Kalau media internasional, kategori topik, ada media yang menyoroti pendirian Indonesia dalam menindak kejahatan narkoba itu 19%, walaupun sebagian lagi menyatakan ketidaksetujuan, PBB dan Uni Eropa kecam Indonesia itu 5%. Kita kan ada pertimbangan sentimen positif, itu berarti mendukung kebijakan luar negeri kita. Kalau netral, ada perimbangan, di berita itu ada kritik, tapi juga secara berimbang, memuat atau memberitakan posisi kita, tanggapan dari kita. Kalau negative, isinya yaa mungkin protes, kritikan, yang bersifat negatif lah. Ia juga tidak memuat berita mengenai bagaimana versi Indonesia, tanggapan dari pemerintah Indonesia, apakah ada upaya untuk mengatasi atau menangani isu tersebut, itu enggak ada disitu, jadi kita masukan ke sentimen negatif. Jadi ia masukkan dari satu sisi saja.

24. Apakah semua berita dibikin media monitoring khususnya? Kapan dilakukan media monitoring khusus gitu pak?

Media monitoring khusus ini dilakukan untuk berita-berita yang mengemuka. Jadi beritanya ada terus selama satu minggu, bahkan bisa dua minggu. Bisa kita prediksi, ini beritanya nih jadi perhatian masyarakat, dunia internasional, nah itu kan kita buat media monitoring khususnya. Tapi kadang juga ada permintaan dari pimpinan, nanti kita bikin media monitoring khususnya. Misal ‘Tolong bikin analisa khusus laut china selatan.’ Jadi nanti kita bikin statistiknya, kemudian news highlight-nya, sentimen pemberitaannya dan kesimpulannya. Seluruh draft dari digivila adanya, kita sebagai verifikator, yang menverifikasi, ini benar enggak positif, ini benar enggak negative, dan ini beritanya kita verifikasi. Jadi kalau ada yang berbeda pada penentuan sentimennya, kita akan sampaikan, atau kita rubah sendiri. Mereka berikan softcopynya, kita rubah sendiri. Lalu pada kesimpulan, mereka bikin kesimpulan draftnya, tapi pada kesimpulan itu, biasanya kita ubah sendiri. Untuk analisa, pasti di acc Ibu Direktur dulu, baru dikirim ke yang lainnya. Statistiknya sendiri itu prosentase topik pemberitaannya dan nada pemberitaannya. Jadi yang dibikin analisanya bisa satu minggu, dua minggu, satu bulan, tergantung permintaannya. Disini kita kan berita, untuk yang terkait medsos, itu ada lagi bagian lain yang mengerjakan, yaitu subdit multimedia.

25. Apa saja kendala media monitoringnya?

Kendala media monitoring, dari segi kecepatan dan sumber daya kita juga. Kecepatan dalam hal ini, pimpinan kan mintanya cepat, real-time, misal pagi itu pagi seklai, tapi kan kita tentu saja enggak bisa memenuhi, karena kita kan ada jam kerjanya, dari jam delapan hingga jam setengah lima. Kita diminta untuk bekerja untuk diluar jam itu juga. Kendala-nya disitu. Kita terbatas sumberdaya-nya. Tapi meskipun demikian, kita tetap berusaha menghadirkan kebutuhan tersebut. Jadi setelah mereka mengerjakan disini,

mereka juga mengerjakan di rumah. Kalau harus 24 jam kan berarti harus dibikin tim khusus untuk monitoring, yang memang akan bisa bekerja 24 jam. Kendala lainnya juga untuk media monitoring, kita enggak bisa menjangkau semua media, arena media monitoring yang kita lakukan berbasis manual.

26. Apa maksud manual tersebut?

Manual disini adalah kita menggunakan search engine yang digunakan secara umum seperti google. Tapi kalau analisa, memang kita minta bantuan, kita kerjasam dengan lembaga konsultan. Tapi untuk matriks, medmon pagi dan sore itu, itu adalah murni dari kita, kita kompilasikan dari search engine yang digunakan secara publik itu. Jadi yaa kita otomatis, tidak melihat media per media. Yang kita lakukan adalah dengan keywords. Kita ada 12 keywords yang sudah kita tentukan, diantaranya adalah menlu, Retno LP Marsudi, Arrmanatha Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Indonesia, TKI itu masuk ke keywords kita. Enggak ada media khusus yang benar-benar dipantau. Hanya berdasarkan keywords. Kalau dari analisa khusus, kendalanya, karena ini produk yang kita kerjasama, dalam hal ini digivla, secara tidak langsung kita bergantung, walaupun dia akan akomodir permintaan kita, tapi pembahasannya dari mereka. Tapi karena mereka sudah lama kerjasama dengan kita, mereka mulai mengenali ‘oh ini gaya Kemlu, maunya kaya gini’. Koordinasi nya sejauh ini cukup baik. Tapi kan mereka juga punya jam kerja yaa, jadi kalau kita ada permintaan di luar jam kerja, kita harus tunggu dulu, bisa nunggu sampai besoknya, atau nunggu mereka sampai di rumah dulu.

27. Jadi apakah eksekusi hukuman mati hanya ada analisa khususnya saja?

Kalau eksekusi hukuman mati, kita kan udah kasih yang analisa tiap harinya, baru analisa khusus yang keseluruhannya dikasih setelah selesai. Analisa khusus itu kan kompilasi dari analisa yang sudah diberikan tiap harinya, jadi sudah dilaporkan. Ketika itu terjadi, Ibu Menlu sebenarnya kan sudah biasa berinteraksi dengan media, Ibu sudah tahu keadaanya. Karena posisi kita kan jelas, walaupun ada kecaman dari berbagai pihak internasional, tapi ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesai, dan tidak boleh ada intervensi dari negara lain. Kita sudah jelas posisi-posisi kita.

28. Apakah Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi profesi?

Ya,ada seperti itu.

29. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi kehumasan?

Kita bergabung di Bakohumas, hanya yang mengurus kegiatan Bakohumas atau datang ke acara Bakohumas itu dari subdit data media.

30. Bagaimana Kemlu membuka dan memperluas jaringan melalui organisasi media massa?

Ada dengan media massa. Kalaupun media asing, ada yang namanya JFCC. Tapi yang kenal atau ikut acara JFCC itu dari subdit fasmed. Mereka yang biasa bergaul dengan wartawan.

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan informan, Arrmanatha Nasir, Kepala Biro Adminitrsai Menteri/ Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (25/08) di Kantor Kementerian Luar Negeri
Sumber : dokumentasi pribadi



Wawancara dengan informan, Listiana Operananta, Kepala Bagian Informasi dan Media, Biro Administrasi Menteri (25/08) di Kantor Kementerian Luar Negeri
Sumber : dokumentasi pribadi



Wawancara dengan informan, Raksa Ibrahim, Kasi Liputan Media, Direktorat Informasi dan Media (20/07) di Kantor Kementerian Luar Negeri
Sumber : dokumentasi pribadi



Wawancara dengan informan, Andi Syamsurijal Usman, Kepala Subdit Data Media, Direktorat Informasi dan Media (26/07) di Kantor Kementerian Luar Negeri
Sumber : dokumentasi pribadi